



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**KETERLIBATAN MASYARAKAT SIPIL (GPPAC) DALAM INISIASI
PROSES PERDAMAIAN DI SEMENANJUNG KOREA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
dalam bidang Ilmu Pertahanan

DEVY INDAH PARAMITHA

120160103007

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK**

**BOGOR
JANUARI 2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Devy Indah Paramitha

NPM : 120160103007

Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik

Judul Tesis : Keterlibatan Masyarakat Sipil (GPPAC) Dalam inisiasi Proses Perdamaian di Semenanjung Korea

Tesis dengan judul dan atas nama mahasiswa tersebut diatas telah disetujui untuk dapat diujikan, sebagai bagian dari persyaratan penulisan Tesis untuk memperoleh gelar Magister Sains bidang Pertahanan pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. I Gede Sumertha, KY., PSC., M.Sc
Mayjen TNI (Purn)

Drs. I Nyoman Astawa, M.M., M.Phil
Letkol Caj NRP 32133

Bogor, Januari 2018

Dekan
Fakultas Keamanan Nasional
Universitas Pertahanan,

Dr. Siswo Hadi Sumantri, ST., M.MT
Laksamana Muda TNI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, sub-bab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, Januari 2018

Devy Indah Paramitha
NPM 120160103007

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devy Indah Paramitha
NPM : 120160103007
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Fakultas : Keamanan Nasional
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya berjudul:

“Keterlibatan Masyarakat Sipil (GPPAC) dalam Inisiasi Proses
Perdamaian di Semenanjung Korea”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekklusif ini, Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Januari 2018

Devy Indah Paramitha
NPM 120160103007

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan YME karena atas karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dari bimbingan berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk merampungkan tesis ini. Oleh sebab itu, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Letnan Jenderal TNI Dr. I Wayan Midhio, M.Phil selaku rektor Universitas Pertahanan
- (2) Laksamana Muda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan
- (3) Mayjen TNI (Purn) Dr. I Gede Sumertha, KY., PSC., M.Sc, selaku pembimbing I dan Letkol Caj Drs. I Nyoman Astawa, M.M., M.Phil selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dan juga dukungan untuk menyelesaikan tesis ini tepat waktu
- (4) Kolonel (Inf) Dr. Bambang Wahyudi, M.Si selaku Sesprodi Damai dan Resolusi Konflik yang selalu memberi motivasi dan dorongan kuat bagi penulis dalam penyusunan tesis
- (5) Seluruh narasumber yang bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi khususnya Dr. Ichsan Malik dan Pak Peter Van Tuijl yang telah banyak memberikan masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tanpa banyak hambatan terkait data
- (6) Keluarga yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus
- (7) Mbak Ningsih Susilawati, M.Si (Han) selaku Staff Prodi yang mendukung seluruh kegiatan administratif dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Bogor, Januari 2018

Devy Indah Paramitha
NPM 120160103007

ABSTRAKSI

Nama : Devy Indah Paramitha
NPM : 120160103007
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Judul Tesis : Keterlibatan Masyarakat Sipil (GPPAC) dalam
Inisiasi Proses Perdamaian di Semenanjung Korea

Lingkungan geopolitik yang semakin fluktuatif menjadikan Semenanjung Korea rawan terjadi perang sehingga perlu upaya resolusi konflik ditengah proses perundingan dan dialog melalui *track I* yang sudah tidak lagi efektif sejak Korea Utara keluar dari *six party talk* di tahun 2009. Keterlibatan masyarakat sipil (GPPAC) dalam proses resolusi konflik di Semenanjung Korea melalui pendekatan *track II* merupakan alternatif penyelesaian sebagai upaya *preventive* agar konflik tidak tereskalasi dan mengakibatkan ketidakstabilan keamanan kawasan dan global. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data pendukung yakni data primer berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka serta hasil seminar dan *forum group discussion*. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam inisiasi proses perdamaian di semenanjung Korea dilakukan dengan menysasar *grassroot* melalui dialog berkala serta berbagai macam interkasi lain yang sifatnya *p to p approach* yang bertujuan untuk menumbuhkan kembali “*cheong*” atau “*we-ness*” pihak yang berkonflik. Meskipun demikian, dalam pelaksanaanya keterlibatan sipil masih belum optimal karena harus menghadapi berbagai macam dinamika antara lain kuatnya memori kolektif pihak berkonflik, semakin menurunnya dukungan generasi muda khususnya di Korea Selatan, masalah terkait pendanaan, dan kuatnya pengaruh Amerika Serikat di Semenanjung Korea.

Kata Kunci: Masyarakat Sipil, GPPAC, Proses Perdamaian, Resolusi Konflik, Semenanjung Korea

ABSTRACT

*Name : Devy Indah Paramitha
Student Number : 120160103007
Study Program : Peace and Conflict Resolution
Thesis Title : Civil Society Organization (GPPAC) Involvement
related to Initiation of the Peace Process on the
Korea Peninsula*

The conflict escalation and fluctuation on the Korea Peninsula making this region prone to war, so that it will need conflict resolution effort in the middle of absence of negotiation and dialog process by track I since North Korea decided to leave Six Party Talk in year 2009. Involvement of Civil Society Organization or GPPAC in conflict resolution process on the Korea Peninsula through Track II approach is one of alternatives to prevent conflict from escalating and resulting instability in the region and global security. This research uses a qualitative method with supporting datas such as primary data from interviews and secondary data that obtained from literature review, seminar, and forum group discussion. According to result, civil society involvement in the initiation on the peace process in the Korea Peninsula is done by targeting the grassroot through dialogue and another P to P interaction. Thus approach is done for regenerate “Cheong” or “We-ness” between conflicting parties. However, in the implementation of civic engagement is still not really optimal due to variety of dynamics over conflicting parties such as collective memory about war, the declining support from young generation in South Korea, issues relating to funding, and strong influence of United State of America (USA) in the Korean Peninsula.

Key Word: Civil Society Organization, GPPAC, Peace Process, Conflict Resolution, Korea Peninsula

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAKSI	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISTILAH.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2. Signifikansi Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1. Manfaat Praktis	10
1.4.2. Manfaat Akademis	11
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	13
2.1. Landasan Teori dan Konsep.....	13
2.1.1. Teori Konflik.....	13
2.1.2. Teori Resolusi Konflik	15
2.1.3. Konsep Diplomasi Preventif	20
2.1.4. Konsep Civic Engagement	23

2.2. Penelitian Terdahulu	25
2.3. Kerangka Pemikiran	39
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	42
3.1. Desain Penelitian	42
3.2. Sumber Data/ Subyek/ Obyek Penelitian.....	44
3.2.1. Sumber Data	44
3.2.2. Subyek Penelitian.....	45
3.2.3. Obyek Penelitian	46
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.4. Teknik Analisa Data	47
3.5. Prosedur Penelitian	50
3.5.1. Instrumen Penelitian.....	50
3.5.2. Data Primer	51
3.5.3. Data Sekunder	51
3.5.4. Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data	52
3.6. Jadwal Penelitian	52
BAB 4 HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN DATA.....	53
4.1. Gambaran Umum Penelitian	53
4.1.1. Sejarah Konflik Semenanjung Korea	53
4.1.2. Upaya Resolusi Konflik di Semenanjung Korea melalui Track I.....	57
4.1.3. Keterlibatan Track II dalam Membangun Dialog Perdamaian di Semenanjung Korea.....	63
4.2. Analisis Data dan Hasil Penelitian	71
4.2.1. Proses Dialog oleh <i>Track I</i>	71
4.2.2. Bentuk Keterlibatan CSO (<i>Civil Society Organization</i>).....	74
4.2.3. Dinamika Serta Tantangan GPPAC	78
4.3. Pembahasan	82
4.3.1. Keterlibatan GPPAC dalam Inisiasi Proses Perdamaian di Semenanjung Korea.....	82
4.3.2. Dinamika Keterlibatan GPPAC dalam Proses Perdamaian di Semenanjung Korea.....	96

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.....	108
5.1 Simpulan	108
5.2 Saran	109
5.2.1 Praktis.....	109
5.2.2 Teoritis	110
DAFTAR SUMBER	112
LAMPIRAN 1	120
LAMPIRAN 2	122
LAMPIRAN 3	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Dinamika Konflik Korea Selatan dan Korea Utara antara tahun 2010- 2016	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1 Narasumber	45
Tabel 4.1 Alasan Pentingnya Dilakukan Unifikasi	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 3.1 Proses Analisa Data Kualitatif	48
Gambar 3.2 Komponen Analisa Data: Model Interaktif.....	50

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 GPPAC <i>Networking</i>	70
Bagan 4.2 Sikap Masyarakat Korea Selatan Terkait Unifikasi Berdasarkan Usia	98

DAFTAR SINGKATAN

AFSC	: <i>American Friends Service Commitee</i>
ARF	: <i>Asean Regional Forum</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
CPA	: <i>Comperhensive Peace Agreement</i>
CPV	: <i>Chinese People Voulenteer</i>
CRIES	: <i>the Regional Coordination for Economic and Social Research</i>
CSO	: <i>Civil Society Organization</i>
DMZ	: <i>The demilitarized zone</i>
DPRK	: <i>Democratic People of Republic Korea</i>
FGD	: <i>Forum Group Discussion</i>
GPPAC	: <i>The Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict</i>
GPPAC NEA	: <i>GPPAC Northeast Asia</i>
GPS	: <i>Global Positioning System</i>
HAM	: <i>Hak Asasi Manusia</i>
IAEA	: <i>The International Atomic Energy Agency</i>
ICBM	: <i>Intercontinental Ballistic Missile</i>
IPUS	: <i>Institute for Peace and Unification Studies Soul National University</i>
ISG	: <i>International Steering Group</i>
KNPC	: <i>Korea National Peace Commitee</i>
KPA	: <i>Korean People Army</i>
LEMHANAS	: <i>Lembaga Ketahanan Nasional</i>
LRBM	: <i>Long Range Balistic Missile</i>
LRBM	: <i>Long Range Balistic Missile</i>
NPT	: <i>Non-Ploriferasi Nuclear Treaty</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PRC	: <i>People Republic of China</i>
ROK	: <i>Republic of Korea</i>

RSGs : *Regional Steering Groups*
SLBM : *Submarine-launched Ballistic Missile*
SRBM : *Short Range Ballistic Missile*
TACE : *Taller Academico Cuba - EEUU)*
THAAD : *Terminal High Altitude Area Defense*
UN : *United Nations*
UNDP : *United Nation Development Program*
UNICEF : *The United Nations Children's Fund*
WHO : *World Health Organization*

DAFTAR ISTILAH

- Antagonistic* : Sikap yang menunjukkan rasa tidak setuju atau berlainan
- Arm Race* : Istilah untuk menjelaskan kegiatan perlombaan senjata yang dilakukan oleh beberapa negara
- Balance Of Power* : Sebuah kondisi guna menyeimbangkan kekuatan diantara negara atau aliansi untuk mencegah adanya kekuatan etintas suatu negara secara berlebihan
- Bottom-Up* : Pendekatan yang dimulai dari tatanan terbawah kemudian ke atas atau berasal dari masyarakat sipil ke pemerintah sebagai pengampu kebijakan
- C To C* : Hubungan yang dibangun antar komunitas dengan komunitas dalam sebuah tatanan sosial tertentu
- Cheong/ Shimcheong* : Istilah yang digunakan oleh masyarakat Korea untuk sebuah ikatan emosi satu sama lainnya atau "*we-ness relations*"
- Citizen Diplomacy* : Sebuah konsep untuk menjelaskan bahwa seluruh masyarakat sipil global memiliki hak untuk dan tanggung jawab untuk saling berhubungan lintas budaya dan menyebarkan toleransi

- Cold Peace* : Istilah untuk menjaskan sebuah situasi hubungan yang damai namun berpotensi terjadi kembali konflik atau kekerasan diantara pihak tersebut
- Collective Memory* : Istilah untuk menjelaskan sebuah kenangan yang dimiliki sebuah anggota kelompok sosial tertentu
- Conflict Preventive* : Sebuah upaya pencegahan agar konflik tidak semakin tersakalasi dan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar
- Cyber* : Dunia maya atau digital yang berada dalam sebuah jaringan komputer
- G To G* : Hubungan yang melibatkan pemerintah dengan pemerintah sebuah negara
- Grassroot* : Kelompok atau sekumpulan masyarakat sipil yang berada di tingkatan lokal
- Insiden *Cheonan* : Salah satu insiden penembakan kapal militer Korea Selatan yakni kapal *cheonan* oleh Korea Utara di tahun 2010
- Isipdae* : Istilah korea untuk menjelaskan generasi muda Korea Selatan yang berusia 20-an
- Korean War* : Perang antara Korea Selatan dan Korea Utara yang terjadi di tahun 1950 - 1953
- Mutual Understanding* : Rasa simpati yang muncul diantara dua pihak atau lebih terkait suatu hal

- P To P* : Hubungan yang dibangun antar individu dengan individu
- Peace Building* : Sebuah tindakan intervensi yang dirancang untuk mencegah dimulainya kembali konflik kekerasan dengan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan
- Pela-Gandong* : Istilah masyarakat beberapa wilayah di Maluku untuk ikatan persaudaraan “pela” adalah suatu ikatan persatuan dan “gandong” ialah saudara
- Pivot To Asia* : Kebijakan Amerika Serikat pada masa pemerintah Barack Obama yang berusaha untuk merangkul negara-negara di kawasan Asia
- Protracted Conflict* : Konflik yang terus terjadi secara berkelanjutan dan terus terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama
- Proxy War* : Peperangan yang menggunakan pihak ketiga sebagaipengganti
- Purposive Sampling* : Metode penentuan sebuah sampel dengan didasarkan kepada karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau objek yang ingin dipelajari
- Six Party Talk* : Forum perundingan yang melibatkan enam negara yakni Amerika Serikat, Korea Selatan, Korea Utara, Tiongkok, Rusia, Jepang

- Soft Power* : Kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dengan cara-cara tanpa kekerasan dan memaksa
- Sunshine Policy* : Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Dae Jung
- The Axis Of Evil* : Istilah yang digunakan oleh Presiden George W.Bush untuk menyebut Korea Utara bersama dengan Iran sebagai dua negara “setan/jahat” pasca terjadinya teragedi 9/11
- Top-Down Approach* : Pendekatan yang dimulai dari tatanan atas kemudian ke bawah atau dari pemerintah ke masyarakat
- Track I* : Kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh atau antar pemerintah secara resmi atau *official goverment diplomacy*
- Track II* : Kegiatan diplomasi yang dilakukan bukan pihak selain pemerintah, informal, dan didalamnya terdapat aktifitas antara masyarakat atau kelompok individu tertentu yang biasanya disebut dengan istilah “aktor non-negara”. Nama lain dari *track II* adalah “*backchannel diplomacy*”
- Triangulate* : Teknik memeriksa keabsahan sebuah data dalam penelitian melalui perbandingan informasi yang didapat

- U To U* : Hubungan yang dibangun antar Universitas
- Uss Carl Vinson* : Kapal induk yang dimiliki oleh Amerika Serikat
- Win-Win Solution* : Situasi dimana dua belah pihak atau lebih berada pada posisi yang menguntungkan keduanya sehingga memberikan kesan tidak ada pihak yang kalah dalam sebuah pertentangan
- Women Cross Dmz* : Sebuah gerakan masyarakat sipil yang diwakili oleh perempuan untuk menyuarakan perdamaian di Semenanjung Korea

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian	120
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	122
Lampiran 3 Dokumentasi	130

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasca perang dunia ke dua, terjadi perang sipil di berbagai belahan dunia yang salah satunya terjadi di Semenanjung Korea yakni Perang Korea antara tahun 1950 - 1953. Sebagai akibat dari perang tersebut, antara setengah sampai dua juta penduduk sipil meninggal dan sepuluh juta lainnya menjadi pengungsi (Myung, Jaffe, terj., Christine, 2013 ; 26-27). Semenanjung Korea juga terpecah menjadi dua negara yang terpisah yakni DPRK (*Democratic People of Republic Korea*) dibagian Utara dan ROK (*Republic of Korea*). Perang korea sendiri dimulai pada tahun 1950 dan berakhir pada tanggal 27 Juli 1953 setelah adanya perjanjian gencatan senjata oleh kedua belah pihak untuk sepakat menghentikan peperangan. Kerena secara resmi kedua kubu belum memiliki perjanjian damai dan hanya merupakan perjanjian gencatan senjata, maka secara teknis perang masih berlangsung di antara kedua belah pihak hingga saat ini (Worden, Bruce, 2008 ;44-45).

Jika dilihat melalui perspektif sejarah perang, Perang Korea merupakan bentuk *proxy war* antara Amerika Serikat (Liberal) dengan Uni Soviet (Komunis) yang terjadi pada masa perang dingin. Pemisahan Semenanjung Korea menjadi dua wilayah yang terpisah merupakan inisiatif dari Amerika Serikat dan Uni Soviet pada akhir perang dunia II yang ditandai oleh garis 38⁰ paralel yang memisahkan wilayah Selatan dan Utara (Myung, Jaffe, terj., Christine, 2013 ; 28). Oleh karenanya, tidak mengherankan jika pada saat itu baik pihak Selatan maupun Utara masing-masing sangat kuat dipengaruhi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di tahun 1989, tidak serta merta mempengaruhi situasi hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Ketegangan dan provokasi oleh kedua pihak masih terus berlangsung. Kebijakan proliferasi nuklir dan pengembangan kapasitas persenjataan oleh Korea Utara menjadikan

intensitas Konflik semakin besar dan cenderung fluktuatif (Worden, Bruce, 2008: 54-56 ; Hampson, Croker, Aall, Webel & Galtung, Ed. 2007: 99).

Keadaan yang fluktuatif tersebut mengakibatkan kondisi keamanan di Semenanjung Korea semakin tidak menentu sehingga semenanjung Korea tetap menjadi wilayah yang rawan akan terjadinya perang dimasa yang akan datang. Selain itu, tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga akan mengakibatkan ancaman bagi stabilitas keamanan baik regional maupun internasional. Konflik di Semenanjung Korea memiliki latar belakang cukup rumit yang melibatkan elemen politik, ideologi, dan militer. Konflik menjadi semakin kompleks ketika formasi elemen dan adanya kenyataan bahwa konflik Korea Utara dan Selatan turut dipengaruhi oleh sistem internasional dengan adanya keterlibatan negara besar seperti Tiongkok, Rusia dan Amerika Serikat (Bo-Hyuk Suh, 2016: 53-54). Isu terkait proliferasi nuklir dan pengembangan persenjataan oleh Korea Utara serta rencana Korea Selatan bersama Amerika Serikat untuk mengembangkan THAAD (*Terminal High Altitude Area Defense*) sebagai sistem peluru kendali rudal balistik juga menjadi faktor yang menyebabkan konflik tetap berkelanjutan dengan intensitas yang tinggi hingga sampai saat ini. Rasa curiga antara kedua negara menjadikan intensitas konflik terus terjadi. Bagi korea Selatan, nuklir dan rudal Korea Utara merupakan sumber dilema terbesar keamanan. Sedangkan bagi Korea Utara, ancaman nyata ialah adanya aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan di Semenanjung Korea yang masih solid sehingga mendorong Korea Utara untuk meningkatkan kekuatannya dengan melakukan proliferasi Nuklir sebagai bentuk *self defense* (Hampson, Croker, Aall, Webel & Galtung, Ed. 2007: 113).

Hubungan yang fluktuatif antara kedua negara menjadikan Semenanjung Korea menjadi salah satu wilayah yang rentan akan terjadinya perang. Keberadaan Amerika Serikat semakin menjadikan hubungan kedua negara menjadi lebih kompleks. Terbukti dengan adanya pengiriman kapal induk *USS Carl Vinson* pada pertengahan tahun 2017 ke Semenanjung Korea sebagai bentuk respon dari Amerika Serikat terkait uji

coba nuklir dan misil yang dilakukan oleh Korea Utara (Noerper, *Comparative Connection Pasific Forum CSIS*, Vol. 19, No. 1, May 2017 : 36). Berikut merupakan tabel yang menunjukkan dinamika konflik antara Korea Selatan dan Utara dalam kurun waktu enam tahun terakhir :

Tabel 1. 1 Dinamika Konflik Korea Selatan dan Korea Utara antara tahun 2010- 2016

Tahun	Korea Utara	Korea Selatan
2010	<p>a. Penembakan kapal perang <i>Cheonan</i> milik Korea Selatan oleh rudal Korea Utara</p> <p>b. Penembakan artileri ke pulau <i>Yeonpyeong</i> milik Korea Selatan oleh Korea Utara. Akibat insiden ini setidaknya dua tentara Korea Selatan tewas dan mencederai penduduk setempat serta merusak beberapa gedung dan bangunan.</p>	<p>a. Latihan militer Korea Selatan dan Amerika Serikat sebagai respon atas provokasi Korea Utara di lokasi tepat dimana insiden <i>Cheonan</i> terjadi</p> <p>b. Korea Selatan membalas dengan menembakkan artileri ke Korea Utara dan menempatkan pasukan pasukan bersenjata serta jet tempur sebagai bentuk <i>defense</i> atas sikap Korea Utara</p>
2011	<p>a. Meluncurkan rudal jarak pendek/ SRBM (<i>Short Range Ballistic Missile</i>) pada bulan desember dan bertepatan dengan kematian Kim Il Sung</p>	<p>a. Korea Selatan melakukan latihan militer gabungan bersama dengan Amerika Serikat</p>
2012	<p>a. Serangan <i>cyber</i> oleh Korea Utara kepada beberapa kantor berita Korea Selatan</p>	<p>a. Penyelegaraan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat dan</p>

	<p>dan penyerangan sistem navigasi GPS yang mengganggu penerbangan, dan transportasi laut</p> <p>b. Dua kali meluncurkan LRBM (<i>Long Range Ballistic Missile</i>) <i>Taepodong/ Unha</i>. Peluncuran pertama dinyatakan gagal, namun uji coba kedua berhasil</p>	<p>mengecam tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara</p> <p>b. Mengajukan pemberian Sanksi kepada Korea Utara ke PBB</p>
2013	<p>a. Korea Utara tetap melakukan serangan <i>cyber</i> ke beberapa instansi pemerintahan dan kantor perbankan Korea Selatan</p> <p>b. Korea Utara melakukan uji coba nuklir bawa tanah. Akibat dari uji coba tersebut, wilayah Korea Selatan dan Jepang merasakan gempa atau getaran ringan</p>	<p>a. Mengecam dengan keras atas tindakan serangan <i>cyber</i> yang dilakukan oleh Korea Utara</p> <p>b. Menyelenggarakan latihan militer gabungan bersama dengan Amerika Serikat</p>
2014	<p>a. Melakukan rencana reuni keluarga yang terpisah dengan Korea Selatan, meskipun hampir membatalkan karena Korea Selatan yang melakukan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat</p> <p>b. Korea Utara meluncurkan</p>	<p>a. Melakukan rencana pertemuan kembali keluarga yang terpisah dengan Korea Utara</p> <p>b. Menyelenggarakan latihan</p>

	ICBM (<i>Intercontinental Ballistic Missile</i>)	militer gabungan dengan Amerika Serikat dan mengecam dengan keras tindakan peluncuran misil dan rudal oleh Korea Utara.
	c. Uji Coba SLBM (<i>Submarine-launched Ballistic Missile</i>) – <i>Pukkuksong-1</i> atau KN-11	
2015	a. Dua kali melakukan uji coba peluncuran SLBM (<i>Submarine-launched Ballistic Missile</i>). Dari uji coba tersebut, peluncuran pertama gagal dan peluncuran kedua berhasil	a. Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan militer gabungan di Semenanjung Korea
2016	a. 6 Januari 2016, Korea Utara berhasil melakukan uji coba senjata pemusnah masal “bom hidrogen” b. Meluncurkan LRBM (<i>Long Range Ballistic Missile</i>) ke orbit	a. Korea Selatan menembaki kapal nelayan dan patroli milik Korea Utara yang dianggap melewati garis batas utara Semenanjung Korea. b. Korea Utara dan Amerika Serikat bekerjasama mengembangkan THAAD (<i>Terminal High Altitude Area Defense</i>) sebagai upaya untuk mempertahankan diri dari ancaman rudal dan nuklir oleh Korea Utara

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara merupakan sebuah bentuk respon atau

balance of power dari kedua negara. Pola konflik dan ketegangan kedua negara tetap sama dari tahun ke tahun, dimana Korea Utara akan selalu melakukan pengembangan kekuatan persenjataan dan nuklir. Sedangkan disisi lain, Korea Selatan tetap melanjutkan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat yang merupakan agenda rutin kedua negara. Konflik tersebut berkembang dengan cukup fluktuatif dan bersifat *action and reaction*. Sehingga, sedikit apapun perubahan pola kebijakan baik oleh Korea Utara ataupun Korea Selatan dan Amerika Serikat, maka akan turut mempengaruhi pola konflik kedua negara apakah tereskalasi atau terdeeskalasi.

Tindakan Korea Utara yang tidak dapat diprediksi juga membuat Semenanjung Korea menjadi *flash point* yang sangat berbahaya. Sehingga, perlu upaya untuk melakukan proses resolusi konflik dalam rangka menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea agar mampu menciptakan perdamaian positif diantara kedua negara. Proses perundingan untuk mencapai perdamaian di Semenanjung Korea telah dilakukan beberapa kali dengan melibatkan beberapa negara lainnya seperti China, Rusia, Amerika Serikat, dan Jepang. Ke-empat negara tersebut turut menjembatani perundingan damai antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang dikenal dengan istilah *six party talk*. Namun, *six party talk* tidak lagi efektif ketika pada April 2009 Korea Utara memutuskan untuk keluar dari forum multilateral tersebut (Kearney, 2017: 18). Hal ini menunjukkan bahwa upaya membangun perdamaian yang selama ini dilakukan dalam tingkatan negara atau *track I* di Semenanjung Korea tidak serta merta efektif.

Mengingat level negara tidak cukup berhasil dalam menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea maka tidak sedikit pula kelompok organisasi masyarakat sipil yang turut serta mengupayakan perdamaian melalui pendekatan di level *grassroot* yang melibatkan peran masyarakat sipil baik di kedua negara yang berkonflik juga dari masyarakat Internasional yang peduli terhadap perdamaian di Semenanjung Korea.

Keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam intervensi konflik banyak dipengaruhi oleh perubahan paradigma operasi perdamaian yang sebelumnya hanya menempatkan PBB sebagai lembaga yang memonopoli kegiatan operasi perdamaian menjadi lebih dinamis dengan melibatkan peran masyarakat sipil dalam proses perdamaian sebagai *track II diplomacy* sesuai dengan fokus komunitas masyarakat tersebut. Pencegahan terjadinya kekerasan dan proses *peace building* tidak hanya merupakan tanggung jawab dari negara. Oleh karena itu, sebagai upaya membangun perdamaian di Semenanjung Korea selain dilakukan melalui *track I* juga melalui *track II* dengan melibatkan masyarakat sipil sebagai salah satu alternatif resolusi konflik.

Terdapat beberapa contoh yang menunjukkan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses perdamaian yang cukup berhasil menciptakan dialog pihak berkonflik guna mencapai tahap rekonsiliasi demi mewujudkan perdamaian. Diantaranya ialah keterlibatan masyarakat sipil yang dalam hal ini ialah *the Regional Coordination for Economic and Social Research* (CRIES) yang juga merupakan salah satu anggota dari GPPAC dalam menginisiasi dialog akademik yang membahas terkait upaya resolusi dan rekonsiliasi hubungan Amerika Serikat dan Cuba di tahun 2009. Dengan melibatkan Universitas Amerika dan Universitas Havana yang kemudian disebut dengan TACE (*Taller Academico Cuba - EEUU*) yang merupakan akronim bahasa spanyol dari *the umbrella of the Cuba – United States Academic Workshop*, TACE membangun dialog dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan di Brazil dan beberapa tempat lainnya. Setelah diadakan beberapa kali pertemuan antara tahun 2009 hingga 2013, dihasilkan beberapa konsensus dan rekomendasi terkait ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Cuba yang dipresentasikan secara resmi di Washington D.C dan Havana (Serbin & Bourse. 2015: 18-39).

Hasilnya ialah, pada tahun 2013 Amerika Serikat dan Kuba sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan setelah lebih dari 50 tahun kedua

negara saling bermusuhan. TACE dianggap menjadi salah satu pihak yang turut berkontribusi, mengingat normalisasi tersebut juga dipengaruhi oleh adanya asimiliasi dari rekomendasi yang diberikan oleh TACE. Hal ini menunjukkan bahwa “*citizen diplomacy*” memang tidak dapat menggantikan diplomasi yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah dalam menyelesaikan konfrontasi namun posisi dari “*citizen diplomacy*” lebih kepada membantu dalam mendorong serta mempercepat tindakan birokrasi dalam memperbaiki hubungan dan mengatasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Kuba. Dengan demikian, masyarakat sipil mampu menjadi pendukung ataupun inisiator dalam proses perdamaian selain negara.

Sebagai upaya untuk membangun perdamaian di Semenanjung Korea, terdapat beberapa komunitas masyarakat sipil internasional yang terlibat diantaranya ialah GPPAC (*The Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict*) sebagai salah satu jaringan masyarakat sipil Internasional. Dalam rangka mencegah eskalasi konflik di semenanjung Korea, GPPAC berupaya untuk membangun kepercayaan dengan menggelar dialog perdamaian yang salah satunya digelar di *Ulaanbaatar* Mongolia. Inisiasi upaya perdamaian di Semenanjung Korea oleh GPPAC khususnya oleh GPPAC *Northeast Asia* (GPPAC NEA) dimulai pada tahun 2005 dan berlangsung hingga sampai saat ini (<http://www.gppac.net/ulaanbaatar-process>, diakses 15 Agustus 2017).

Setelah forum multilateral *six party talk* mengalami jalan buntu, maka tidak ada lagi mekanisme regional dan global yang secara khusus membahas mengenai permasalahan di Semenanjung Korea. Sehingga, terdapat peluang yang cukup besar bagi masyarakat sipil internasional untuk turut berkontribusi dalam membangun perdamaian di Semenanjung Korea. Oleh karenanya, dalam penelitian ini akan menganalisa mengenai keterlibatan masyarakat sipil yang dalam hal ini ialah GPPAC (*The Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict*) dalam proses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, intensitas ketegangan antara Korea Selatan dan Utara serta keberadaan Amerika Serikat di Semenanjung Korea berlangsung sangat fluktuatif dan jika terus dibiarkan tentu akan menimbulkan ancaman bagi stabilitas keamanan baik di kawasan dan juga global. Oleh karenanya, peneliti menilai bahwa untuk mencegah eskalasi konflik antara kedua negara semakin besar maka proses perdamaian ialah sesuatu yang *urgent* dan harus dilakukan. Meskipun demikian setelah proses perdamaian yang dilakukan melalui level *track I* atau negara mengalami kegagalan, maka proses inisiasi perdamaian yang dilakukan oleh masyarakat sipil menjadi salah satu alternatif pendekatan dalam upaya mencapai perdamaian di Semenanjung Korea. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penulis menetapkan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana keterlibatan GPPAC (*Global Partnership for Prevention of Armed Conflict*) dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea?
- b. Bagaimana dinamika yang dihadapi GPPAC (*Global Partnership for Prevention of Armed Conflict*) dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea?

1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa keterlibatan GPPAC (*Global Partnership for Prevention of Armed Conflict*) dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea
- b. Untuk menganalisa dinamika yang di hadapi GPPAC (*The Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict*) dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea.

1.3.2. Signifikansi Penelitian

Penelitian mengenai upaya perdamaian atas konflik yang terjadi di Semenanjung Korea yang melibatkan Korea Utara dan Korea Selatan penting untuk dilakukan terkait kajian bidang damai dan resolusi konflik. Adapun yang menjadi signifikansi penelitian ini ialah berkaitan dengan aspek resolusi konflik yang diperankan oleh masyarakat sipil.

Dengan demikian, tesis ini dapat menunjukkan bahwa perdamaian bukan hanya perhatian dari negara saja sebagai otoritas pengambil kebijakan dalam tatanan elit sebuah negara. Namun, juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dunia. Apabila perdamaian di level negara tidak mampu di wujudkan maka dapat di upayakan di level masyarakat. Hal ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk menciptakan perdamaian dalam sebuah konflik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana upaya dari masyarakat sipil dalam hal ini ialah GPPAC dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea dan bagaimana dinamika yang dihadapi dalam proses tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada seluruh komponen masyarakat dunia tidak terkecuali di Indonesia untuk turut ikut serta dan aktif berperan dalam proses membangun perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun secara geografis semenanjung Korea cukup jauh dari Indonesia, namun sebagai bagian dari komunitas Internasional, Indonesia turut memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga dan menciptakan perdamaian dunia.

Perdamaian bukan hanya urusan negara, warga negara juga harus ikut serta andil dalam mewujudkan perdamaian dunia, mengingat perdamaian merupakan tanggung jawab bersama, dan upaya

menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea ialah salah satu bentuk kontribusi dalam membangun perdamaian dan menciptakan ketertiban dunia guna menjaga stabilitas keamanan di kawasan dan Internasional.

Selain itu, keterlibatan GPPAC dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea turut pula menandakan sebuah kenyataan bahwa hubungan yang dibangun tidak lagi terpengaruh dengan ideologi masing-masing negara, namun masyarakat sipil yang tergabung justru menekankan pada aspek *humanisme* atau kemanusiaan yang selama ini kurang diperhatikan melalui pendekatan *track 1* yang lebih banyak menggunakan pendekatan melalui paradigma keamanan, ideologi, dan politik.

Selain itu, Peningkatan kekuatan militer dan persenjataan yang dilakukan oleh Korea Utara dan tindakan uji coba ICMB (*Intercontinental Missile Balistic*) yang beberapa diantaranya dapat mencapai Indonesia (*Tepodong-4*) tentu menjadi catatan penting dan saran bagi Indonesia untuk turut terlibat dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Baik dalam rana bilateral maupun multilateral dengan melibatkan institusi regional seperti ASEAN dan ARF dimana Korea Utara dan Selatan menjadi anggota.

1.4.2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat akademis bagi penulis maupun dalam pemanfaatan landasan teoritis dan konseptual. Adapun manfaat akademis yang ingin dicapai melalui tesis ini antara lain ialah:

- a. Tesis ini secara akademis disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Master (S-2) bidang Pertahanan melalui program studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan
- b. Mampu menunjukkan temuan penelitian yang signifikan terkait konflik di Semenanjung Korea dan menemukan alternatif resolusi konflik

guna mewujudkan perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan yang salah satunya ialah dengan melihat keterlibatan masyarakat sipil dalam hal ini ialah GPPAC dalam inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea.

- c. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat menambah wawasan serta literatur dalam bidang kajian damai dan resolusi konflik, khususnya terkait resolusi konflik yang melibatkan masyarakat sipil dalam menciptakan perdamaian dalam rana hubungan internasional guna mewujudkan pertahanan serta stabilitas keamanan regional dan global.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini berkaitan dengan kajian mengenai damai dan resolusi konflik. Sehingga, yang menjadi fokus dalam penelitian ini terletak pada perdamaian di Semenanjung Korea. Mengingat, konflik Semenanjung Korea sendiri merupakan bagian dari ancaman yang berasal dari lingkungan strategis global yang perlu untuk diwaspadai dan diselesaikan tidak hanya melalui level negara saja, melainkan juga dalam level *grassroot* atau masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data pendukung diperoleh dari berbagai macam sumber, baik yang sifatnya sekunder yang diperoleh dari kegiatan studi pustaka dan juga sumber data primer dari hasil kegiatan seminar, serta wawancara dengan narasumber yang dianggap kredibel berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga akan menjelaskan mengenai dinamika terkait ruang lingkup proses perdamaian yang melibatkan masyarakat sipil.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Landasan Teori dan Konsep

2.1.1. Teori Konflik

Merujuk pada pendapat dari Galtung (2007:131), konflik merupakan sebuah kondisi dimana negara atau individu merasa dilema dan terancam atas kehadiran pihak lainnya. Dalam artian, baik itu terjadi ataupun tidak terjadi kekerasan sekalipun, apabila suatu pihak merasakan adanya tantangan dan ancaman dari pihak lain maka hal tersebut mengindikasikan adanya sebuah konflik.

Banyak hal yang menjadi alasan terjadinya konflik dalam sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini merujuk pada Boulding (1963:4) yang menyatakan bahwa "*Conflict exists when any potential position of two behaviour units are mutually incompatible*". Oleh karenanya, dapat dinyatakan bahwa pengertian sederhana dari konflik ialah sebuah fenomena dinamis dimana salah satu aktor melakukan reaksi atas apa yang dilakukan oleh aktor lainnya, dinamika reaksi tersebut tidak jarang berlanjut dalam aksi yang lebih jauh dan bisa saja memicu kerusuhan dan bahkan perang diantara mereka.

Teori konflik sendiri memiliki berbagai macam versi dan teori turunan lainnya. Meskipun dari seluruh teori konflik yang ada memiliki terminologi dan juga fokus yang berbeda berkenaan dengan konflik, namun seluruh teori konflik tersebut tetap memiliki *concern* yang sama yakni konseptualisasi tentang bagaimana pertentangan yang terjadi dieskpresikan oleh pihak yang berkonflik dan diselesaikan melalui beberapa cara (Schellenberg, 1996:12). Walaupun demikian, setiap teori konflik yang ada berdiri dengan menggunakan persepektif yang berbeda terkait definisi dan akar penyebab konflik itu sendiri. Oleh karenanya, sebagai dasar utama dalam menganalisa konflik di semenanjung Korea dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori konflik melalui perspektif *social structural theory*.

Teori sosial struktural ialah salah satu turunan dari teori konflik yang mendefinisikan konflik merupakan produk dari bagaimana sebuah masyarakat atau kondisi sosial dibentuk dan dikelola. Dalam kontes internasional, Morgenthau, Galtung, dan Wallerstein (1996:98) menyebutkan jika "*Social structure applies not only to a society, but also to relations between societies*". Lebih jauh lagi, ketiganya melihat jika "*world structured as a system of national states with constant tensions and conflicts*" (Schellenberg, 1996:98). Dengan demikian, teori sosial struktural dalam rana global atau internasional dapat dijelaskan sebagai sebuah hubungan antar *states* (negara-negara) yang bertentangan. Sehingga, secara lebih luas teori sosial struktur dalam teori konflik dapat menjelaskan mengenai hubungan antar negara yang penuh dengan intensitas dan juga ketegangan sebagai akibat dari adanya mekanisme struktural yang terjadi secara global baik dalam rana militer dan politik. Seperti yang dikemukakan oleh Wallerstein (1974:224) bahwa adanya perbedaan kekuatan politik dan ekonomi di dunia, akan mengakibatkan terjadinya friksi dan juga ketegangan diantara negara-negara yang ada.

Merujuk pada karakteristik teori yang ada apabila dikaitkan dengan kondisi konflik di Semenanjung Korea, maka kondisi sosial struktural yang dimaksudkan ialah sejarah masa lampau baik yang berkaitan dengan urusan militer dan politik di Semenanjung Korea yang banyak dipengaruhi oleh kondisi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menjadi cikal bakal konflik Korea Selatan dan Utara dimasa sekarang. Dengan demikian, ketegangan antara Korea Utara dan Selatan pada saat ini merupakan hasil dari kondisi struktural yang terjadi di masa lalu dimana merupakan kelanjutan dari Perang Korea yang terjadi di tahun 1950 sebagai akibat dari berlangsungnya perang Dingin.

Selain itu, kondisi struktural sosial yang membentuk ketegangan di Semenanjung Korea pada saat ini juga banyak dipengaruhi oleh keberadaan aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan di Semenanjung Korea yang disisi lain menjadi dilema keamanan bagi Korea Utara. Oleh

karenanya, kondisi *balance of power* tidak dapat dihindari antara kedua negara. Hal inilah yang kemudian menjadikan ketegangan terus berlanjut. Ketegangan yang terus terjadi tidak menutup kemungkinan dapat tereskalasi menjadi konflik yang lebih besar dan tentunya dapat mengancam keamanan kawasan dan global.

Berdasarkan teori konflik yang dijelaskan dengan pendekatan *social structural theory* dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi di Semenanjung Korea tidak lain terjadi karena dilatar belakangi oleh masalah struktural dari masa kolonialisme Jepang dan dipertajam pada masa perang dingin yang memicu terjadinya perang sipil di Korea pada tahun 1950. Perang sipil (*korean war*) inilah yang kemudian menjadi awal dari ketegangan di Semenanjung Korea hingga sampai sekarang.

2.1.2. Teori Resolusi Konflik

Setiap konflik memiliki karakteristik yang berbeda, dan tidak jarang sebuah konflik akan terus berlangsung apabila terjadi *unsatisfaction situation* dimana kedua belah pihak masih belum menemukan satu persamaan terkait kepentingan pihak yang ada. Sehingga berimbas pada kegagalan sebuah negara untuk mengelola hubungan mereka yang “*antagonistic*” (Jeong, 2010: 3). Kondisi demikian dapat memunculkan *protracted conflict* dimana konflik tetap berlangsung dalam periode yang cukup lama dan bahkan dari generasi ke generasi. Salah satu contoh konkrit dari *protracted conflict* ialah konflik di Semenanjung Korea antara Korea Utara dan Korea Selatan yang berlangsung hingga lebih dari 60 tahun.

Konflik ialah sebuah bentuk sikap perlawanan yang melibatkan dua atau lebih aktor dengan disertai sikap permusuhan yang intens. Kondisi dimana terjadi kelangkaan dan ketidaksesuaian dapat menjadi sumber terjadinya pertengkaran (Jeong, 2010: 3). Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari karena konflik pada dasarnya merupakan bagian dari *human nature*. Meskipun tidak dapat dihindari, konflik tetap

bisa dikendalikan dengan cara mencari jalan penyelesaian konflik dengan tujuan agar konflik tidak mengalami peningkatan eskalasi dan tidak menghasilkan dampak yang besar.

Sebagai awal proses pencarian jalan keluar konflik, perlu adanya keinginan kuat serta komitmen dari para pihak yang bertikai untuk sama-sama menyelesaikan konflik dan membangun sebuah kondisi damai. Meskipun demikian, selain komitmen pihak yang berkonflik untuk menemukan penyelesaian masalah, kelemahan dalam menghasilkan *win-win solution* ialah tergantung adanya konstelasi kepentingan dan tersedianya alternatif pilihan (Jeong, 2010:11). Salah satu alternatif untuk mencari jalan keluar permasalahan yang ada ialah dengan resolusi Konflik.

Resolusi konflik adalah sebuah upaya untuk membuat pihak yang sedang berkonflik agar mencapai suatu kesepakatan atau *agreement* baik melalui adanya perubahan lingkungan atau juga melalui keterlibatan pihak ketiga (Schellenberg, 1996:9). Pada konflik yang telah berlangsung cukup lama, seringkali tidak jelas bagaimana memprediksi kapan resolusi dapat dicapai. Persepsi hasil yang ingin dicapai tentu akan berbeda diantara pihak-pihak yang terkait mengingat tujuan dan masalah yang dimiliki tentu berbeda satu dengan yang lainnya (Jeong, 2010: 12). Oleh karena itu, variabel dalam mekanisme resolusi konflik tidak seluruhnya dapat diaplikasikan dalam tiap konflik, mengingat setiap konflik memiliki karakteristik dan juga tipologi yang berbeda.

Adapun untuk menjelaskan mengenai inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea oleh masyarakat sipil, penulis menggunakan beberapa variabel yang terdapat di dalam teori resolusi konflik yang dianggap mampu mewakili untuk menjawab permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian. Merujuk pada teori konflik dengan pendekatan *social structural theory* yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa pendekatan yang ditawarkan sebagai instrumen resolusi konflik, diantaranya ialah (Schellenberg, 1996:99-100):

a. *Gradual Reform*

Perubahan bertahap, yakni memungkinkan adanya perubahan terhadap struktur sosial yang ada di negara atau masyarakat yang bertikai. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan pola hubungan pihak yang berkonflik ataupun dalam tatanan kebijakan. Tidak mudah untuk melakukan perubahan, oleh karena itu perlu adanya cara dan waktu yang bertahap dan konstan. Selain itu, dalam proses tersebut juga memerlukan adanya peran pihak ketiga yang netral sebagai kontrol dan negosiator dalam upaya mewujudkan perubahan terkait hubungan pihak yang berkonflik.

Untuk kasus di Korea Utara dan Selatan, proses *gradual reform* bukan sesuatu yang baru. Beberapa kali dilakukan upaya perubahan terkait struktur sosial yang ada dengan menasar kepada perubahan kebijakan, khususnya terkait kebijakan penghentian proliferasi nuklir oleh Korea Utara. Hal tersebut tidak efektif, karena bagi Korea Utara Nuklir merupakan sebuah bentuk *deterrence* negara dalam menghadapi dinamika ancaman di Semenanjung Korea khususnya terkait aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Untuk itu, perlu adanya alternatif lain diantaranya ialah dengan melakukan perubahan pola hubungan di level masyarakatnya. Hal tersebutlah yang saat ini di upayakan oleh GPPAC (*Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict*) dalam proses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea, yang mana *gradual reform* dimulai dari tatanan *grassroot* guna membangun kembali hubungan baik antara kedua negara melalui pendekatan level *people to people* atau *track II*.

b. *Non-Violent Confrontation*

Merupakan salah satu pendekatan solusi penyelesaian masalah dalam mekanisme teori sosial struktural. Berbeda dengan pendekatan *gradual reform* yang lebih melihat kepada tujuan atau hasilnya. *Non-Violent Confrontation* justru lebih mengarah pada pergerakan atau tindakan yang dilakukan untuk mengupayakan perubahan sosial yang

fundamental dalam sebuah konflik dengan cara-cara damai atau *non-violent*. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh semua pihak, baik melalui level negara (pemerintah) atau organisasi masyarakat sipil. Dalam kasus ini, *non-violent confrontation* sebagai upaya mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea dilakukan oleh GPPAC sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil Internasional.

Hal ini tentu sesuai dengan mekanisme resolusi konflik dalam tataran praktiknya secara umum yang diantaranya ialah *facilitation*. Dalam mekanisme fasilitasi, terdapat beberapa komponen yang salah satunya ialah dialog. Secara luas, proses fasilitasi dimaknai sebagai upaya mencapai konsensus atau perjanjian tertentu melalui metode fasilitatif guna menemukan opsi yang dapat diterima oleh pihak yang berbeda. Selain itu, proses fasilitatif juga dapat digunakan sebagai usaha *problem solving* dan menciptakan kesempatan atau *opportunity* untuk membangun hubungan pihak yang berkonflik dan dapat memungkinkan mengarah kepada negosiasi secara resmi (Jeong, 2010: 192-193).

Dalam proses resolusi konflik, tidak jarang pihak yang berkonflik menolak untuk melakukan dialog. Oleh karenanya, memfasilitasi pertemuan merupakan salah satu langkah awal untuk mencairkan hubungan pihak yang berkonflik. Jeong (2010: 192-193) menyatakan bahwa konflik yang sifatnya *protracted* menandakan jika kedua pihak yang bertentangan telah kehilangan rasa kepercayaan satu sama lain. Sehingga, untuk menyusun sebuah resolusi konflik perlu terlebih dahulu menciptakan "*mutual understanding*" diantara pihak yang ada. Untuk membangun "*mutual understanding of the issues and problem*" dapat dilakukan melalui *group discussion* dan dialog.

Untuk meningkatkan *trust* dan *understanding*, dapat dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang mampu mempengaruhi dinamika kelompok. Menurut Lynch (2005) dalam Jeong (2010: 193), fasilitasi ialah "*the art of possible that derived from bringing the adversaries to forge mutual understanding on specific issues instead of*

position taking". Dengan demikian, fasilitasi cukup berbeda dengan negosiasi dimana proses fasilitasi yang menitik beratkan pada dialog lebih bertujuan untuk membangun sebuah *mutual understanding* terlebih dahulu, berbeda dengan negosiasi yang lebih berorientasi kepada memuaskan kepentingan seluruh pihak yang terlibat (Jeong, 2010:193).

Sasaran dari proses dialog ialah membangun dan mengembangkan *framework* bersama terkait permasalahan. Untuk itu, proses fasilitasi (dialog) lebih banyak dilakukan oleh pihak ketiga yang kebanyakan diantaranya ialah kelompok masyarakat sipil. Sesuai dengan konsep *human development* yang dipopulerkan oleh UNDP (*United Nation Development Program*) dan perwakilan UN lainnya yang berfokus pada membangun dari *grassroot*-nya (Jeong, 2010:198). Selain itu, dialog juga merepresentasikan sebuah praktek kritis dalam upaya penciptaan makna dan pembangunan komunitas. Untuk itu, kunci utama dialog ialah komunikasi dilakukan dengan toleransi atas keanekaragaman perspektif (Kellet dan Dalton, 2001).

Sebagai bentuk keterlibatan GPPAC dalam proses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea, GPPAC melalui kontributor GPPAC NEA memfasilitasi adanya dialog yang diselenggarakan di Ulaanabataar Mongolia. Dialog merupakan salah satu komponen terpenting dalam proses membangun perdamaian. Tujuan dialog ialah mengembangkan pendekatan kebersamaan dalam rangka resolusi konflik dan upaya memperbaiki hubungan antara individu atau kelompok yang ada. Selain itu langkah membangun kepercayaan juga merupakan komponen terpenting dalam dialog. Upaya membangun kepercayaan tidak lain untuk mengurangi ketegangan, serta menciptakan rasa saling pengertian (*undestanding*) dan mengidentifikasi kemungkinan dilakukannya kerjasama lintas konflik. Melalui proses dialog, diharapkan dapat terbangun rasa saling pengertian antara pihak yang berkonflik dalam hal ini antara Korea Utara dan Korea Selatan, agar memungkinkan terjadinya perdamaian diantara keduanya.

Berdasarkan teori resolusi konflik, variabel fasilitasi menjadi sebuah kerangka penting bagi inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea oleh masyarakat sipil yang dalam hal ini ialah GPPAC. Dalam prakteknya, jaringan organisasi masyarakat sipil dunia tersebut berupaya untuk membangun dialog dengan memfasilitasi masyarakat sipil dari negara yang berkonflik dan juga masyarakat sipil lainnya untuk bersama-sama melakukan dialog perdamaian guna membangun hubungan hingga muncul rasa saling percaya satu sama lainnya. *Trust building* merupakan elemen terpenting dalam resolusi konflik. Hal tersebutlah yang berusaha dibangun melalui masyarakat sipil dalam rana *track II*.

2.1.3. Konsep Diplomasi Preventif

Konsep diplomasi preventif pertama kali dikemukakan oleh sekretaris jenderal perserikatan bangsa-bangsa Dag Hammarskjold hampir setengah abad lalu dalam buku laporan tahunan tahun 1959 yang menyatakan bahwa diplomasi preventif aktif dapat dilakukan oleh setiap kelompok baik melalui PBB maupun perwakilan dari organisasi lainnya yang memiliki posisi netral untuk melakukan intervensi dalam sebuah konflik atau permasalahan (Ramcharan, 2008: 28-32). Sekretaris jenderal Boutros Boutros-Ghali dalam laporannya yang berjudul *An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping* menyebutkan bahwa diplomasi preventif merupakan “.....an action to prevent disputes from arising between parties, to prevent existing disputes from escalating into conflicts and to limit the spread of the latter when they occur” (Ramcharan, 2008: 45).

Sehingga, bisa dikatakan bahwa untuk menjaga perdamaian dunia diperlukan adanya diplomasi preventif sebagai upaya untuk mencegah perselisihan antara dua kelompok menjadi semakin meningkat dan membatasi efek dari perselisihan tersebut agar tidak meluas. Selain itu, adapun sasaran dari diplomasi preventif ialah untuk mengidentifikasi situasi yang dapat memunculkan konflik dan dengan melalui diplomasi

bahaya dari situasi tersebut dapat dihindari sebelum memunculkan terjadinya kekerasan.

Diplomasi preventif memiliki dua dimensi tujuan yakni bertujuan untuk mengurangi ketegangan sebelum menimbulkan konflik yang lebih besar dan untuk mengambil tindakan secara cepat dalam mengendalikan agar dampak konflik tidak menyebar apabila konflik terjadi. Diplomasi preventif dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya ialah fasilitasi, mediasi, rekonsiliasi, adjudikasi, dan arbitrase (Muggah & White, 2013: 5). Terdapat beberapa instrumen yang ada di dalam melakukan diplomasi preventif, yakni (Ghali, 1992: 46-51):

1. *Build Confidence*

Membangun rasa saling percaya dan kejujuran merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam mengurangi kemungkinan konflik antar negara. Konflik pada dasarnya terjadi karena adanya rasa curiga yang besar diantara dua pihak. Oleh karena itu, perlu membangun kepercayaan diantara pihak yang berkonflik dan juga pada pihak ketiga yang akan menengahi konflik.

2. *Fact-finding*

Langkah pencegahan harus didasarkan pada ketepatan waktu dan keakuratan fakta. Perlu adanya pemahaman akan perkembangan dan tren global. Pencarian fakta konflik selain sebagai dasar keputusan pencegahan terjadinya konflik, namun juga dasar bagi penyelesaian konflik.

3. *Early Warning*

Tatanan regional dan organisasi memiliki peran penting dalam peringatan dini. Penguatan tatanan dalam hal seperti metode informasi dari sumber yang ada dapat dikumpul dan disatukan dengan indikator-indikator yang ada untuk menilai adanya ancaman atau perdamaian sehingga memungkinkan untuk menentukan tindakan apa yang seharusnya diambil.

Secara umum, diplomasi merupakan cara bernegosiasi dan berdialog dengan pihak lainnya guna mewujudkan kepentingan yang dimiliki. Upaya diplomasi dapat dilakukan melalui berbagai macam cara dengan melibatkan aktor dari berbagai macam unsur. Salah satu unsur yang sering terlibat dalam upaya diplomasi ialah organisasi masyarakat sipil atau CSO. Keterlibatan CSO dalam diplomasi disebut dengan *track II diplomacy*. Dalam paradigma *conflict preventive*, *Track II* merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan apabila diplomasi melalui *track I* dirasa tidak cukup efektif untuk meredam ketegangan dari kedua pihak yang berkonflik.

Seperti halnya dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea, dimana dalam level *track I* yang melibatkan negara sebagai instrumen penyelesaian konflik tidak menunjukkan hasil yang positif. Hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional negara-negara tersebut. Ketegangan di semenanjung Korea tidak dapat dihindari dan setiap hari semakin intensif, oleh karenanya sebagai upaya alternatif penyelesaian konflik maka perlu ada keterlibatan pihak yang lebih netral dan tidak memiliki kepentingan lain selain untuk perdamaian.

Merujuk pada konsep diplomasi preventif maka bisa dijelaskan bahwa GPPAC dalam hal ini merupakan salah satu aktor non-pemerintah yang terlibat dalam proses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea. Kehadiran GPPAC merupakan bentuk dari *track II* diplomasi dan bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik dengan eskalasi yang lebih besar yang dapat mengancam keamanan di kawasan dan global. Dalam upaya diplomasi yang dilakukan, GPPAC mengedepankan upaya dialog untuk membangun *confidence* dan *trust* pihak yang berkonflik melalui tatanan *grassroot* atau masyarakat.

Dialog yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil setidaknya memberikan penawaran akan pengalaman yang berbeda mengenai pemecahan masalah, mediasi atau negosiasi yang mendorong terbentuknya hubungan antara kelompok masyarakat sipil untuk saling

memberikan keterbukaan untuk berbagai dan mengumpulkan informasi sebagai salah satu upaya menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea melalui *track II diplomacy*.

2.1.4. Konsep Civic Engagement

Pada dasarnya, konsep keterlibatan warga negara (masyarakat) meliputi cakupan yang sangat luas karena seringkali didefinisikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pihak yang menggunakan konsep tersebut. Merujuk pada pendapat dari Carpini & Keeter (1996) dalam Pancer (2015: 3), *civic engagement* ialah "*individual and collective actions designed to identify and address issues of public concern*". Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *civic engagement* merujuk pada aksi kolektif atau individual yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta menyampaikan isu yang menjadi perhatian publik. Merujuk pada pendapat tersebut, hal yang menjadi perhatian publik berkenaan dengan semenanjung Korea tidak lain ialah terkait proses perdamaian yang berusaha untuk dibangun melalui *track II*.

Berdasarkan pada *the american planning association* (2013), *civil engagement* didefinisikan sebagai "*the process of working collaboratively with individuals and groups to achieve specific goals*". Dengan demikian, yang menjadi poin penting dari *civic engagement* ialah mencapai tujuan bersama. Varshney (2002) dalam Mujahidah (2015: 142-146) mengartikan *civic engagement* sebagai sebuah keterlibatan publik yang ditunjukkan melalui kerja sama. Adapun sifat dari *civic engagement* ialah non-negara dan dapat melakukan kegiatan baik yang sifatnya sosial dan juga politik.

Sehingga dapat dikatakan bahwa GPPAC (*Global Networking for the Prevention of Armed Conflict*) merupakan salah satu bentuk dari *civic engagement* yang terlibat dalam sebuah proses kolaborasi guna mencapai *specific goals* yakni perdamaian untuk mencegah eskalasi konflik di Semenanjung Korea. Merujuk pada Putnam (1992: 167), salah satu hal yang diperhatikan sebagai wujud pembentukan *network* atau

jaringan dalam *civic engagement* ialah membangun norma-norma dan kepercayaan yang dapat memfasilitasi terbentuknya koordinasi guna mencapai tujuan bersama yang di cita-citakan yang dalam hal ini ialah perdamaian.

Konsep *civic engagement* tersebut tentu sesuai dengan keterlibatan dari GPPAC dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea. Secara umum GPPAC dalam menjalankan keterlibatannya dalam upaya mendorong perdamaian didasarkan kepada empat strategi dasar yang diantaranya ialah *Network Strengthening and Regional Action*, *Action Learning*, *Public Outreach*, dan *Policy and Advocacy* (Enkhsaikhan, 2016: 4-6).

Adapun strategi tersebut dilakukan dengan beberapa langkah prioritas sebagai langkah mencegah konflik dengan kekerasan diantaranya ialah dialog, mediasi, pendidikan perdamaian, dan *human security*. Hal tersebut dilakukan dengan paradigma bahwa masyarakat sipil memiliki fleksibilitas dan pengalaman yang dapat menjadi peluang atau *opportunity* guna membangun dan terlibat dalam proses dialog yang dilakukan. Dalam menjalankan strateginya, GPPAC bekerjasama dan berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat yang disebut dengan jaringan. Jaringan tersebut dibentuk guna mencapai sinergitas dalam mencegah konflik dan membangun perdamaian dengan menghubungkan dan bekerja di berbagai level baik negara, regional, dan global yang didalamnya terdiri dari berbagai organisasi antar pemerintah, aktor negara, media, dan akademisi.

Merujuk pada konsep *civic engagement*, dapat dikatakan bahwa GPPAC merupakan sebuah bentuk jaringan masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai macam level masyarakat dan bekerja guna mencapai tujuan bersama yakni mencegah terjadinya konflik bersenjata dan menciptakan perdamaian. Hal tersebut dilakukan dengan aksi kolektif dengan melakukan dialog, dan juga pendidikan perdamaian.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama ialah **jurnal** yang ditulis oleh Bo-Hyuk Suh, dalam *The Journal of International Studies*, Vol. 14, No. 1 (April 2016), 53-75 yang berjudul *Resolving the Korean Conflict through a Combination of Human Rights and Human Security*. Dalam tulisannya, Hyuk Suh menjelaskan mengenai alternatif lain dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dengan menggunakan perpektif *macro-critical* yang menggabungkan sinergitas antara aspek *human right* dan *security* di Semenanjung Korea.

Menurut Hyuk, konflik yang terjadi di Semenanjung Korea sedikit banyak mengakibatkan perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat, khususnya di Korea Utara. Hal inilah yang kemudian oleh Korea Selatan sebagai salah satu cara untuk membangun hubungan kembali dengan Korea Utara ialah melalui aspek *human right*. Membangun kembali hubungan antara kedua Korea melalui pendekatan kemanusiaan tersebut salah satunya dilakukan oleh pemerintahan Kim Dae-Jung dan Roh Moo-Hyun. Keduanya berupaya untuk mendorong Korea Utara dalam kebijakannya untuk meningkatkan hubungan dan membangun rezim yang damai di Semenanjung Korea.

Pemerintah Korea Selatan sadar bahwa isu HAM di Korea Utara telah menjadi kekhawatiran dan perhatian dunia Internasional. Selain itu, Korea Selatan sebagai salah satu anggota dari komunitas internasional, tentu memiliki kewajiban untuk aktif mempromosikan HAM di Korea Utara melalui perekatan kembali hubungan dengan cara rekonsiliasi dan kerjasama yang nantinya hal tersebut dapat diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Korea Utara. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga membuat kebijakan untuk melindungi para penduduk Korea Utara yang sengaja melarikan diri ke Korea Selatan melalui "*quite diplomacy*" guna melindungi keselamatan jiwa mereka. Selain itu, dalam tulisannya Hyuk juga menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mendekatkan

kembali hubungan kedua negara melalui pendekatan kemanusiaan ialah dengan rutin menggelar reuni keluarga yang terpisah. Untuk memecahkan masalah di Semenanjung Korea, penting untuk membuat sebuah upaya yang dapat meningkatkan hubungan kedua negara kearah yang positif melalui pendekatan kemanusiaan.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa **persamaan** antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada instrumen dalam rangka menciptakan perdamaian di semenanjung Korea yakni dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya kemanusiaan (*soft power approach*). Kedua penelitian sama-sama menjelaskan mengenai upaya membangun kembali hubungan antara kedua negara dengan cara yang sifatnya diplomatis. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara penelitian terdahulu dengan penelitian dalam tesis ini.

Adapun **perbedaan** antara penelitian terdahulu pertama dengan penelitian ini ialah terletak pada aktor perdamaianya. Jika dalam penelitian Hyuk menitik beratkan pada aktor pemerintah atau *track I* yang dalam hal ini ialah pemerintah Korea Selatan, dalam penelitian yang baru justru lebih menitik beratkan pada keterlibatan CSO (*Civil Society Organization*) atau *track II* yang dalam hal ini ialah GPPAC (*Global Network for the Prevention of Armed Conflict*) sebagai inisiator perdamaian konflik di Semenanjung Korea. Sehingga, penelitian terdahulu sifatnya ialah *Top-Down approach* maka penelitian dalam tesis ini ialah *Bottom-Up* dengan menekankan pada pembangunan kembali rasa kepercayaan dari pihak yang berkonflik dengan melibatkan peran masyarakat sipil atau melalui level *grassroot*.

Penelitian terdahulu yang **kedua** ialah **buku** yang ditulis oleh Leszek Buszynski dengan judul *Negotiating with North Korea: The Six Party Talks and the Nuclear Issue* dan diterbitkan oleh Routledge: New York pada tahun 2013 yang lalu. Dalam tulisannya, Leszek Buszynski menjelaskan bahwa negosiasi merupakan hal yang penting dalam

menciptakan kondisi damai dan stabil. Selama ini, masalah yang menjadikan semenanjung korea sebagai salah satu wilayah berbahaya ialah adanya pengembangan nuklir dan misil oleh Korea Utara. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menghentikan program nuklir Korea Utara dibentuklah sebuah forum pembicaraan atau dialog yang melibatkan enam negara yakni Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara yang kemudian lebih dikenal sebagai *six party talks*.

Meski demikian, *six party talks* difungsikan tidak hanya berfokus pada isu nuklir dan missil, namun juga mengenai topik keamanan yang lebih luas, pencegahan konflik dan ekonomi, serta menjadi *emergency support* bagi Korea Utara apabila terjadi kegagalan rezim. Selain itu, *six party talk* juga diharapkan mampu bertransformasi dari hanya berupa proses konsultatif menjadi alat pencegahan konflik dan kekacauan di Semenanjung Korea. Walaupun demikian, dalam mewujudkan situasi tersebut *six party talk* tentu tidak dapat bekerja sendiri. Perlu adanya hubungan multilateralisme yang melibatkan ASEAN, EU, Australia, IAEA, dan UN guna mewujudkan stabilitas di Semenanjung Korea.

Persamaan antara tulisan dari Leszek Buszynski ialah sama-sama membahas mengenai upaya bagaimana menciptakan kondisi aman dan perdamaian di Semenanjung korea melalui dialog dan negosiasi dimana dalam penelitian yang akan dilakukan juga berfokus pada usaha perdamaian di Semenanjung Korea dengan upaya dialog. Meskipun demikian, **perbedaan** antara kedua tulisan ialah terletak pada aktor yang terlibat dan mekanisme penyelesaian konflik. Dalam penelitian terdahulu, aktor yang terlibat berada pada level negara atau *track 1* dengan melibatkan beberapa negara diantaranya ialah China, Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Korea Selatan, dan Utara. Pendekatan yang dilakukan juga hanya menyentuh ranah negara saja tanpa melibatkan peran masyarakat sipil dalam upaya menyelesaikan konflik. Berbeda dengan penelitian yang baru bahwa mekanisme upaya perdamaian justru dimulai dalam tataran masyarakat sipil dalam hal ini organisasi non-internasional

dengan melibatkan peran dari akademisi dan masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam satu jaringan global yang bernama GPPAC.

Penelitian dahulu yang **ketiga** ialah **jurnal** dari Philo Kim, dalam *International Journal of Korean Unification Studies* Vol. 24, No. 1, 2015, 1-33 yang berjudul *Social Conflict and Identity Crisis in Unified Korea*. Menjelaskan mengenai bagaimana unifikasi Korea Utara dan Selatan merupakan sebuah peristiwa yang bersejarah dan penting yang bisa menumbuhkan perdamaian atau justru memunculkan konflik lebih besar. Semua itu tergantung dari persiapan dan rencana yang matang oleh pihak-pihak terkait.

Unifikasi merupakan isu dan peristiwa penting pada abad ke-21 di Semenanjung Korea yang untuk mencapainya membutuhkan transformasi dalam hal identitas nasional dan berbagai bidang sosial lainnya seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dll. Migrasi yang dilakukan oleh masyarakat Korea Utara bisa menjadi pemicu terjadinya kekacauan sosial serta adanya perbedaan yang semakin besar antara penduduk Korea Utara dan Selatan. Hal tersebut tentu akan memperkuat terjadinya konflik kelas apabila ide unifikasi tercapai. Disamping itu semua, perbedaan ideologi antara kedua negara menjadi hambatan yang paling besar bagi terciptanya unifikasi.

Besarnya rasa kebencian dan rasa saling curiga yang telah terbangun juga menjadi beban bagi proses terwujudnya integrasi sosial dalam unifikasi Korea. Oleh karena itu, terdapat empat hal yang bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut, yang antara lain ialah:

- a. Kekacauan sosial dan konflik sebaiknya diminimalisir melalui perbaikan ekonomi dan tindakan institusional
- b. Koherensi sosial dan pembentukan identitas baru hendaknya dikuatkan dengan visi, nilai dan prinsip yang baru
- c. Program-program yang bermanfaat bagi kedua Korea harus dilaksanakan dalam mendukung unifikasi

- d. Manajemen internet dan informasi siber diperlukan untuk memperkecil adanya konflik sosial dan terjadinya krisis identitas setelah tercapainya unifikasi di Semenanjung Korea

Agar seluruh hal tersebut dapat terlaksana, yang terpenting ialah perlu adanya komitmen kedua negara untuk mengakhiri perselisihan dan mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea. Pemahaman yang sama dan komunikasi intensif perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Persamaan antara tulisan yang menjadi latar belakang dengan penelitian yang akan dilakukan ialah pemahaman terkait mewujudkan pemahaman bersama dan perdamaian di semenanjung Korea ialah dengan komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan dengan hanya menggunakan cara-cara yang sifatnya *soft power* yakni dengan mediasi, negosiasi, dan juga dialog. Oleh karenanya, mekanisme yang digunakan oleh tulisan tersebut dengan penelitian ini menjadi satu titik kesamaan.

Namun, berbeda dengan penelitian sebelumnya tersebut dengan tulisan ini, **perbedaanya** ialah jika tulisan tersebut justru melibat mengenai kondisi yang akan terjadi jika terjadi unifikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan (penyatuan kembali kedua negara) maka dalam penelitian ini akan lebih menyorot terkait bagaimana perdamaian itu dapat dicapai melalui level masyarakat sipil. Meskipun kedua penelitian memiliki perbedaan yang sangat jauh, namun penulis tetap memasukkannya kedalam penelitian terdahulu karena dalam tulisan dari Philo Kim tersebut dapat menjadi refrensi yang sangat membantu untuk menjawab mengenai konteks konflik dan kondisi yang mungkin terjadi apabila perdamaian telah dicapai dan unifikasi dilakukan.

Penelitian yang **keempat** ialah **Jurnal** yang ditulis oleh Hem Raj Subedi dan Meena Bhatta yang berjudul *Role of Civil Society in Conflict Resolution and Peacebuilding in Nepal*. Melalui jurnal tersebut, Hem Raj Subedi dan Meena Bhatta ingin menjelaskan mengenai peran dari masyarakat sipil dalam resolusi konflik dan *peace building* di Nepal pasca konflik *Maoist* yang terjadi antara tahun 1996 hingga 2006 yang lalu

setelah penandatanganan perjanjian damai atau *Comprehensive Peace Agreement* (CPA). Meskipun setelah adanya CPA, situasi di Nepal masih sangat rawan.

Peran masyarakat sipil di Nepal telah berlangsung sejak awal ditandatanganinya perjanjian damai, namun kehadiran dari masyarakat sipil tersebut justru tidak mampu untuk aktif dalam proses *peacebuilding*. Hal ini tidak lain karena setiap organisasi masyarakat sipil yang terlibat justru memiliki kepentingan masing-masing dan banyak diantara mereka yang memiliki nilai yang berbeda dengan masyarakat Nepal kebanyakan. Sehingga banyak diantara masyarakat sipil tersebut yang tidak mampu untuk memfasilitasi proses perdamaian jika terjadi kembali konflik.

Namun, kehadiran sebagian masyarakat sipil lainnya di Nepal juga cukup membantu proses *peacebuilding* dalam membantuk masyarakat yang menjadi korban dapat mendapatkan kembali keadilan secara hukum. Oleh karenanya, dalam tulisan yang ditulis oleh Hem Raj Subedi dan Meena Bhatta, lebih banyak menjelaskan mengenai bagaimana masyarakat sipil dalam konteks *peacebuilding* yang ideal dan apa yang seharusnya dilakukan oleh para masyarakat sipil yang terlibat tersebut.

Persamaan dari penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama menjelaskan mengenai bagaimana keterlibatan daripada masyarakat sipil dalam proses menciptakan perdamaian. Selain itu, penulis tesis memasukkan jurnal dari Hem Raj Subedi dan Meena Bhatta kedalam salah satu penelitian terdahulu ialah karena kedua penelitan sama-sama menggunakan konsep masyarakat sipil dalam konflik. Meskipun demikian, **perbedaan** yang dimiliki oleh kedua penelitian ialah terdapat pada fokus dan lokus masalah. Yang mana, dalam penelitian terdahulu lokus masalah ialah konflik di Nepal dan fokus penelitannya ialah efektifitas masyarakat sipil dalam *peacebuilding*. Berbeda dengan penelitian baru yang mana lokus penelitiannya ialah terkait konflik di Semenanjung Korea dan fokus masalahnya lebih kepada proses perdamaian di Semenanjung Korea.

Penelitian terdahulu **kelima** ialah **Jurnal** yang berjudul *Civil Society and Peace Negotiations: Confronting Exclusion* dalam jurnal *international negotiation* Vol. 13, 11-36, 2008 yang ditulis oleh Anthony Wanis-St. John dan Darren Kew. Di dalam jurnal tersebut, penulis menjelaskan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses negosiasi. Di dalam tulisannya, dijelaskan mengenai peran aktif masyarakat sipil baik secara langsung dalam proses negosiasi maupun tidak langsung namun tetap memberikan signifikansi negosiator (khususnya dalam level negara atau *track I*).

Argumen dasar dari penulis ialah kelompok masyarakat sipil memainkan peran yang cukup signifikan dalam proses perdamaian pasca konflik telah menjadi sebuah dogma mainstream dalam konsep resolusi konflik internasional. Memang, tidak sedikit masyarakat sipil yang pada akhirnya tidak mampu untuk terlibat langsung dan bisa duduk dalam meja perundingan karena adanya peran yang jauh lebih tinggi yakni negara. Namun, merujuk pada kenyataan yang ada justru masyarakat memainkan peran yang sentral dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Oleh karenanya, dalam tulisan ini penulis ingin menjelaskan mengenai korelasi antara keterlibatan langsung masyarakat sipil dalam proses negosiasi dan pencapaian perjanjian damai yang berkelanjutan.

Kelompok masyarakat sipil menurut penulis merupakan aktor yang aktif sebagai insiator dalam level *track II* yang juga berperan sebagai pelengkap atau *supplement* dari negosiasi yang dijalankan oleh *track I* yang melibatkan elit politik. Namun, jika dalam sebuah upaya perdamaian *track I* tidak berfungsi dengan baik atau *absence* maka kelompok masyarakat sipil dapat dilihat sebagai aktor yang potensial dalam menjaga keberlangsungan komunikasi pihak yang bertikai ketika *primary channel* (saluran pertama) telah tertutup.

Untuk memperjelas keterlibatan masyarakat sipil dalam negosiasi, penulis mengajukan beberapa usul yang diantaranya ialah membagi tingkat keterlibatan masyarakat sipil ke dalam tiga level, yakni:

- a. Tinggi, yaitu masyarakat sipil yang berkoalisi memiliki kursi dalam proses negosiasi perdamaian tersebut. Adapun kursi tersebut bisa diberi atau justru yang menginisiasi.
- b. Sedang, yaitu masyarakat sipil yang tidak memiliki kursi dalam proses negosiasi, namun memberikan pengaruh signifikan kepada pihak lain yang terlibat
- c. Rendah, yaitu masyarakat sipil yang tidak memiliki kursi dan memiliki akses serta pengaruh yang kecil atas pihak yang terlibat negosiasi

Lebih jauh, Anthony Wanis-St. John dan Darren Kew dalam tulisannya juga menjelaskan mengenai hasil dari keterlibatan masyarakat dalam proses perdamaian, antara lain ialah:

- a. *Sustained Peace*
- b. *Cold Peace*
- c. *Resumed War*

Secara umum, keterlibatan masyarakat sipil dalam proses negosiasi memberikan dampak yang jauh lebih signifikan khususnya jika *track I* melibatkan aktor yang tidak demokratis dan banyak membawa kepentingan. Masyarakat sipil baik yang non-pemerintah atau organisasi kemanusiaan lainnya mampu menyediakan keahlian spesifik yang penting dalam mencapai perjanjian dalam proses *peacebuilding*. Mengingat, kemampuan advokasi dan negosiasi, serta struktur organisasi yang demokratis oleh masyarakat sipil dapat mendorong dan mendukung proses perdamaian baik dalam rana lokal maupun internasional.

Merujuk pada penelitian terdahulu dari Anthony Wanis-St. John dan Darren Kew, **persamaan** penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ialah keduanya membahas mengenai keterlibatan masyarakat sipil dalam proses mencapai dan menciptakan perdamaian. Secara umum, penelitian terdahulu memberikan gambaran dan juga konsep mengenai keterlibatan masyarakat sipil yang tentunya konsep tersebut akan digunakan sebagai rujukan dalam penelitian baru yang akan dilakukan mengingat fokus penelitian sama-sama membahas mengenai

proses perdamaian oleh masyarakat sipil. Meskipun demikian, baik penelitian terdahulu maupun penelitian yang baru keduanya memiliki perbedaan. Adapun **perbedaan** antara kedua penelitian tersebut terdapat pada objek penelitian. Jika objek penelitian terdahulu hanya menjelaskan mengenai masyarakat sipil, maka penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan contoh masyarakat sipil GPPAC dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea.

Berikut merupakan tabel penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul, Tahun	Pendekatan/ Teori Konsep Metodolgi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Bo-Hyuk Suh, The Korean Journal of International Studies, Vol. 14, No. 1 (April 2016), 53-75. (<i>Resolving the Korean Conflict through a Combination of Human Rights and Human Security</i>)	Perspektif <i>macro-critical</i> , konsep damai, konsep keamanan, konsep <i>human right</i> . (Kualitatif, Eksplanatif)	Konflik korea menjadi salah satu konflik yang sulit untuk diselesaikan, karena konflik korea merupakan sebuah cerminan dimana kekuatan politik kedua negara akan selalu berusaha mempertahankan kepentingan negara masing-masing. Masih adanya ketidakpercayaan dan <i>animosity</i> menjadikan semenanjung Korea masih sangat rentan akan ketegangan. Sehingga, perlu adanya upaya untuk membentuk sinergitas yang lebih positif terhadap pembangunan perdamaian positif melalui pendekatan nilai atau paradigma <i>human right</i> . Menurut penulis, titik utama	Kedua penelitian memiliki persamaan penggunaan pendekatan yang sifatnya kemanusiaan (<i>soft power approach</i>). Keduanya sama-sama menjelaskan upaya membangun kembali hubungan antara kedua negara dengan cara yang sifatnya diplomatis.	Jika dalam penelitian Hyuk menitik beratkan pada aktor pemerintah atau <i>track I</i> yang dalam hal ini ialah pemerintah Korea Selatan, dalam penelitian yang baru lebih menitik beratkan pada keterlibatan aktor masyarakat sipil atau <i>track II</i> yang dalam hal ini ialah GPPAC (<i>Global Network for the Prevention of Armed Conflict</i>) sebagai inisiator perdamaian konflik di Semenanjung Korea. Sehingga, penelitian terdahulu sifatnya ialah <i>Top-Down approach</i> maka penelitian dalam tesis ini ialah <i>Bottom-Up</i>

			untuk mewujudkan sinergitas positif antara kedua negara ialah melalui komunikasi, bantuan, dan pertukaran.		dengan menekankan pada pembangunan kembali rasa kepercayaan.
2	Leszek Buszynski Book Published by Routledge: New York, 2013 (<i>Negotiating with North Korea: The Six Party Talks and the Nuclear Issue</i>)	<i>Bargaining and Negotiation Theory</i> (Kualitatif, Eksplanatif)	Negosiasi merupakan hal yang penting dalam menciptakan kondisi damai dan stabil. Adapun yang menjadi masalah ialah terkait Nuklir Korea Utara, sehingga untuk menghentikan program nuklir Korea Utara dibentuklah sebuah forum pembicaraan yang melibatkan enam negara yakni Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara yang kemudian lebih dikenal sebagai <i>six party talks</i> . Selain itu, <i>six party talk</i> juga diharapkan bertransformasi dari hanya proses konsultatif menjadi alat pencegahan konflik dan kekacauan di Semenanjung	Sama-sama membahas mengenai upaya bagaimana menciptakan kondisi aman dan perdamaian di Semenanjung korea melalui dialog dan negosiasi dimana dalam penelitian yang akan dilakukan juga berfokus pada usaha perdamaian di Semenanjung Korea dengan upaya dialog	Dalam penelitian terdahulu, aktor yang terlibat berada pada level negara atau <i>track I</i> dan hanya menyentuh ranah negara saja tanpa melibatkan peran masyarakat sipil dalam upaya menyelesaikan konflik. Sedangkan, dalam penelitian yang baru mekanisme upaya perdamaian justru dimulai dalam tataran masyarakat sipil dalam hal ini organisasi non-internasional dengan melibatkan peran dari akademisi.

			Korea.		
3	Philo Kim, International Journal of Korean Unification Studies Vol. 24, No. 1, 2015, 1-33 (<i>Social Conflict and Identity Crisis in Unified Korea</i>)	Concept of social integration, Concept of unification, Theory of social identity, Theory of social conflict (Kualitatif, Eksplanatif)	Unifikasi Korea Utara dan Selatan merupakan peristiwa penting di Semenanjung Korea yang untuk mencapainya membutuhkan transformasi identitas nasional dan berbagai bidang sosial lainnya seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dll. Kehadiran masyarakat yang berasal dari Utara bisa saja menjadi pemicu kekacauan sosial apabila kedua negara sepakat untuk bergabung kembali. Besarnya rasa kebencian dan rasa saling curiga menjadi beban proses unifikasi Korea. Oleh karenanya, perlu menciptakan komunikasi yang efektif guna menemukan pemahaman yang sama antara kedua negara baik dalam level pemerintah ataupun	Persamaan terletak pada pemahaman bahwa untuk mewujudkan perdamaian Semenanjung Korea maka perlu komunikasi dengan menggunakan cara-cara seperti mediasi, negosiasi, dan juga dialog.	Penelitian terdahulu justru melihat mengenai kondisi yang akan terjadi jika terjadi unifikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sedangkan dalam penelitian ini akan lebih menyorot terkait bagaimana perdamaian itu dapat dicapai melalui level masyarakat sipil.

			masyarakat.		
4	Hem Raj Subedi, Meena Bhatta. (<i>Role of Civil Society in Conflict Resolution and Peacebuilding in Nepal</i>)	Konsep <i>civil society</i> , Teori Resolusi Konflik, Konsep <i>Peacebuilding</i> (Kulitatif - Eksplanatif)	Untuk meningkatkan efektifitas <i>peacebuilding</i> , organisasi masyarakat sipil yang terlibat perlu berkomunikasi diantara mereka dan menjalin kerjasama dengan pihak parlemen, pemerintah, atau administrasi negara lainnya.	Keduanya menjelaskan mengenai bagaimana keterlibatan masyarakat sipil dalam proses menciptakan perdamaian. Sehingga, konsep yang digunakan oleh kedua penelitian pun sama yakni konsep masyarakat sipil	Perbedaan terdapat pada fokus dan lokus penelitian. Dalam penelitian terdahulu lokus masalah ialah konflik di Nepal dan fokus penelitiannya ialah efektifitas masyarakat sipil dalam <i>peacebuilding</i> . Lokus penelitian baru ialah Semenanjung Korea dan fokus masalahnya lebih kepada proses perdamaian yang melibatkan masyarakat sipil
5	Anthony Wanis-St. John dan Darren Kew. (<i>Civil Society and Peace Negotiations: Confronting Exclusion,</i>	Konsep <i>Civil Society</i> , Konsep Negosiasi (Kualitatif-Diskriptif)	Kelompok masyarakat sipil ialah aktor yang aktif sebagai insiator dalam level <i>track II</i> dan berperan sebagai pelengkap atau <i>supplement track I</i> . Namun, jika <i>track I</i> tidak berfungsi dengan baik maka	keduanya membahas mengenai keterlibatan masyarakat sipil dalam proses mencapai dan menciptakan perdamaian. Secara umum, penelitian terdahulu	Jika objek penelitian terdahulu hanya menjelaskan mengenai masyarakat sipil, maka penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan contoh masyarakat sipil GPPAC

	<p><i>International negotiation</i> Vol. 13, 11-36, 2008)</p>		<p>kelompok masyarakat sipil menjadi aktor yang potensial menjaga keberlangsungan komunikasi pihak yang. Keterlibatan masyarakat sipil dalam negosiasi, dapat dibagi menjadi tiga level, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tinggi b. Sedang c. Rendah 	<p>memberikan gambaran dan juga konsep mengenai keterlibatan masyarakat sipil yang tentunya konsep tersebut akan digunakan sebagai rujukan dalam penelitian baru yang akan dilakukan mengingat fokus penelitian sama-sama membahas mengenai proses perdamaian oleh masyarakat sipil. Meskipun demikian, baik penelitian terdahulu maupun penelitian yang baru keduanya memiliki perbedaan yang cukup besar</p>	<p>dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea.</p>
--	--	--	---	--	--

2.3. Kerangka Pemikiran

Semenanjung Korea merupakan salah satu wilayah yang rentan akan terjadinya konflik bersenjata. Konflik antara Korea Selatan dan Utara yang masih berlangsung hingga saat ini menjadi salah satu sumber ancaman bagi stabilitas keamanan regional dan global. Ketegangan antara kedua Korea serta proliferasi Nuklir dan peningkatan kekuatan persenjataan oleh Korea Utara yang semakin meningkat menyebabkan kondisi keamanan di semenanjung Korea semakin tidak menentu. Salah satu upaya yang diperlukan untuk mencegah agar ketegangan tersebut tidak menjadi konflik yang lebih besar dan berdampak pada kondisi keamanan global ialah perdamaian.

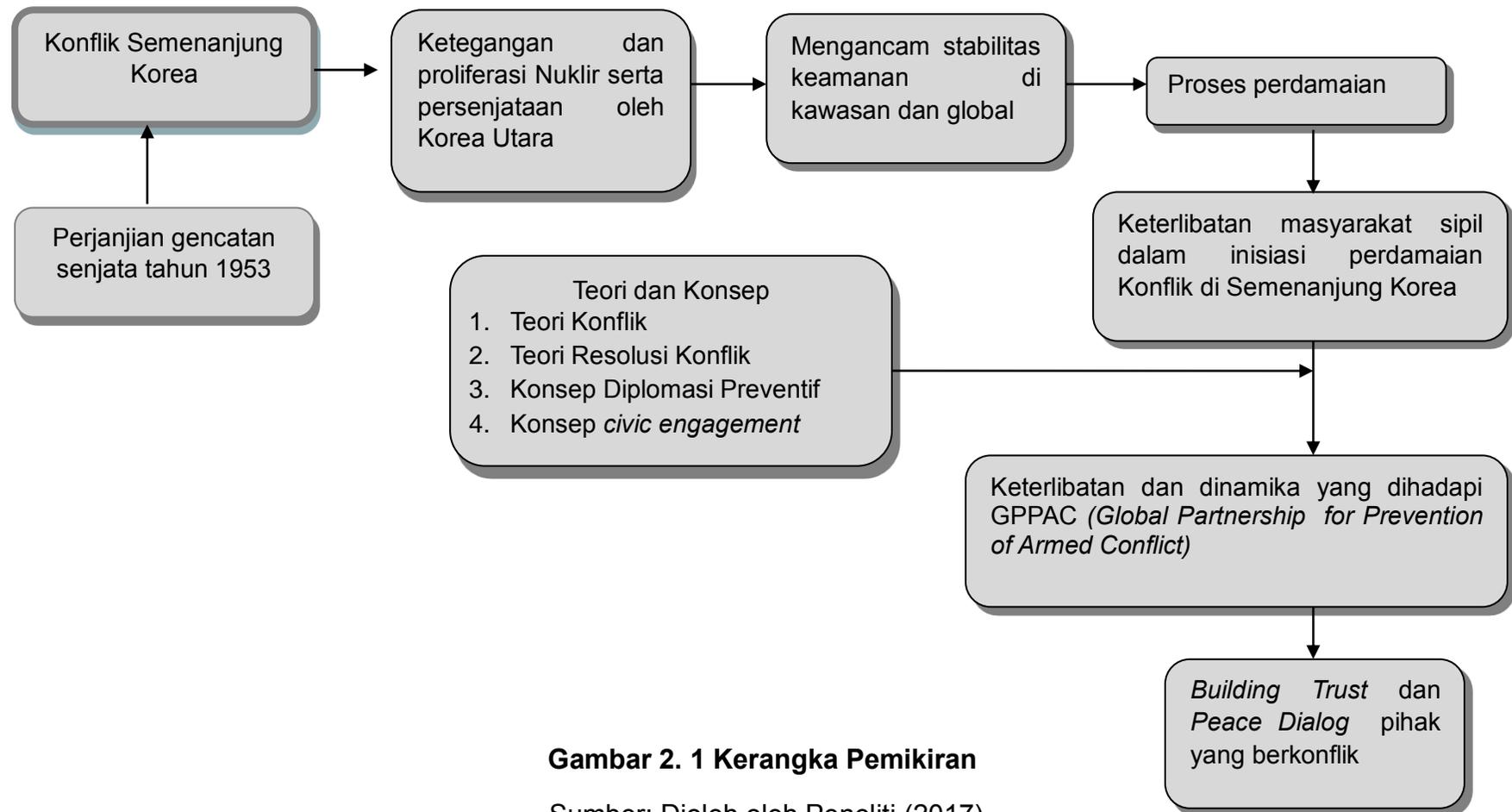
Upaya perdamaian antara kedua Korea telah dilakukan sejak lama yang diantaranya ialah melalui *six party talk forum* yang melibatkan beberapa negara yakni Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang dan Kedua Korea. Meskipun demikian, upaya dalam level negara masih belum efektif menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea. Sehingga, perlu adanya alternatif lain dalam upaya perdamaian di Semenanjung Korea. Salah satunya ialah dengan melibatkan masyarakat sipil dalam proses perdamaian tersebut.

Masyarakat sipil memiliki peran yang cukup penting dalam upaya menciptakan perdamaian melalui pendekatan ditingkat *grassroot* atau masyarakat. Oleh karenanya, mekanisme yang digunakan pun lebih kepada membangun perdamaian melalui fasilitasi berupa dialog dan juga pertemuan lainnya. Salah satu organisasi masyarakat sipil yang saat ini turut terlibat aktif dalam proses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea ialah GPPAC (*Global Partnership of the Prevention of Armed Conflict*).

Dengan dinamika hubungan antara Korea Selatan dan Utara yang sangat fluktuatif, upaya yang dilakukan oleh GPPAC untuk menciptakan perdamaian tidak lain ialah mencegah agar ketegangan hubungan tersebut tidak berlanjut dalam ekskalasi yang jauh lebih besar dan dapat berdampak bagi keamanan kawasan dan juga global. Selain itu, ancaman nyata dari kegiatan proliferasi nuklir oleh Korea Utara dan peningkatan

kekuatan militernya menjadi tantangan terbesar dan seruan untuk perdamaian di Semenanjung Korea semakin lebih besar.

Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk menganalisa bagaimana keterlibatan GPPAC dalam inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea dan bagaimana dinamika GPPAC dalam melakukan inisiasi perdamaian tersebut. Sehingga mampu untuk menciptakan rasa saling percaya diantara pihak yang berkonflik demi mewujudkan dialog perdamaian di Semenanjung Korea yang dimulai dari tatangan paling bawah yakni masyarakat. Untuk menganalisa, peneliti menggunakan teori konflik, teori resolusi konflik, dan diplomasi preventif dengan mekanisme *track II* sebagai landasan berpikir. Berikut merupakan bagan kerangka pemikiran dari penelitian ini secara keseluruhan, yakni:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2017)

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif diskriptif analitis, karena berupaya untuk menggambarkan serta menganalisa terkait keterlibatan masyarakat sipil dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea antara Korea Utara dan Selatan. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena penelitian kualitatif dianggap memenuhi kualifikasi yang diperlukan oleh penulis guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah disajikan dalam bab sebelumnya.

Hal ini merujuk pada pendapat dari Sari Wahyuni (2012: 1) yang menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif ialah metode yang dibangun dari ilmu sosial yang memungkinkan bagi seorang peneliti untuk mempelajari sebuah fenomena sosial dan budaya. Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif tidak berupa angka dan menggunakan pendekatan induktif. Menurut Holloway (1997: 2) dalam Sari Wahyuni (2012: 2) menyebutkan jika penelitian kualitatif ialah:

“Form of social inquiry that focuses on the way people interpret and make sense of their experiences and the world in which they live [...] Researchers use qualitative approaches to explore the behavior, perspectives, and experiences of the people they study. The basis of qualitative research lies in the interpretive approach to social reality ”.

Berdasarkan pada pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk menelusuri perilaku, perspektif, dan pengalaman pihak yang menjadi subyek penelitian. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan dalam tesis ini yakni bertujuan untuk meneliti keterlibatan dari civilian yakni GPPAC dalam proses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea. Penulis berusaha untuk mencari perspektif dan juga pengalaman dari subyek penelitian yang baik terlibat langsung maupun sebagai pengamat dalam proses perdamaian di semenanjung Korea.

Untuk itu, yang menjadi objek dari penelitian ialah keterlibatan GPPAC dan dinamika keterlibatannya pada proses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea. GPPAC merupakan sebuah jaringan yang terdiri dari berbagai organisasi non-pemerintah Internasional yang bersama-sama bertujuan untuk menciptakan perdamaian guna mencegah terjadinya konflik bersenjata di dunia. Oleh karena itu, sumber data penelitian dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada masyarakat sipil yang terlibat dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea di bawah GPPAC dan para akademisi dan praktisi hubungan internasional yang dapat memberikan data pendukung terkait fenomena damai dan dinamika konflik di Semenanjung Korea antara Korea Utara dan Selatan. Selain itu, untuk semakin memperkaya sumber data penulis juga menggunakan studi pustaka yang berupa buku, jurnal, dan juga tulisan lainnya yang relevan dengan fokus penelitian tersebut.

Merujuk pada penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif studi kasus. Berdasarkan pada pendapat dari Patton (2012) dalam Raco (2010: 49-50) menyatakan bahwa studi kasus ialah studi tentang kekhususan dan kompleksitas suatu kasus dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam konteks, situasi, dan waktu tertentu. Selain itu, metode ini dapat membantu peneliti untuk mendalami studi mendalam tentang perorangan, kelompok, program, dan organisasi bahkan negara.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan dimana penelitian ini didasari oleh sebuah fenomena konflik yang berkepanjangan antara Korea Selatan dan Utara yang sudah berlangsung dalam kurun waktu lebih dari 60 tahun. Proses perdamaian yang diupayakan oleh negara atau *track II* tidak efektif setelah Korea Utara memutuskan untuk keluar dari dialog multilateral *six party talk* tersebut. Situasi konflik yang semakin intensif setelah kedua negara mengalami ketegangan hubungan tentu menjadi ancaman. Oleh karena itu, harus ada alternatif perdamaian di Semenanjung Korea setelah kegagalan proses yang dilakukan oleh *track I* di Semenanjung Korea. Alternatif itu tidak lain ialah dengan melibatkan

masyarakat sipil melalui *track II* yang dalam hal ini objek penelitiannya ialah organisasi non-pemerintah Internasional GPPAC.

Melalui studi kasus tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti antara lain ialah bagaimana keterlibatan GPPAC dalam proses inisiasi perdamaian di semenanjung Korea dan bagaimana dinamika yang mereka alami dalam proses tersebut. Inisiasi perdamaian oleh GPPAC sebagai *track II* atau masyarakat sipil tidak lain dilatar belakangi oleh adanya paradigma ekonomi, politik, ideologi, dan militer yang dilakukan oleh *track I* tidak lagi efektif dalam mengupayakan perdamaian di Semenanjung Korea. Sehingga, paradigma lain yang bisa dilakukan ialah melalui pendekatan kemanusiaan melalui masyarakat sipil yang dalam hal ini ialah GPPAC. Hal ini membuktikan bahwa semangat perdamaian di level masyarakat masih ada.

3.2. Sumber Data/ Subyek/ Obyek Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah proses perdamaian di Semenanjung Korea yang sebelumnya telah dilaksanakan dalam tingkat negara melalui pendekatan *G to G* dalam *six party talk* dialog mengalami kegagalan dan tidak lagi efektif ketika di tahun 2009 Korea Utara memutuskan keluar dari dialog tersebut. Meskipun demikian, semangat perdamaian di Semenanjung Korea tidak turut hilang karena terdapat pendekatan *P to P* dengan melibatkan *civilian* yang dalam hal ini ialah oleh GPPAC (*Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict*) sebagai bentuk inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea setelah gagalnya proses perdamaian melalui pendekatan *track I* tersebut.

3.2.1. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2000: 112), sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari kata dan tindakan serta data pendukung yang sifatnya tertulis seperti dokumen, foto, dan lain sebagainya. Adapun data yang berasal dari kata dan tindakan dapat diperoleh dari proses wawancara kepada para narasumber yang telah ditentukan sesuai dengan substansi penelitian. Data yang berasal dari

wawancara disebut dengan data primer. Sedangkan, data pendukung yang berasal dari dokumen serta buku dinamakan sebagai data sekunder karena sifatnya hanya sebagai data tambahan.

3.2.2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian terdiri dari narasumber yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam apa yang menjadi objek penelitian. Melalui subyek penelitian, informasi berkaitan dengan penelitian dapat diperoleh. Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini ialah para akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil lainnya yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses perdamaian di Semenanjung Korea.

Adapun teknik yang digunakan dalam pemilihan narasumber dan wawancara ialah ditentukan secara selektif dengan teknik *purposive sampling* guna mendalami data dari narasumber. Oleh karenanya, pada penelitian ini, berikut merupakan individu maupun lembaga atau institusi yang menjadi subyek penelitian yang dianggap memiliki relevansi terkait topik yang diangkat yakni proses perdamaian di Semenanjung Korea dalam hal ini berfokus pada keterlibatan masyarakat sipil yakni oleh GPPAC. Berikut tabel yang menunjukkan subyek dari penelitian ini.

Tabel 3.1. Narasumber

No	Narasumber	Lembaga
1	Peter Van Tuijl	Executive Director of GPPAC
2	Dr. Ichsan Malik	<i>Member of dialogue working group and mediation represent GPPAC Southeast Asia. Di tahun 2005-sekarang , beliau turut meginiiasi dialog untuk perdamaian di Pyongyang Korea Utara</i>
3	Meri Joyce	<i>Peace Boat, GPPAC North East Asia</i>
4	Charlotte Divin	<i>Coordinator Project Development, Regional Coordinator for Northeast Asia Secretariat of GPPAC</i>

5	Prof. Dr. Makarim Wibisono	Pakar Hubungan Internasional dan mantan duta besar Indonesia serta anggota tetap UN di New York dan Genewa
6	Novi Siti Kussuji Indrastuti	Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada
7	Dr. Siswo Pramono, LL.M	<i>Director General/ Head of Policy Analysis and Development Agency Ministry of Foreign Affairs</i>
8	Rene L. Pattiradjawane	<i>Centre for Chinese Studies-Indonesia</i>

Penggalan informasi dari narasumber yang ada akan dilakukan melalui wawancara baik secara tatap muka maupun email. Setelah wawancara dilakukan, data yang diperoleh kemudian dikelola dan ditranskripsikan dalam sebuah bentuk narasi.

3.2.3. Obyek Penelitian

Merujuk pada Arikunto (2006:118) yang menyatakan bahwa obyek penelitian ialah sebuah fenomena yang menjadi variabel penelitian atau inti dari problematika yang ingin diteliti. Obyek penelitian dapat berupa benda ataupun institusi yang ingin diteliti. Adapun dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian ialah mengenai keterlibatan *civilian* yang dalam hal ini ialah GPPAC (*Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict*) dan dinamika yang dihadapi dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang luas dan ekstensif atau bersumber dari berbagai macam sumber informasi merupakan tulang punggung dari jenis penelitian kualitatif. Hal ini lah yang memungkinkan bagi seorang peneliti untuk mengumpulkn data dengan menempatkan keunggulan suara, pesan *email*, dan informasi elektronik. Hal tersebut memang menentang paradigma tradisional yang selama ini digunakan oleh penelitian kualitatif, namun merujuk pada pengumpulan data yang sifatnya holistik maka

teknik tersebut menjadi sesuatu yang sah. Menurut Makyut & Morehouse (1994) dalam Sari Wahyuni (2012: 20-21) menyatakan bahwa:

“The most useful ways of gathering these forms of data are participant observation, in-depth interviews, group interviews, and the collection of relevant documents. Observation and interview data is collected by the researcher in the form of filed notes, and audio-taped interviews, which are later transcribed for use in data analysis. There is also some qualitative research being done with photographs and video-taped observation as primary sources of data”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dengan mempertimbangkan lokasi dan juga fokus serta objek dari penelitian, maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah studi pustaka atau berdasarkan pada dokumen yang berupa buku, jurnal baik nasional maupun internasional, dan tulisan lainnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik/ digital. Selain itu, pengumpulan data melalui wawancara juga menjadi sumber data dalam penelitian yang dilakukan. Selain wawancara kepada subyek penelitian yang relevan, dan kegiatan seminar atau kuliah umum yang sesuai dengan fokus penelitian juga menjadi salah satu teknik pengumpulan data.

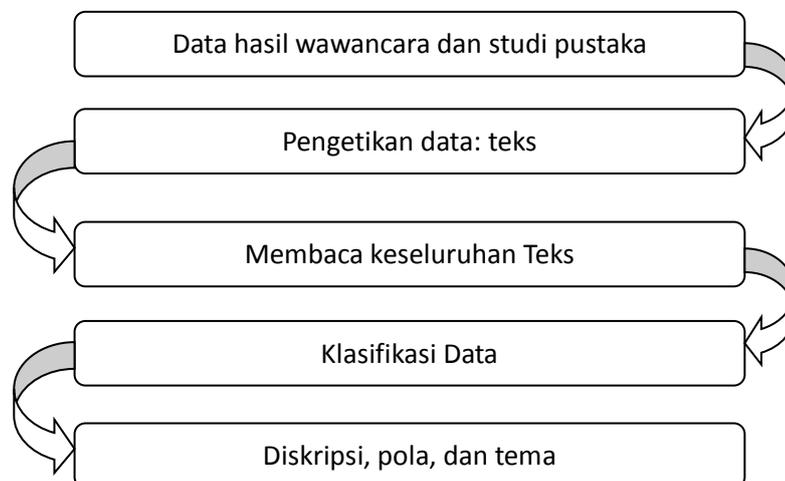
3.4. Teknik Analisa Data

Analisa data ialah proses sistematis dalam pencarian dan pengaturan hasil wawancara, catatan, studi pustaka, dan materi lain yang telah dikumpulkan guna meningkatkan pemahaman mengenai materi tersebut agar mampu menjawab dari pertanyaan penelitian yang telah disusun (Emzir, 2016: 85). Proses tersebut tidak lain meliputi pengerjaan data, membagi data menjadi beberapa kategori, mensintesis data tersebut, kemudian mencari pola, sehingga mampu untuk menemukan data yang penting dari apa yang dianalisis.

Setelah data terkumpul, dalam penelitian kualitatif data tersebut kemudian di analisa dengan memahami literatur yang digunakan sebagai

sumber penelitian dan mereview data yang diperoleh dari catatan serta transkrip wawancara yang dilakukan. Metode penelitian kualitatif lebih bersifat induktif yakni dari khusus ke umum dimana penelitian bermula dari realitas fakta suatu fenomena yang kemudian dianalisa dengan pola-pola umum dan dipahami secara menyeluruh.

Dalam metode penelitian kualitatif, data yang diperoleh biasanya diperoleh dari wawancara sebagai data primer dan juga tidak menutup kemungkinan mendapatkan data yang lain dari sumber pustaka seperti buku dan juga jurnal sebagai data sekunder. Menurut Creswell (2008) dalam Emzir (2016: 129-135) data-data tersebut dikumpulkan dan kemudian dianalisa dengan pertama-tama membacanya kembali dan meringkasnya kedalam sebuah pernyataan yang lebih sederhana. Selanjutnya akan dilakukan proses klasifikasi yang bertujuan untuk menyaring antara data yang valid dan yang tidak valid dengan pertanyaan penelitian. Secara luas, proses tersebut secara sistematis dapat digambarkan melalui bagan dibawah ini:



Gambar 3. 1 Proses Analisa Data Kualitatif

sumber : Creswell (2008) dalam Raco (2010: 76)

Terlepas dari proses analisa data yang telah disajikan oleh Creswell tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data dari Miles dan Hubermas yang membagi tiga macam kegiatan dalam proses analisa data, yakni (Miles and Hubermas 1994: 429, Emzir, 2016: 129-135):

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemokuskan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data asli yang masih mentah kedalam catatan tertulis. Dengan kata lain, reduksi data dapat dilakukan sejak pengumpulan data dimulai bahkan sebelum penelitian secara resmi dilakukan dengan cara membuat ringkasan atau memo, penelusuran tema, dan lain sebagainya. Adapun reduksi data dilakukan sebagai upaya untuk menyisihkan data-data yang dianggap kurang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

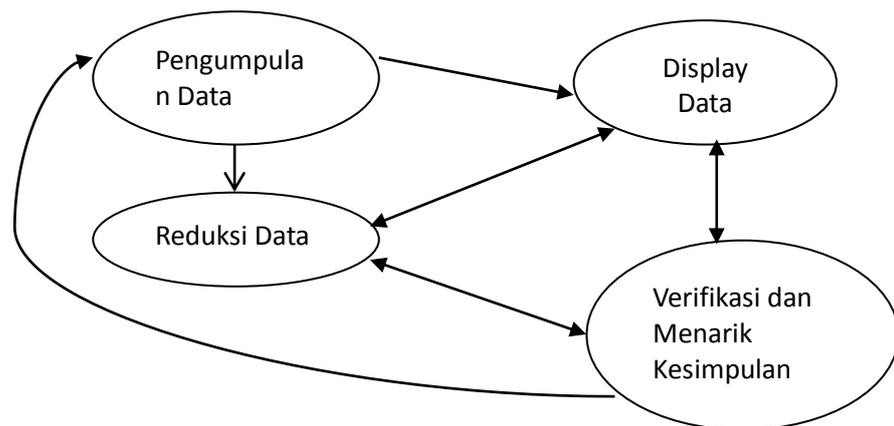
b. Display Data

Poses dalam membuat model data, dimana dalam penelitian kualitatif model data yang disajikan lebih banyak berupa teks naratif. Selain itu, penyajian data juga dapat ditunjukkan dalam beberapa alternatif lain seperti dalam bentuk matriks, diagram, bagan dan juga tabel.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari proses analisa data. Dalam tahap ini, peneliti menarik dan membuat sebuah kesimpulan dari data yang telah di sajikan pada tahap sebelumnya.

Adapun tahap tersebut dapat dijelaskan melalui sebagaimana bagan berikut:



Gambar 3. 2 Komponen Analisa Data: Model Interaktif

Sumber : Huberman & Miles (1994: 429) dalam Emzir (2016: 134)

Teknik analisa data, dilakukan dengan tujuan mengelolah data yang diperoleh sehingga data yang masih mentah dapat diuraikan dalam bentuk yang sederhana dan mengkerucut sehingga mampu untuk digunakan sebagai bahan analisa guna menjawab pertanyaan penelitian yang sebelumnya telah disusun.

3.5. Prosedur Penelitian

3.5.1. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrumen atau alat dalam penelitian kualitatif menurut Sugiono (2009: 305-306) ialah peneliti. Oleh karena itu, peneliti tersebut haruslah divalidasi yang diantaranya terkait dengan pemahaman peneliti mengenai metode penelitian kualitatif, penguasaan peneliti akan tema atau bidang yang diteliti, dan kesiapan peneliti memasuki objek penelitian. Validasi penting untuk dilakukan, mengingat peneliti sebagai instrumen berfungsi dalam menetapkan fokus dari penelitian, memilih pihak yang akan diwawancara (informan), mengumpulkan data penelitian dan menentukan display data guna menilai kualitas data tersebut, setelah itu melakukan analisa terhadap data dan menafsirkannya kedalam sebuah kesimpulan. Hal ini didukung dengan pendapat dari Creswell (2014) yang menyatakan bahwa:

“Researcher may use a protocol –an instrument for collecting data- but the researchers are the one who actually gather information. They do not tend to use or rely on questionnaires or instruments developed by other researchers”.

Dengan demikian, peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. Bahkan Creswell menyebutkan jika peneliti tidak dianjurkan untuk menggunakan atau mengandalkan instrumen yang telah digunakan oleh peneliti lainnya.

3.5.2. Data Primer

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini ialah hasil dari wawancara kepada narasumber yang dianggap sesuai dan relevan dengan objek penelitian yang dilakukan. Agar tetap berfokus pada persoalan yang akan diteliti, wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman atau *interview guide*, sehingga tetap fokus pada inti permasalahan sehingga dapat menjawab seluruh pertanyaan penelitian yang telah disusun.

Pedoman wawancara yang dimaksud ialah berisi garis besar mengenai informasi yang ingin didapatkan oleh penulis dari narasumber terkait. Meskipun demikian, dalam perkembangan situasi wawancara, tidak menutup kemungkinan beberapa informasi yang didapatkan tidak memenuhi kriteria dari pedoman wawancara yang telah dibuat. Untuk itu, proses analisa data sangat diperlukan untuk menyaring dan memperhitungkan mana saja informasi yang relevan dengan objek penelitian.

3.5.3. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dimana data ini diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitian atau lebih kepada studi literatur melalui analisa dokumen tertentu. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi pustaka atau literatur

seperti buku, jurnal, majalah, korean baik dalam bentuk digital maupun cetak yang sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti.

3.5.4. Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data

Uji keabsahan dan keterandalan data secara umum dapat dilihat dengan didasarkan pada akurasi dari instrumen penelitian. Menurut Gibbs (2017) dalam Creswell (2014) menyebutkan bahwa uji keabsahan ialah kegiatan peneliti dalam memastikan akurasi data yang diperoleh, sedangkan keterandalan data ialah mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan oleh peneliti konsisten bahkan jika diterapkan pada penelitian lain yang berbeda.

Menurut Creswell & Miler (2000) dalam Creswell (2014) menjelaskan bahwa "*Terms abound in the qualitative literature that address validity, such as trustworthiness, authenticity, and credibility*". Dengan demikian, peneliti sebagai instrumen penelitian harus jujur dalam perolehan data serta data yang diperoleh tersebut haruslah asli. Sehingga, kegiatan seperti plagiasi sangatlah dilarang dalam penelitian kualitatif.

Data merupakan hal yang paling penting dalam penelitian kualitatif, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan prosedur uji keabsahan data dengan teknik *triangulate* atau triangulasi yaitu teknik pengecekan data guna memperoleh kebenaran, sehingga mampu meyakinkan peneliti dalam mengambil kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.

3.6. Jadwal Penelitian

Penelitian terkait keterlibatan masyarakat sipil dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea telah dilakukan pada bulan September s.d. Januari 2017 melalui wawancara dan analisa data sekunder.

BAB 4

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN DATA

4.1. Gambaran Umum Penelitian

4.1.1. Sejarah Konflik Semenanjung Korea

Semenanjung Korea merupakan salah satu wilayah yang cukup rawan akan terjadinya konflik dengan eskalasi yang tinggi. Ketegangan hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi lebih dari 60 tahun menjadi penyebab utama ancaman bagi stabilitas keamanan baik di kawasan Asia Timur maupun global. Meskipun konflik saat ini tidak terjadi secara masif, tindakan provokasi dan juga perlombaan senjata antara kedua negara terjadi dengan skala dan intensitas yang cukup tinggi tetap menjadi ancaman. Peningkatan kekuatan persenjataan oleh Korea Utara dengan terus melakukan proliferasi Nuklir dan mengembangkan kemampuan rudal balistik menjadikan Korea Utara menjadi tantangan bagi keamanan.

Konflik di Semenanjung Korea dimulai sejak masa era kolonial Jepang dari tahun 1910 dan berakhir pada tahun 1945. Selama kurun waktu lebih 30 tahun, Jepang menguasai seluruh elemen kehidupan masyarakat Korea. Penggunaan bahasa lokal dan seluruh identitas asli bangsa Korea dilarang dan digantikan dengan identitas bahasa serta budaya bangsa Jepang. Kekerasan dan tekanan yang terus muncul pada akhirnya memunculkan pergerakan perlawanan atau *anti-imperialist movement* sebagian masyarakat di Korea yang terdiri dari kaum intelektual dan pelajar yang menginginkan kemerdekaan dari Jepang melalui cara-cara anti kekerasan dengan meminta dukungan progresif dari negara-negara barat salah satunya Amerika Serikat. Berbagai macam cara telah dilakukan namun tidak menghasilkan perubahan besar hingga sebagian dari mereka akhirnya memilih untuk menjadi militan dan melakukan perlawanan kepada Jepang dengan cara-cara yang radikal. Kelompok perlawanan Jepang di Korea pada waktu itu terbagi menjadi dua yakni kelompok berhaluan Komunis dan Nasionalis. Kedua kelompok

inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya partai Komunis dan Nasionalis di Korea di tahun 1925 (Worden, ed. 2008, 29:33)

Selama menjalankan aksinya, kelompok Komunis melakukan pergerakan dengan cara bergerilya dan bergabung bersama kelompok pergerakan Tiongkok dan tentara Uni Soviet untuk menyerang tentara Jepang di tahun 1931 (Worden, ed. 2008: 33). Mengingat pada waktu itu Jepang juga terlibat konflik dengan Uni Soviet, hal ini menjadi momentum bagi kelompok berhaluan Komunis untuk menggabungkan kekuatan guna bersama-sama menyerang Jepang. Salah satu pejuang gerilya partai Komunis Korea pada waktu itu ialah Kim Il Sung yang pada akhirnya menjadi pemimpin Korea Utara. Hal ini berbeda dengan kelompok Nasionalis yang bergerak dengan cara yang lebih diplomatis dengan melakukan negosiasi dan bekerja sama dengan Amerika Serikat guna mendapatkan dukungan untuk memerdekakan negaranya dari penjajahan Jepang. Aliansi yang dilakukan oleh dua kelompok pergerakan tersebut pada akhirnya menjadi cikal bakal konflik yang lebih besar di Semenanjung Korea (Worden, ed. 2008: 32-37).

Mobilisasi kekuatan yang dilakukan oleh Uni Soviet di Semenanjung Korea untuk bersama-sama melawan penjajahan Jepang semakin hari kian menguat. Hal ini dilihat sebagai sebuah kekhawatiran bagi Amerika Serikat jika Jepang telah meninggalkan Semenanjung Korea maka Uni Soviet yang akan berkuasa. Untuk itu agar tidak terjadi hal demikian, Amerika Serikat menginisiasi sebuah pertemuan pada bulan Maret di tahun 1943 di Inggris yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai pemisahan Semenanjung Korea menjadi dua zona wilayah yakni Utara untuk Uni Soviet dan Selatan untuk Amerika Serikat. Adapun pemisahan tersebut ditandai dengan sebuah garis pemisah yang disebut dengan titik 38⁰ Paralel dan pada tahun 1945 setelah Jepang mengalami kekalahan pada perang dunia II, Amerika Serikat memutuskan untuk mengirimkan sekitar 25.000 tentara ke Semenanjung Korea zona Selatan (Worden, ed, 2008: 37-38).

Langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut merupakan awal dari dimulainya Perang Dingin di Semenanjung Korea antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dimana Korea bagian Selatan di pengaruhi oleh kekuatan Amerika Serikat dan Korea bagian Utara dikendalikan oleh kekuatan Uni Soviet yang berlatar komunis. Intervensi oleh dua kekuatan besar tersebut menjadikan Semenanjung Korea sangat susah untuk disatukan kembali. Pada akhirnya, kedua Korea memutuskan untuk mendirikan dua negara yang berbeda yang mana Korea Selatan memproklamirkan diri sebagai negara pada 15 Agustus 1948 dengan dikepalai oleh Syngman Rhee dan sebulan setelahnya yakni 9 September 1948 Korea Utara juga memutuskan untuk membentuk negara tersendiri dengan Kim Il Sung sebagai pemimpinnya. (Worden, ed, 2008: 42)

Setelah menjadi dua negara, ketegangan dan konflik antara Utara dan Selatan semakin meningkat. Hal ini tidak lain karena adanya ambisi dari Kim Il Sung untuk melakukan unifikasi dan meng-"komunis"-kan Korea bagian Selatan dengan dibantu oleh Uni Soviet dan Tiongkok pada waktu itu (Worden, Ed. 2008: 40-42). *Proxy war* yang dilakukan oleh kedua negara menjadikan intensitas ketegangan di Semenanjung Korea antara kelompok partai Komunis dan partai Nasionalis semakin meningkat dan puncaknya ialah terjadi Perang Korea pada 24 Juni 1950. Pada hari itu, Korea Utara melakukan penyerangan ke Korea Selatan hingga melintasi perbatasan dan berhasil menguasai hampir sebagian besar wilayah di Korea Selatan (Worden, ed. 2008: 43-45, Myung, Jaffe, terj., Christine, 2013: 27-28).

Bersama dengan Amerika Serikat, Korea Selatan melakukan serangan balasan hingga akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Korea Utara dan merebut kembali wilayah Korea Selatan yang sebelumnya sempat dikuasi (Myung, Jaffe, terj., Christine, 2013: 27). Setelah lebih dari dua tahun berperang, tepatnya pada tanggal 27 Juli 1953 kedua pihak berkonflik memutuskan untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata dan mendirikan zona bebas militer di titik perbatasan 38^o Paralel. Perjanjian tersebut secara resmi menghentikan perang dan kekerasan di

Semenanjung Korea antara kedua negara (Worden, ed. 2008: 63). Meskipun kekerasan dan perang telah terhenti, namun hubungan dan ketegangan kedua negara masih terus berlanjut hingga sampai saat ini. Konflik berkepanjangan tersebut terjadi dikarenakan ketidakmampuan kedua negara untuk mencapai perjanjian damai setelah penandatanganan perjanjian gencatan senjata di tahun 1953. Selain itu, adanya sistem Internasional di Kawasan yang mempengaruhi yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet serta Tiongkok menjadikan konflik semakin kompleks dan susah untuk diselesaikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya perang korea di tahun 1950 turut menjadi pendorong Korea Utara membangun kekuatan Nuklirnya. Intesitas ketegangan antara kedua negara semakin meningkat ketika Amerika Serikat menempatkan senjata nuklir di Korea Selatan pada tahun 1958, yakni lima tahun usai berlangsungnya perjanjian gencatan senjata. Hampir lebih dari beberapa dekade pasca penandatanganan gencatan senjata, pemerintah Pyongyang telah mengalami hubungan diplomatik yang buruk dengan pemerintah Seoul dan Washington. Puncaknya ialah pada akhir tahun 1960 terjadi perkelahian antara pihak militer Korea Utara dan Selatan di perbatasan DMZ dan percobaan pembunuhan presiden Korea Selatan Park Chung-hee di tahun 1974 oleh agen Korea Utara serta penangkapan kapal perang Amerika Serikat oleh Korea Utara. Serangkain peristiwa tersebut semakin meningkatkan ketegangan hubungan antara Korea Utara dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat (Larner: 2010).

Selain itu, puncak ketegangan di Semenanjung Korea terjadi pada tahun 2000-an ketika presiden Amerika Serikat pada waktu itu George W.Bush menyandingkan Korea Utara bersama dengan Iran sebagai “*exist of evil*” (Beriker, Sandole, Bryne. 2009: 264). Hal ini turut pula meningkatkan ketegangan hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan yang merupakan sekutu terdekat Amerika Serikat di Asia Timur. Tindakan provokasi dan uji coba baik rudal maupun nukir oleh Korea Utara semakin ditingkatkan. Hal ini sebagai bentuk *deterrence* terhadap ancaman dari

Amerika Serikat yang pada waktu itu tengah mengalami masalah keamanan akibat terjadinya peristiwa 9/11. Bagaimanapun juga, dapat dikatakan bahwa Konflik di Semenanjung Korea telah menjadi “*cycle of provocation*” antara Korea Utara dan Selatan serta Amerika Serikat (Kearney, 2017: 10). Provokasi dan konflik seperti ini tidak dapat dipungkiri akan tetap terus terjadi di Semenanjung Korea sebagai akibat dari belum adanya sebuah perjanjian damai yang mengikat kedua belah pihak untuk saling rekonsiliasi satu sama lainnya guna menjalin hubungan yang lebih baik dan harmonis.

4.1.2. Upaya Resolusi Konflik di Semenanjung Korea melalui Track I

Meskipun konflik dan provokasi terus berlangsung, upaya resolusi konflik bukannya tidak pernah dilakukan. Beberapa kali pemerintah Korea Selatan serta Amerika Serikat berupaya untuk melakukan proses perbaikan hubungan melalui upaya diplomatis baik itu sifatnya bilateral maupun multilateral. Salah satu upaya dialog yang dilakukan melalui Track I ialah satu tahun setelah proses gencatan senjata tahun 1953 yakni pada tahun 1954 petinggi militer dari KPA (*Korean People Army*), CPV (*Chinese People Volunteer*), dan pihak militer dari Amerika Serikat serta Korea Selatan bertemu di konferensi Geneva untuk membicarakan secara formal terkait kesepakatan damai, namun pertemuan tersebut justru banyak membahas mengenai masalah mekanisme pemilihan umum dan bagaimana upaya untuk memperbaiki hubungan antara Korea Utara dan Selatan pasca penandatanganan perjanjian gencatan senjata, alhasil pertemuan tersebut berakhir tanpa sebuah perjanjian damai (Kearney, 2017: 15-16).

Selain itu, selama tahun 1970 terjadi interaksi positif antara pemerintah Korea Selatan dan Utara. Selain itu, pada tahun 1971 hubungan diplomatik Korea Utara dan Selatan semakin baik ketika diadakan program reunifikasi keluarga yang terpisah akibat perang oleh Palang Merah Internasional. Kesempatan kedua negara memperbaiki hubungan juga terjadi selama administrasi presiden Roh Tae-woo tahun 1988 hingga 1992. Pada masa kepemimpinannya, presiden Roh

mendeklarasikan perbaikan hubungan dengan Korea Selatan melalui politik, ekonomi, dan pertukaran budaya (ROK Ministry of Unification. White Paper on South –North Dialogue, pp. 461-465, 20 August 2001). Selain itu, presiden Roh juga mempromosikan perdagangan antar Korea dan berjanji untuk memberikan bantuan kepada Korea Utara guna memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat serta Jepang (Kearney, 2017: 16). Hasilnya di tahun yang sama, Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan memulai inisiatif untuk membangun hubungan diplomatik dengan Korea Utara (Woden, ed. 2008: 277).

Hal tersebut merupakan langkah awal dalam proses resolusi konflik antara pemerintah Korea Utara dan Selatan serta Amerika Serikat. Hubungan baik dan juga upaya-upaya resolusi konflik melalui track I terus dilakukan hingga pada tahun 1991, Korea Utara dan Selatan menandatangani sebuah perjanjian guna membangun rekonsiliasi dan tindakan non-agresi (UN Peacemaker, 13 Desember 1991. Kearney, 2017: 72). Dalam perjanjian tersebut ditetapkan empat komisi gabungan untuk bekerja merealisasikan prinsip-prinsip yang ada di dalam perjanjian tersebut, antara lain rekonsiliasi Utara dan Selatan, pertemuan militer Utara dan Selatan, kerjasama ekonomi Utara dan Selatan, serta pertukaran sosial dan budaya Utara dan Selatan. Empat item tersebut menjadi poin utama bagi terciptanya rekonsiliasi antara kedua negara untuk mengakhiri konflik yang terjadi (Kearney, 2017: 72).

Upaya resolusi konflik semakin menguat ketika tahun 1992, Korea Utara dan Korea Selatan menandatangani "*Joint Declaration of the Denuclearization of the Korean Peninsula*" atau deklarasi anti pengembangan nuklir di Semenanjung Korea. Dalam deklarasi tersebut, dinyatakan larangan bagi kedua belah pihak baik Korea Utara maupun Selatan untuk menguji coba, memproduksi, menerima, memproses, atau menggunakan senjata nuklir serta secara sembunyi-sembunyi melakukan pengayaan uranium (Worden, ed. 2008: 261). Untuk melengkapi deklarasi tersebut, Korea Utara di tahun yang sama juga menandatangani perjanjian IAEA (*The International Atomic Energy Agency*). Dengan

ditandatanganinya perjanjian tersebut, Korea Utara memberikan akses kepada IAEA untuk melakukan inspeksi ke fasilitas nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara (Worden, ed. 2008: 261-262).

Selain itu, di tahun yang sama presiden Amerika Serikat George H.W. Bush dan presiden Roh Tae-woo sebagai langkah untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara sepakat untuk meniadakan latihan militer gabungan yang biasanya diselenggarakan secara rutin (Worden, ed, 2008: 278). Sebagai bentuk respon dari keinginan Korea Selatan dan Amerika untuk memperbaiki hubungan, pemimpin Korea Utara pada waktu itu Kim Il Sung menanggukhkan upacara acara anti Amerika yang biasanya diselenggarakan rutin tiap tahun dan perayaan kemenangan di Perang Korea. Kim Il Sung memberikan pernyataan bahwa *“If the united states takes the road to improve relations with us, we shall also do so without recalling the past”*. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa Kim Il Sung menerima baik upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan (Bok Lee, Patterson. 1998:127-128). Realisasinya ialah pada tahun 1992, diplomat Amerika Serikat dan Korea Utara bertemu beberapa kali di Beijing untuk membahas mengenai kemungkinan penyelesaian isu proliferasi nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara (Kearney, 2017: 73).

Seluruh perjanjian dan upaya rekonsiliasi tersebut gagal ketika terjadi perubahan kepemimpinan di Korea Selatan dan Amerika Serikat. Bagi Korea Selatan, setelah masa kepemimpinan presiden Roh berakhir akan sulit untuk memulai kembali pendekatan kepada Korea Utara. Presiden Kim Young Sam memulai pendekatan dengan menginisiasi pertemuan dengan Kim Il Sung di tahun 1994, namun sebelum rencana tersebut dimulai pemimpin Korea Utara Kim Il Sung terlebih dahulu jatuh sakit dan akhirnya meninggal (Kearney, 2017: 74).

Seluruh upaya yang sebelumnya dilakukan mengalami kegagalan dan Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong Il memberikan tantangan yang sangat besar bagi proses resolusi konflik di Semenanjung Korea pada waktu itu. Pada tahun 1994 misalnya, Korea Utara melarang

IAEA melakukan inspeksi atas fasilitas nuklir di Korea Utara. Akibat larangan tersebut, Amerika Serikat menyiapkan sanksi ekonomi dan mengirimkan pasukan ke Korea Selatan sebagai bentuk antisipasi terjadinya perang dengan Korea Utara (Worden, ed. 2008: 261-262).

Sebagai langkah untuk mengantisipasi agar situasi di Semenanjung Korea kembali kondusif, pada bulan Oktober 1994 Amerika Serikat, Jepang, Korea Utara, dan Selatan menandatangani perjanjian multilateral yang mengharuskan Korea Utara untuk memberikan akses kepada IAEA untuk memonitoring fasilitas nuklir yang dimiliki dengan imbalan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan akan memberikan dukungan energi dan membangun reaktor nuklir yang aman bagi Korea Utara. Perjanjian tersebut berhasil menghentikan Korea Utara memproses plutonium selama sembilan tahun (Scobell, Sanford, 2007: 74-75, Kearney, 2017: 30).

Perubahan kepemimpinan di Korea Selatan memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam upaya resolusi konflik dalam *track I*. Pada masa pemerintahan Kim Dae Jung yakni antara tahun 1998 sampai dengan 2003, sebagai upaya untuk membangun dialog dengan Korea Utara presiden Dae Jung menginisiasi "*Sunshine Policy*" yang salah satu komitmennya ialah membangun hubungan damai dan harmonis dengan Korea Utara (Myung, Jaffe, terj., Christine, 2013: 35). Salah satu yang menjadi poin penting dalam kebijakan ini ialah merespon segala bentuk aksi provokasi Korea Utara dengan cara *direct talk* dan *cooperation*. Meskipun hubungan antara Korea Utara dan Selatan pada periode ini mengalami banyak tantangan, namun pendekatan yang dilakukan oleh Korea Selatan cukup berhasil dalam mendorong pertemuan inter-korea atau *inter-Korean Summit* pertama kali sejak terjadinya Perang Korea pada tahun 2000 di Pyongyang (Jinju Kwon, 2014). Selain itu, "*Sunshine Policy*" juga menjadi cikal bakal terbentuknya *Kaesong Joint Industrial Complex* atau industri bersama antara Korea Utara dan Selatan yang dibuka di tahun 2004 (Kearney, 2017: 18). Kegiatan ini turut meningkatkan

hubungan antar Korea dan semakin menguatkan hubungan kerjasama Politik dan Ekonomi antara Korea Utara dan Selatan pada waktu itu.

Ditengah-tengah hubungan yang harmonis antara Korea Utara dan Selatan, pada tahun 2001 terjadi perubahan pemimpin di Amerika Serikat dimana presiden George W. Bush mengambil alih kepemimpinan dan di tahun 2002 sempat memberikan label kepada Korea Utara bersama dengan Iran dan Iraq sebagai "*the axis of evil*", selain itu Bush juga menyampaikan bahwa ketiga negara tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian dunia (Kearney, 2017: 30). Hal membuat ketegangan di Semenanjung Korea yang pada akhirnya Korea Utara pada tahun 2003 memutuskan keluar dari NPT (*Non-Proliferasi Nuclear Treaty*) dan membuka kembali fasilitas nuklir yang sebelumnya ditutup (Worden, ed.2008: 262, Kearney, 2017: 75). Stabilitas keamanan di Semenanjung Korea mengalami tantangan yang cukup besar pada waktu itu, penguatan kekuatan militer oleh Korea Utara terus dilakukan mengingat Bush pada saat itu tengah melakukan invasi ke irak guna meruntuhkan rezim Saddam Hussein. Hal ini turut menjadi ancaman bagi Korea Utara jikalau Amerika Serikat juga akan melakukan hal yang sama kepada Korea Utara (Kearney, 2017: 30-33).

Di tengah dinamika politik dan keamanan yang kompleks, Korea Selatan dibawah kepemimpinan Roh Moo-Hyun berusaha untuk memeluas "*Sunshine Policy*" menjadi "*Policy for Peace and Prosperity*" untuk membangun hubungan dengan Korea Utara melalui persuasi, peredaaan tensi, dan kerja sama (Worden, 2008: 74, Kearney, 2017: 75). Pada masa Roh Moo-Hyun juga yaitu di tahun 2003 pertama kali diselenggarakan *Six Party Talk* sebagai forum multilateral guna membahas mengenai isu kamanan di Semenanjung Korea. Forum tersebut dilaksanakan pada tahun 2003, 2005, dan 2007 dengan berfokus pada upaya meyakinkan Korea Utara untuk menghentikan kegiatan proliferasi Nuklir mereka (Cronoin, ed. 2008 :84-94).

Dari seluruh kegiatan yang dilakukan, tidak dapat dipungkiri bahwa dialog dan negosiasi yang dilakukan bukan bertujuan untuk mewujudkan

perdamaian melainkan untuk mencegah Korea Utara melakukan kegiatan dan peningkatan kekuatan militer baik dengan melakukan proliferasi Nuklir ataupun peluncuran rudal dan juga roket. Puncaknya ialah ketika di tahun 2009, Korea Utara melakukan peluncuran Roket jarak jauh. Korea Utara berasalan bahwa peluncuran tersebut tidaklah menyasar siapa pun atau negara manapun melainkan untuk tujuan yang damai dan sengaja diluncurkan ke luar angkasa atau orbit namun Dewan Keamanan PBB tetap mengecam aksi tersebut dan Korea Utara merespon kecaman tersebut dengan memutuskan untuk keluar dari Forum *Six Party Talk*.

Pada masa pemerintahan Obama, Amerika Serikat menolak untuk berbicara dengan Korea Utara sebelum Korea Utara bertindak terlebih dahulu dengan melakukan denuklirisasi. Sedangkan dari perspektif Korea Utara, dialog dan negosiasi apapun tetap terbuka untuk Amerika Serikat, namun menolak untuk menghentikan program nuklir yang telah dijalankan. Hubungan yang terjalin antara Korea Utara, Selatan serta Amerika Serikat pasca keluarnya Korea Utara dari forum *six party talk* cenderung dingin. Setelah Korea Utara memutuskan untuk mengundurkan diri dari forum tersebut, niscaya tidak ada lagi forum multilateral yang dapat mempertemukan pihak yang berkonflik yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Sedangkan dalam upaya Bilateral terbukti setelah masa pemerintahan Roh Moo Hyun tidak lagi efektif dan justru tindakan provokasi antara kedua negara semakin meningkat.

Pada tahun 2012, setelah Korea Utara meluncurkan roket tepatnya pada tanggal 25 Juli Korea Utara meminta adanya perjanjian damai kepada Amerika Serikat. Namun permintaan tersebut di tolak dan di tahun 2016 yang lalu Korea Utara kembali menginginkan perjanjian damai dan meminta kepada Amerika Serikat untuk terlibat dalam pembicaraan untuk menghentikan Perang Korea namun tetap ditolak. Penolakan tersebut dikarenakan Amerika Serikat menginginkan Korea Utara untuk menghentikan seluruh kegiatan militer dan melakukan denuklirisasi sebelum menginginkan dimulainya dialog (Megan Casella, Doina Chiacu, Reuters: 2016). Setelah kegagalan mencapai kesepakatan memulai dialog

mewujudkan *peace treaty* bersama dengan Amerika Serikat, Korea Utara melakukan uji coba nuklir pada akhir bulan Januari 2016. Sebagai bentuk respon atas tindakan dari Korea Utara tersebut, pada bulan Februari dan Maret melalui kongres Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi kepada Korea Utara. Namun, sanksi tersebut direspon oleh Korea Utara dengan meluncurkan berkali-kali misil balistik pada bulan Maret. (Jack Kim, Jumin Park, Reuters:2016)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah baik melalui forum bilateral maupun multilateral tidak banyak memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun dari seluruh pendekatan tersebut beberapa kali efektif memperbaiki hubungan antara kedua negara namun *national interest* tiap negara tetap menjadi yang paling dominan dibandingkan dengan tujuan utama itu sendiri yakni perdamaian. Selain itu, pembahasan forum dialog dan negosiasi tidak banyak membicarakan mengenai perdamaian, namun lebih banyak bertujuan untuk membahas mengenai masalah keamanan dan ancaman yang dalam hal ini bisa dikatakan lebih mengarah kepada *military and political approach* dibandingkan kepada *humanity approach* dan *building trust*. Hal ini tentu sangat berbeda dengan yang seharusnya bahwa untuk menciptakan sebuah perdamaian di antara pihak yang berkonflik maka yang paling utama untuk dilakukan ialah bagaimana membangun kepercayaan diantara mereka sehingga kedepannya proses dialog dan negosiasi bisa berjalan dengan lebih baik. Hal ini kebalikan dari proses dialog yang selama ini dilakukan dalam rana *track I* yang mana masih belum terbangun rasa saling percaya dan justru rasa curiga serta perasaan terancam masih lebih kental dan mendominasi jalannya dialog.

4.1.3. Keterlibatan Track II dalam Membangun Dialog Perdamaian di Semenanjung Korea

Kawasan Asia Timur masih menjadi salah satu wilayah yang sampai saat ini masih terpengaruh dampak perang dimasa yang lalu, bahkan sebagai hasil dari sejarah perang dunia II dan dingin beberapa

negara memiliki hubungan diplomatik yang sangat terbatas. Oleh karenanya, hingga saat ini tidak ada forum multilateral dimana pemerintah atau *track I* dapat berbicara mengenai masalah keamanan dan perdamaian di Asia Timur. Sehingga, Asia Timur dapat dikatakan sebagai salah satu wilayah yang memiliki intensitas konflik tertinggi dengan peluang dialog yang rendah.

Dialog yang selama ini dilakukan dalam level *track I*, terlihat masih sangat susah dilakukan dan terkesan kurang efektif karena intensitas militer cenderung meningkat di kawasan salah satunya terkait isu nuklir yang menjadi ancaman di Semenanjung Korea dan kawasan. Sehingga, peran dari masyarakat sipil di Semenanjung Korea atau kawasan Asia Timur menjadi peluang dan sangat penting mengingat hubungan di level pemerintah masih banyak dipengaruhi dan dibayangi oleh *historical tension*. Untuk itu, posisi Masyarakat sipil sebagai *track II* di Semenanjung Korea ialah untuk membangun rasa percaya dan keyakinan diantara pihak yang ada dan membuka peluang untuk membicarakan isu sensitif yang bisa saja di tingkat pemerintah hal tersebut tidak dapat dilakukan

Pasca gagalnya forum "*six party talk*", maka tidak ada lain forum yang dapat menjembatani dialog antara Korea Utara dengan Korea Selatan dan juga Amerika Serikat. Selain itu, keberadaan *track I* dalam proses resolusi konflik dan dialog juga banyak dipengaruhi oleh kepentingan nasional negara tersebut. Hal ini menjadikan upaya perdamaian di Semenanjung Korea oleh *track I* hanya sebatas tawar menawar atau *bargaining* semata tanpa mencari jalan keluar yang efektif terkait permasalahan yang dihadapi.

Opsi lain yang dapat menjadi pilihan alternatif dalam membangun perdamaian di Semenanjung Korea tidak lain ialah melalui *track II* atau dengan melibatkan masyarakat sipil yang independen dan tidak memihak. Keterlibatan masyarakat sipil ini biasanya diistilahkan sebagai *track II Diplomacy* atau mengarah pada sebuah *unofficial meeting* antar perwakilan non-negara dalam satu forum untuk membahas dan mendiskusikan sebuah isu atau permasalahan. Biasanya partisipan dari

acara tersebut berasal dari latar belakang mantan pejabat pemerintah, atau para akademisi dan para *experts* yang kredibel di negaranya masing-masing. Selain itu, jika dibandingkan dengan *track I* dalam *track II diplomacy* lebih banyak memberikan kebebasan bagi para peserta untuk berpendapat dan berbicara terkait isu yang sensitif sekalipun yang biasanya terbatas atau terlarang di dalam forum dialog formal atau *track I* (Peter Jones, 2015).

Track II biasanya difasilitasi oleh masyarakat atau sifatnya *people to people exchange*. Sehingga, secara umum lebih fokus terhadap bagaimana membangun dan menyuarakan kehendak masyarakat dibandingkan dengan menginformasikan serta mengikuti *platform* pemerintah yang harus sesuai dengan kaedah peraturan dan juga mandat yang ada. Tidak jarang dalam pelaksanaan *track II* berjalan dengan lebih santai dan tidak terkesan kaku karena melibatkan element budaya dan aktivitas olahraga yang memang dirancang untuk memanusiaikan masyarakat dari negara lain dengan menghilangkan segala bentuk *stereotype* yang ada (Herbert C. Kelman, 1995:19-27). Saat ini terdapat beberapa kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam satu jaringan masyarakat sipil global yakni GPPAC (*Global Partnershi for Prevention of the Armed Conflict*) yang berupaya untuk mencari peluang perdamaian antara Korea Utara dan Selatan melalui tingkatan *grassroot* atau pendekatan *people to people* di tengah kebuntuhan *Track I*.

4.1.3.1. Latar Belakang GPPAC dan Keterlibatan dalam Upaya Resolusi Konflik

GPPAC (*Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict*) merupakan jaringan masyarakat sipil global yang terbentuk sekitar tahun 2003 ketika Sekretaris Jenderal PBB Kofi Anan dalam laporannya di tahun 2001 menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya kekerasan bersenjata dan meminta agar masyarakat sipil turut ikut berperan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *conflict prevention* supaya tidak terjadi konflik ataupun peningkatan eskalasi konflik hingga menimbulkan kekerasan.

Hal yang menarik ialah GPPAC bekerja di tingkat atau level yang berbeda secara simultan atau serempak dengan anggota yang memiliki latar belakang beragam dan terikat dengan komunitas lokal yang ada. Dalam menjalankan perannya, GPPAC melakukan pendekatan dari seluruh aspek baik etnik, politik, dan juga agama. Tidak jarang GPPAC membangun proses dialog dengan melibatkan pemerintah baik dalam tatanan lokal dan regional. Selain itu, dalam bekerja GPPAC juga banyak bekerja sama dengan PBB untuk beberapa isu strategis.

Kekuatan utama GPPAC ialah memberikan informasi dan alternatif perseptif terkait perdamaian dan *violence prevention* yang terkadang tidak dapat diperoleh dari pemerintah dan juga media. Misi utama GPPAC ialah membangun sebuah konsensus baru yang memungkinkan dilakukannya aksi bersama untuk mencegah konflik serta kekerasan dan mempromosikan perdamaian berdasarkan kawasan dan global. Oleh kerananya, GPPAC terbentuk sebagai sebuah jaringan organisasi masyarakat sipil yang tujuan pokoknya ialah mencegah peningkatan eskalasi konflik menjadi kekerasan baik di tingkat nasional suatu negara maupun global. Dalam menjalankan misinya, GPPAC berupaya untuk membangun sebuah *multi-stakeholder partnership* termasuk masyarakat sipil, pemerintah, organisasai regional, dan PBB. Hal ini dimaksudkan bahwa untuk menciptakan perdamaian dan mencegah terjadinya konflik, perlu dibangun kerjasama antara kelompok masyarakat di dalam segala level mengingat perdamaian merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak.

Saat ini, GPPAC tumbuh menjadi jaringan masyarakat sipil global yang terdiri dari 15 kawasan dan memungkinkan seluruh organisasi dan masyarakat untuk bekerjasama membangun serta mengimplementasikan strategi guna mencegah konflik dan membangun perdamaian di seluruh dunia. Dalam menjalankan tugasnya sebagai sebuah jaringan masyarakat sipil global yang memiliki *concern* dalam upaya resolusi konflik, GPPAC berkerja melalui beberapa cara, antara lain (GPPAC Charter: 2017):

- a. Analisa Konflik
- b. Mediasi dan Dialog
- c. Pendidikan Perdamaian
- d. Memperkuat peran organisasi melalui pendekatan Gender
- e. *Human security strategies* atau pendekatan kemanusiaan

Struktur organisasi GPPAC sendiri terdiri dua jaringan yakni *regional network* dan *global network*. Adapun untuk *regional network*, GPPAC dipimpin oleh RSGs (*Regional Steering Groups*) dan untuk *global network* dipimpin oleh *Global Secretariat* yang berkedudukan di Belanda. Baik jaringan kawasan maupun global tetap diperbolehkan untuk membukan *partnership* dengan *stackholder* lainnya untuk turut berkontribusi dalam upaya resolusi konflik dan *peacebuilding*. Dengan demikian, GPPAC merupakan jaringan masyarakat sipil global yang sangat fleksibel dan memberikan peluang bagi masyarakat luas untuk turut berkontribusi menjalankan agenda utamanya yakni Perdamaian dan Resolusi Konflik.

Secara global, GPPAC kegiatan administratif utama terletak pada global sekretariat yang berada di Belanda. Adapun komposisi dari sekretariat global terdiri dari ISG dan susunan direksi seperti direktur eksekutif, dan lain sebagainya di bawah GPPAC *foundation*. GPPAC ISG (*International Steering Group*) beranggotakan minimal 15 orang yang masing-masing merupakan perwakilan dari jaringan kawasan serta ditambah dengan maksimal 6 non-perwakilan regional.

GPPAC sekretariat global merupakan level tertinggi dalam GPPAC *foundation*, sementara ISG merupakan level tertinggi dari GPPAC *network*. Secara general, sasaran GPPAC sekretariat global ialah untuk berkontribusi dalam mencegah dan mentransformasi konflik dengan menginisiasi kegiatan serta memperkuat peran organisasi masyarakat sipil dalam upaya *peacebuilding*. Tidak jarang, GPPAC global melibatkan dan mengajani PBB untuk ikut terlibat dalam upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh GPPAC. Dengan kata lain, GPPAC global memiliki akses

yang cukup besar untuk masuk kedalam level *track I* baik berperan aktif atau hanya turut bertarsipasi dalam proses perdamaian yang ada.

GPPAC merupakan sebuah jaringan masyarakat sipil global yang bekerja dengan didasarkan kepada struktur kewilayahan. Adapun *regional structure* tersebut berfungsi untuk mengelolah dan menjalankan agenda resolusi konflik di wilayah dimana struktur tersebut berada. Hal ini dimaksudkan agar upaya perdamaian yang dilakukan lebih optimal dan mampu mengajak seluruh komponen masyarakat yang ada di tatanan *grassroot* untuk ikut berkontribusi menyelesaikan konflik dan mencegah kekerasan di wilayah mereka. Struktur kewilayah dipilih guna memaksimalkan peran masyarakat sipil lokal untuk menyelesaikan masalah dimana mereka berada. Para anggota akan melakukan pertemuan secara berkala untuk saling bertukar informasi dan pengalaman serta membuat sebuah keputusan strategis terkait masalah yang ada di kawasan.

Dalam menjalankan agendanya, GPPAC kawasan dikendalikan oleh RSGs (*Regional Steering Groups*) yang anggotanya terdiri dari perwakilan GPPAC kawasan yang dipilih melalui proses yang demokratis. Perwakilan dapat menjadi anggota RSGs selama tiga tahun dan dapat digantikan atau diperpanjang sesuai dengan keputusan dari GPPAC kawasan. Tugas utama dari RSGs ialah sebagai *decision maker* GPPAC di kawasan, yang meliputi (GPPAC Charter: 2017):

- a. Membuat perencanaan jangka panjang tahunan GPPAC di kawasan. Adapun rancangan jangka panjang yang dibentuk kurang lebih ialah selama 3 – 5 tahun sesuai dengan prioritas yang ingin dicapai terkait resolusi konflik di kawasan
- b. *Me-review* implementasi dari perencanaan yang telah dibuat dengan menggelar pertemuan tahunan
- c. Memilih perwakilan *International Steering Group* (ISG) yang nantinya akan ditempatkan di GPPAC *global secretariat* melalui proses yang demokratis dan transparan

- d. Berwenang untuk melakukan *examine and approve* bagi organisasi masyarakat sipil yang ingin bergabung menjadi anggota GPPAC.

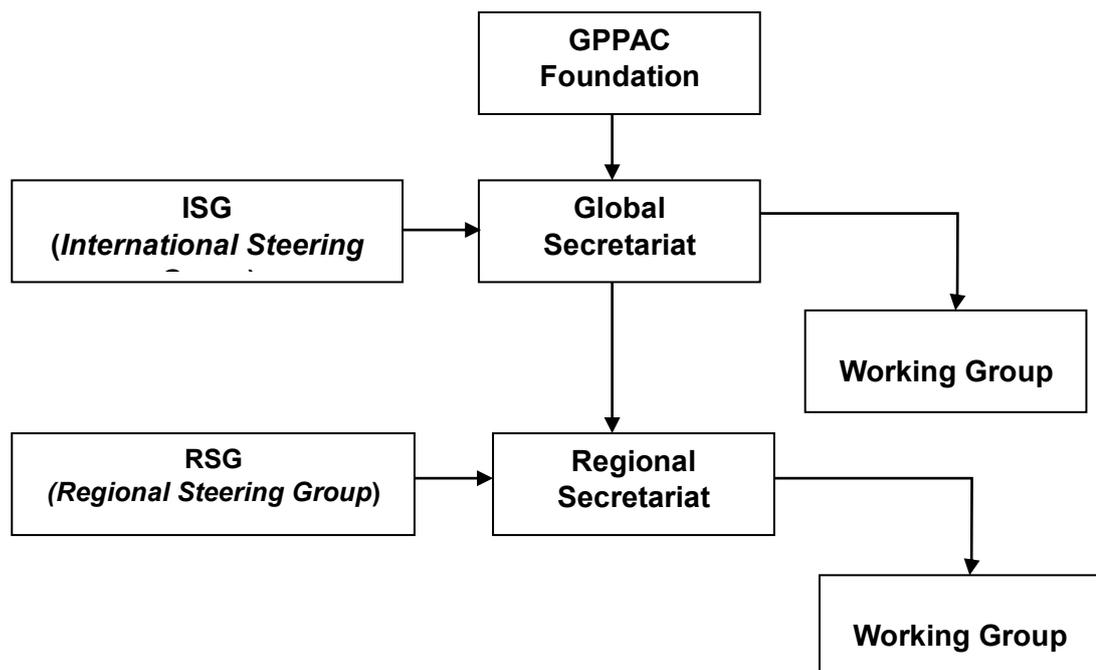
Regional Secretariat memainkan peran yang sangat penting dalam upaya resolusi konflik guna mencegah terjadinya konflik bersenjata dan kekerasan di Kawasan. Untuk menjalankan tugasnya, GPPAC kawasan memberikan mandat kepada *working group* yang menjadi bagian dari GPPAC kawasan. Adapun *working group* ini terdiri dari organisasi masyarakat sipil yang anggotanya memiliki berbagai latar belakang baik akademisi, ahli, dan mantan petinggi pemerintahan. Saat ini, GPPAC memiliki sekitar 15 *regional secretariat* yang meliputi wilayah Amerika Latin & Karibia, Amerika Utara, Eropa Barat, Eropa Tenggara yang meliputi negara Balkan, Eropa Timur, Kaukasus, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur Laut, Kepulauan Pasifik, Timur Tengah & Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah & Timur, dan Afrika Selatan (GPPAC Charter: 2017).

Seluruh jaringan tersebut bekerja dengan didasarkan kepada isu keamanan dan konflik di kawasan masing-masing. Apabila merujuk kepada konflik di Semenanjung Korea, GPPAC NEA (*Northeast Asia*) merupakan jaringan yang menginisiasi proses perdamaian antara kedua Korea. GPPAC NEA diluncurkan pada tahun 2005 di Jepang dan pada tahun 2006 mulai meluncurkan *regional work plan* terkait perdamaian di Semenanjung Korea (<https://www.peaceportal.org/web/gppac-northeast-asia/gppac-nea>, diakses 4 November 217). GPPAC *North East Asia* mencoba untuk menginisiasi perdamaian di kawasan yang masih sangat terkarakterisasi oleh struktur perang dingin dan dihadapkan oleh beberapa krisis seperti ancaman nuklir dan juga sengketa wilayah. Tujuan utama dari GPPAC NEA ialah untuk menguatkan ikatan masyarakat sipil dan membuka komunikasi dengan pemerintah terkait masalah keamanan dan perdamaian di kawasan (<https://www.peaceportal.org/web/gppac-northeast-asia/gppac-nea>, diakses 4 November 217).

Masih kentalnya pengaruh perang dunia II dan perang dingin di kawasan Asia Timur menjadikan perkembangan masyarakat sipil cukup

terhambat. Masalah terkait ancaman dan keamanan menjadi isu yang paling besar di kawasan, hal ini berpengaruh kepada komunitas masyarakat sipil di kawasan yang lebih banyak fokus terhadap upaya resolusi konflik yang sifatnya lebih bertujuan preventif yakni agar konflik tidak tereskalasi hingga terjadi perang dan kekerasan di kawasan. Dalam menjalankan fungsinya, GPPAC NEA memberikan mandat kepada beberapa *working group* yang antara lain *Peace Boat* dan *Blue Banner* untuk menjalankan proses dialog dan pertemuan membahas mengenai kemungkinan perdamaian di Semenanjung Korea. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas, struktur GPPAC kawasan dan global dapat dilihat melalui gambar berikut:

Bagan 4.1. GPPAC Networking



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2017)

4.2. Analisis Data dan Hasil Penelitian

4.2.1. Proses Dialog oleh *Track I*

Proses resolusi konflik di Semenanjung Korea melalui pendekatan yang sifatnya *G to G* bukan tidak pernah dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa proses ini sudah pernah dilakukan oleh Korea Utara dan juga Korea Selatan beberapa waktu yang lalu. Mekanisme pendekatan pun dilakukan dengan berbagai macam cara baik melalui mekanisme ekonomi, sosial budaya, dan juga politis. Namun, pergantian kepemimpinan khususnya di Korea Selatan dan Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang berpengaruh di Semenanjung Korea turut berimplikasi terhadap proses rekonsiliasi dan upaya perdamaian antara Korea Utara dan Selatan. Oleh karena itulah, tidak jarang proses *track I* seringkali mengalami kegagalan. Salah satu kegagalan *track I* dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea ialah ketika proses *six party talk* tidak lagi efektif dan terhenti ketika Korea Utara memutuskan untuk keluar dari perundingan tersebut di tahun 2009. Terhentinya perundingan tersebut otomatis menjadikan proses perdamaian dalam rana *track I* sudah tidak lagi dapat diharapkan.

Menurut Wibisono (Wawancara, 14 September 2017) menyatakan bahwa kegagalan dalam proses *six party talk* tersebut tergantung kepada pendekatan dan mekanisme yang dilakukan. Mengingat, pada awalnya *six party talk* dibentuk karena adanya kepekaan dan kesediaan anggota *six party talk* yakni Korea Selatan, Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan Rusia untuk membantu kekurangan Korea Utara dari sisi ekonomi, kesehatan, energi, dan lain sebagainya. Namun, seiring berjalannya waktu negara-negara *six party talk* tidak memenuhi janji yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, desakan negara *six party talk* agar Korea Utara menghentikan seluruh kegiatan militernya semakin membuat posisi Korea Utara terpojok. Sanksi-sanksi pun banyak diberikan dengan harapan jika kondisi Korea Utara semakin terpuruk maka pertimbangan politiknya ialah akan terjadi pergantian atau perubahan rezim di Korea Utara. Namun,

kenyataannya ialah *resilience* Korea Utara sangat kuat ditengah kesulitan negaranya dan sanksi oleh dunia Internasional.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa posisi *six part talk* bukan merupakan upaya untuk inisiasi perdamaian namun lebih banyak berkaitan dengan urusan *national/ state security* dan keinginan negara-negara besar untuk mengubah rezim yang ada di Korea Utara. Hal ini didukung Van Tuijl (Wawancara, 13 Oktober 2017) bahwa tidak jarang *track I* tidak memberikan solusi dan sangat kecil pengaruhnya dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea. Hal ini tidak lain dikarenakan hubungan yang dibangun dalam level tersebut sifatnya "*polirizing*" atau terpolarisasi. Negara besar tentu akan mengambil alih proses dialog dan sebisa mungkin akan mengarahkan dialog tersebut sesuai dengan kepentingan mereka. Jane (Wawancara, 17 September 2017) juga berpendapat bahwa tidak jarang dalam proses *track I* baik Korea Utara dan Selatan tidak bebas untuk mengutarakan pendapatnya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip utama dalam resolusi konflik yang perlu untuk mendengarkan dan melihat banyak perspektif agar melahirkan banyak opsi, sehingga kemungkinan rekonsiliasi dan perdamaian pun akan semakin besar.

Malik (*Forum Group Discussion* LEMHANAS, 25 Juli 2017) mengatakan bahwa proses perdamaian memiliki dua muka yakni tujuan dan proses. Jika melihat pada sistem Internasional yang ada, perdamaian tidak akan pernah menjadi tujuan karena bagi *track I* khususnya proses untuk berdamai itulah yang menjadi lebih penting. Selama ini proses perdamaian di Semenanjung Korea terkesan *stagnant* atau tidak bergerak kerana pada dasarnya dialog tidak akan pernah efektif jika diplomasi yang dilakukan tetap bersifat *stick and carrot*. Pendapat tersebut didukung oleh Kussuji (*Forum Group Discussion* LEMHANAS, 25 Juli 2017) yang menyatakan bahwa *track I* akan sulit jika digunakan sebagai mekanisme penyelesaian konflik di Semenanjung Korea karena hubungan Korea Utara dan Selatan banyak dipengaruhi oleh kepentingan negara adikuasa seperti Tiongkok dan Amerika Serikat di Kawasan. Hubungan yang "saling

menggoda” antara Korut dan Korsel, dimana ketika Korea Utara melakukan uji coba nuklir atau rudal, maka Korea Selatan akan meresponnya dengan melakukan kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Hal ini mengakibatkan kondisi *arm race* tidak dapat dihindari dan turut menyumbang ketegangan di Semenanjung Korea.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya proses perdamaian di Semenanjung Korea dalam rana *track I* atau *G to G* tergantung pada lingkungan geopolitiknya. Selain itu menurut Pattiradjawane (*Forum Group Discussion LEMHANAS, 25 Juli 2017*), yang mempengaruhi kegagalan *track I* ialah sifat populis diplomasi Amerika Serikat yang sangat transaksional. Hal itu akan semakin membuat posisi Amerika Serikat kehilangan kekuatan secara diplomatis dalam proses *track I Diplomacy*. Sehingga, akan sangat susah untuk memulai kembali proses *six party talk* karena forum tersebut sudah lama terhenti dan sanksi-sanksi yang diberikan kepada Korea Utara memungkinkan negara tersebut akan skeptis kepada proses *six party talk* apabila dimulai kembali.

Selain itu, upaya untuk perdamaian melalui opsi politik juga akan lebih susah setelah terjadi pergantian rezim baik di Korea Utara maupun Korea Selatan. Apabila berbicara dalam rana politik negara, maka menurut Widjajanto (*Forum Group Discussion LEMHANAS, 25 Juli 2017*) satu-satunya opsi yang dapat dilakukan ialah opsi militer. Adapun opsi ini merupakan kemungkinan opsi paling buruk kerana bisa memunculkan kepanikan oleh Korea Utara sehingga meluncurkan berbagai macam senjata yang masih belum memiliki kendali yang baik, sehingga bisa saja meluncur kemanapun tanpa target yang jelas. Jika opsi ini yang digunakan, maka yang terjadi ialah Perang terbuka untuk unifikasi Korea dan menggulingkan rezim yang ada.

Opsi militer tersebut merupakan opsi terburuk yang hanya terjadi apabila melibatkan *track I*. Namun, opsi terburuk tersebut sebisa mungkin harus dihindari, dimana apabila masih ada opsi lain yang bisa dipilih mengapa harus dengan menggunakan opsi militer. Dalam hal ini, strategi dan taktik untuk menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea tidak

harus dihadapi secara linier yakni hanya melihat peran dari *track I* saja namun juga harus melihat aspek internasional dan aktor perdamaian secara luas.

Prinsipnya, perdamaian bukan hanya urusan negara namun juga merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup dalam suasana tenang dan tanpa gangguan. Perdamaian merupakan *nature* manusia, dan banyak cara untuk mendapatkan perdamaian yang diinginkan. Oleh karena itulah, perdamaian bukan hanya tanggung jawab negara, atau individu saja namun juga tanggung jawab manusia sebagai makhluk universal. Upaya perdamaian dalam bingkai *track I diplomacy* tidak efektif karena dipengaruhi oleh kepentingan nasional negara-negara yang terlibat. Oleh karenanya, opsi lain yang dapat diupayakan untuk menginisiasi perdamaian di Semenanjung Korea ialah melalui track II yakni melalui pendekatan *people to people* yang mengedepankan hubungan formal atau informal melalui budaya dan dialog serta mengedepankan *human security* bukan lagi *national security*. Menurut Malik (Wawancara, 05 Desember 2017), upaya tersebut dapat membuka peluang yang lebih besar untuk memulai proses perdamaian di Semenanjung Korea melalui rana yang paling bawah yakni *grassroot*.

4.2.2. Bentuk Keterlibatan CSO (*Civil Society Organization*)

Merupakan hal yang sangat tidak mungkin untuk menyelesaikan sebuah konflik dengan hanya menggunakan rana negara saja atau *track I*. Dalam pengertian bahwa *C to C* atau *Community to Community* juga bisa menjadi cara yang menarik untuk membangun perdamaian ditengah proses perdamaian melalui level *track I* yang sudah terhenti. Keterlibatan CSO (*Civil Society Organization*) dalam upaya perdamaian di Semenanjung Korea menjadi sebuah harapan baru bagi terbentuknya rekonsiliasi kedua negara melalui level *track II*. Menurut Wibisono (Wawancara, 14 September 2017), masyarakat sipil merupakan kekuatan yang dahsyat dan mereka berusaha agar sebuah konflik tidak terjadi dan tereskalasi ke tingkat yang lebih besar hingga memicu kekerasan. Apabila

gerakan masyarakat sipil tersebut beresatu maka hal tersebut bisa menjadi faktor penggerak bagi *track I*.

Masyarakat sipil merupakan bagian yang sangat dinamis dan membuka pintu ruang dialog bagi pihak yang berkonflik. Secara jelas Wibisono (Wawancara, 14 September 2017) menyatakan bahwa “saya pesimis terhadap track I, jika pesimis juga terhadap track II maka kepesimisan tersebut akan mendorong terjadinya peperangan”. Dengan demikian, *2nd track* bisa menjadi sebuah *opportunity* ditengah kebuntuhan yang ada. Hal ini karena masyarakat sipil merupakan bagian yang sangat dinamis dan mampu untuk memberikan pandangan serta perspektif yang luas. Apabila Negara atau *track I* bekerja sesuai dengan kaedah institusi dan kenegaraan, maka CSO tidak ada batasan untuk mencari ide dan trobosan, sehingga memungkinkan terjadinya hal-hal yang baru yang mungkin belum pernah terbayangkan atau terpikirkan sebelumnya.

Malik (Wawancara, 05 Desember 2017) mengatakan bahwa saat ini proses inisiasi perdamaian oleh masyarakat sipil dilakukan bukan dengan *grand design planning* yang sifatnya “*truth reconciliation*”, melainkan dilakukan dalam bentuk-bentuk yang parsial namun tetap mengarah pada satu tujuan yakni perdamaian di Semenanjung Korea. Menurut Malik (Wawancara, 05 Desember 2017) terdapat empat hal yang paling penting dalam inisiasi perdamaian melalui level *people to people* atau *grassroot* antara lain ialah:

- a. *Family Reunion* atau Reuni Keluarga yang terpisah akibat Perang di tahun 1950-an
- b. *Joint Economic Activity* melalui pengembangan *Kaesong Industrial Complex*
- c. Pertemuan budaya Korea Utara dan Selatan
- d. Gerakan wanita dalam upaya *peacebuilding* atau *Female Peacebuilder*

Baik Korea Utara maupun Korea Selatan, CSO yang berpartisipasi dalam proses inisiasi perdamaian banyak berasal dari lembaga perguruan tinggi. Di Korea Utara misalnya, terdapat KNPC (*Korea National Peace Committee*) yang basisnya berasal dari para akademisi atau Universitas

meskipun mereka bekerja di bawah pemerintah namun KNPC masih membuka peluang dialog tetapi basisnya tetaplah melalui Universitas.

Menurut Van Tuijl (Wawancara, 13 Oktober 2017), secara umum yang ingin dicapai oleh masyarakat sipil dalam upaya inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea ialah terciptanya *peace agreement* oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Kemudian apabila perjanjian tersebut telah tercapai, diharapkan dapat terbangun *regional peace rezim* dan meminimalisir pengembangan dan juga penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Timur atau *East Asia Nuclear Freezone*. Adapun bentuk keterlibatan masyarakat sipil untuk menginisiasi perdamaian di Semenanjung Korea dilakukan dengan cara *working group dialog* dan *mediation*. Hal ini penting untuk dilakukan guna membangun *trust* diantara pihak yang berkonflik. Jika sudah terbangun *trust* tersebut maka akan lebih mudah untuk menemukan *we-ness* atau *together-ness*. Hal inilah yang diharapkan mampu terwujud melalui proses dialog yang diinisiasi oleh masyarakat sipil (Malik, Wawancara, 5 Desember 2017).

Belajar dari konflik di Maluku Indonesia, proses perdamaian dimulai melalui dialog oleh masyarakat sipil dan akademisi hingga memunculkan perasaan *we-ness* melalui prinsip tradisional atau kearifan lokal masyarakat yang diistilahkan sebagai *pela-gandong* yang artinya persaudaraan-sekandung (Malik, 2017: 168-169). Hal yang sama juga berusaha untuk diaplikasikan di Semenanjung Korea dimana proses dialog dan juga negosiasi yang dilakukan diharapkan dapat memunculkan *cheong* atau *shimcheong* yang merupakan istilah untuk menggambarkan hubungan emosional diantara orang Korea sehingga memunculkan rasa *we-ness* atau kekitaan (Sang-Chin Choi, Gyuseong Han, 2008: 205-206).

Seperti yang telah dijelaskan oleh Wibisono (Wawancara, 14 September 2017) bahwa masyarakat sipil apabila bergabung sebagai sebuah jaringan, maka posisinya akan cukup kuat untuk mendorong pihak yang ada khususnya *track I* untuk memulai kembali proses perdamaian di Semenanjung Korea. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Malik (Wawancara, 5 Desember 2017) bahwa saat ini CSO di Semenanjung

Korea tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah maka mereka harus mampu membangun jaringan dengan CSO Internasional yang memiliki afiliasi dan kelompok multilateral lainnya seperti PBB dan juga organisasi regional lainnya. Hal tersebut diharapkan mampu memberikan tekanan yang lebih besar dan kuat yang dapat mendorong *track 1* untuk memulai kembali proses dialog.

Dalam menginisiasi perdamaian di Semenanjung Korea, GPPAC berusaha untuk membangun *trust* pihak yang berkonflik dengan melibatkan mereka dalam sebuah proses dialog dan mediasi. Menurut Van Tuijl (Wawancara, 13 Oktober 2017), sangat susah untuk membangun kepercayaan kepada KNPC atau Korea Utara dimana perlu waktu lama hampir lebih dari 1 tahun hingga akhirnya mereka ikut berpartisipasi dalam dialog yang dilakukan di Ulaanbatar, Mongolia. Hingga saat ini, proses dialog tersebut telah berlangsung tiga kali yakni di tahun 2015, 2016, dan terakhir di tahun 2017. Dalam proses keterlibatannya, GPPAC melakukan inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea melalui empat aspek yakni regional, formal, pendekatan jangka panjang (terus melakukan pertemuan berkala), dan konsistensi komitmen. Untuk itu, agar efektif GPPAC juga melakukan pendekatan formal dan inter-kawasan dengan mencoba menggandeng UNICEF, WHO, dan organ PBB lainnya dalam menjalankan inisiasinya.

Untuk menjalankan kegiatannya, proses dialog dan mediasi oleh GPPAC di Semenanjung Korea diatur oleh *Peace Boat* dan *Blue Banner* yang mana seluruh anggotanya mayoritas berlatar belakang akademisi dan para ekspertis atau ahli. Tujuan yang paling penting dalam proses dialog tersebut ialah bagaimana menciptakan ruang untuk dialog di kawasan Asia Timur yang melibatkan dua pihak berkonflik yakni Korea Utara dan Selatan. Adapun proses dialog tersebut menjadi sebuah awal dari kedua Korea untuk bertemu dalam satu forum bersama tanpa adanya kekangan dan intervensi dari negara-negara besar. Menurut Jane (Wawancara, 17 September 2017), GPPAC ialah jaringan masyarakat global dan kawasan yang mampu untuk membawa kedua Korea berada

dalam satu meja yang mana dalam *normal political setting* kedua pihak ialah *completely enemy* dan bahkan mereka tidak diperbolehkan bertemu satu sama lainnya. Ulaanbatar dialog menjadi ruang dimana kedua belah pihak dapat bertemu secara berkala dan dapat membawa mereka bersama-sama untuk melanjutkan pertemuan dan percakapan setiap saat. Seperti yang dikutip dalam pernyataan Jane (Wawancara, 17 September 2017) bahwa:

“there is a real sense of understanding and trust and friendship in the room as well, which is allowing discussion on very sensitive issues which may be in a more official setting you would not be possible at all to speak about it”.

Proses pertemuan dan dialog seperti itu diharapkan akan membangun rasa kebersamaan atau *cheong* yang sebelumnya dinyatakan oleh Malik (Wawancara, 5 Desember 2017). Meskipun dalam dialog tersebut membahas banyak hal dan tidak hanya khusus membahas mengenai masalah di Semenanjung Korea, namun setidaknya kedua belah pihak yakni Korea Utara dan Korea Selatan dapat dipertemukan dalam satu forum. Dengan demikian, dialog Ulaanbatar menjadi salah satu fasilitator dan turut mendorong terbangunnya rasa kebersamaan serta *cheong* atau *simcheong* yang mungkin sudah lama hilang akibat konflik. Strategi tersebut oleh Malik (Wawancara, 5 Desember 2017) diistilahkan sebagai “strategi bubur panas” yakni tidak langsung ke inti permasalahan tetapi setidaknya kedua belah pihak bertemu dan saling berinteraksi satu sama lain meskipun dalam dialog tersebut membahas berbagai macam isu keamanan lainnya di kawasan Asia Timur.

4.2.3. Dinamika Serta Tantangan GPPAC

Konflik di Semenanjung Korea merupakan salah satu konflik yang berkepanjangan dan hingga sampai saat ini masih belum menemukan titik penyelesaian. Kompleksitas hubungan antar aktor di kawasan yakni Korea Utara, Koera Selatan, Amerika Serikat, dan Tiongkok membuat proses penyelesaian konflik semakin sulit untuk dilakukan. Merujuk pada

pendapat dari Wibisono (Wawancara, 14 September 2017) yang menyatakan jika salah satu yang menjadikan kawasan tersebut sangat rawan ialah adanya kenyataan bahwa Korea Utara menghadapi *statement-statement* permusuhan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Tercatat beberapa kali secara spesifik Amerika Serikat menyatakan bahwa Korea Utara adalah *rock state* yaitu negara yang patut untuk dibinasakan.

Masalah yang kemudian muncul ialah, untuk negara yang sudah mendapatkan ancaman seperti itu maka mereka akan mencari cara untuk *survive*. Menurut Wibisono (Wawancara, 14 September 2017) merujuk pada hukum internasional pasal 51 menyatakan bahwa diperbolehkan untuk menggunakan cara peperangan dan kekerasan dalam rangka *self defense* atau mempertahankan diri. Sehingga, selama ada situasi yang dianggap sebagai sebuah ancaman maka Korea Utara bisa melakukan persiapan untuk menggunakan cara-cara militer. Dengan demikian, jika didasarkan pada hukum justifikasi hal tersebut diperbolehkan.

Arm race atau perlombaan persenjataan di Semenanjung Korea yang hingga saat ini masih berlangsung dengan intensitas yang cukup tinggi merupakan hasil dari kegagalan kedua negara untuk mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea. Sehingga, secara administratif kedua pihak masih dalam status berperang. Kondisi inilah yang ingin dirubah oleh masyarakat sipil dalam hal ini GPPAC, dimana untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik di kemudian hari maka perdamaian di Semenanjung Korea merupakan hal yang *urgent* dan perlu untuk diupayakan. Hal ini serupa dengan pendapat yang diutarakan oleh Van Tuijl (Wawancara, 13 Oktober 2017) yang menyatakan bahwa permasalahan di Semenanjung Korea merupakan hal yang *urgent* karena konflik tidak dapat diprediksi dan bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Apabila konflik tersebut pecah menjadi perang bersenjata maka yang akan terjadi ialah *massive negative impact* dan tentu akan berpengaruh kepada stabilitas keamanan global. Untuk itu, sebelum terjadi hal tersebut, tindakan preventif merupakan hal yang perlu untuk diupayakan yang mana salah satu bentuk dari tindakan preventif tersebut ialah dengan

mengupayakan iniasi perdamaian di semenanjung Korea oleh *track II* ditengah kebuntuan *track I*.

Meskipun demikian, upaya yang dilakukan bukannya tanpa dinamika dan tantangan. Berdasarkan pernyataan dari Malik (*Forum Group Discussion LEMHANAS*, 25 Juli 2017) menyatakan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam upaya perdamaian di Semenanjung Korea. Salah satu diantaranya yang sangat kuat ialah terkait masalah “*collective memory*” baik Korea Utara dan juga Selatan yang keduanya merasa menjadi korban dari Perang. Selaras dengan pendapat dari Jane (Wawancara, 17 September 2017) bahwa Semenanjung Korea merupakan salah satu wilayah yang hubungan antara negaranya masih banyak dipengaruhi oleh ingatan masa lalu terkait perang. Hal ini lah yang kemudian mempengaruhi hubungan diplomatik negara kawasan Asia Timur yang tidak terlalu terjalin dengan baik. Tidak mudah untuk menghapus ingatan permusuhan tersebut, dan tentunya perlu waktu yang cukup lama.

Adapun dinamika serta tantangan lainnya yang dihadapi oleh GPPAC dalam proses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea menurut Van Tuijl (Wawancara, 13 Oktober 2017) diantaranya ialah semakin mengecilnya kelompok masyarakat di Korea Selatan khususnya generasi muda yang menginginkan reunifikasi di Semenanjung Korea. Selain itu, untuk membangun kepercayaan dengan Korea Utara sangatlah susah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Meskipun demikian, melalui pendekatan ke Universitas GPPAC telah mendapatkan kepercayaan dari CSO yang ada di Korea Utara dan memungkinkan mereka untuk ikut dalam proses dialog yang dilakukan.

Dinamika lain yang dialami oleh GPPAC dalam inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea ialah terkait masalah pendanaan. Banyak pendonor yang berpikir ulang untuk memberikan sumbangan dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea. Banyak diantara mereka yang “skeptis” terhadap Korea Utara dan menganggap bahwa Korea Utara

merupakan negara yang buruk yang selalu mendapatkan sanksi dari dunia Internasional.

Selain itu, tindakan provokasi Donald Trump terhadap Korea Utara beberapa waktu yang lalu menjadikan intensitas ketegangan di Semenanjung Korea meningkat. Hal ini lah yang sebetulnya ingin dihindari, dimana ketegangan dan provokasi kecil bisa saja suatu saat menjadi besar dan membuka pintu peluang terjadinya konflik yang berujung pada kekerasan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Malik (Wawancara, 5 Desember 2017) bahwa kepemimpinan seseorang dalam suatu negara memiliki peran yang cukup penting dalam sebuah proses rekonsiliasi. Trobosan oleh pemimpin merupakan hal yang paling penting dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea pada saat ini.

Meskipun demikian, ditengah tantangan dan dinamika yang dihadapi GPPAC tetap mengupayakan inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea dengan melibatkan jaringan masyarakat sipil di kawasan dan tentunya mengikutsertakan baik Korea Utara dan Selatan dalam satu forum dialog. Bagi Van Tuijl (Wawancara, 13 Oktober 2017), kehadiran masyarakat sipil sebagai bagian dari *track II* merupakan sebuah alternatif untuk mendukung *track I* yang sudah terhenti sejak lama. Namun, upaya yang dilakukan oleh *track II* tidak akan cukup untuk benar-benar mampu menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea, karena tujuan awal dari *track II* sendiri menginisiasi perdamaian melalui dialog untuk mencegah agar konflik tidak tereskalasi dan menghindari konflik bersenjata di kawasan. Namun, tetap mendorong agar pemerintah dalam hal ini *track I* kembali berfungsi dan memulai kembali dialog untuk rekonsiliasi dengan satu tujuan yang sama yakni perdamaian bukan hanya terkait *national security* saja. Oleh karenanya, upaya yang dilakukan oleh *track II* haruslah berjalan beriringan dengan *track I* karena pada dasarnya kedua pendekatan tersebut merupakan sebuah kombinasi yang kuat untuk menciptakan perdamaian. Jika *track II* bergerak pada level yang sifatnya non-formal dengan melakukan pendekatan melalui *grassroot*, maka *track I* bergerak pada level formal yang mengupayakan

perdamaian dari sisi kebijakan strategis berdasarkan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Keterlibatan GPPAC dalam Inisiasi Proses Perdamaian di Semenanjung Korea

Ketegangan yang semakin hari kian meningkat di Semenanjung Korea antara Korea Utara dan Selatan dapat menjadi sebuah ancaman bagi keamanan dan perdamaian dunia. Ketegangan di Semenanjung Korea tidak lain merupakan keberlanjutan dari Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950 dan berakhir pada tahun 1953 setelah kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata. Lebih dari 60 tahun berakhirnya perang Korea, kedua negara masih belum menyepakati perjanjian damai.

Dengan demikian, secara administratif kedua negara masih dalam status berperang. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan persepsi ancaman kedua belah pihak, sehingga perlombaan senjata dan provokasi pun tidak dapat dihindari. Apabila hal tersebut terus terjadi dan berulang-ulang dengan intensitas yang cukup tinggi, maka bukan tidak mungkin perang akan ekan kembali terjadi di Semenanjung Korea. Oleh karena itu, merujuk pada konsep *preventive diplomacy* maka perlu adanya upaya untuk mencegah agar konflik tersebut tidak tereskalasi dan berdampak bagi stabilitas keamanan global dengan cara-cara yang diplomatis atau *non-violence*.

Untuk itu, beberapa kali dilakukan upaya untuk melakukan proses perdamaian di Semenanjung Korea. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan menyelenggarakan perundingan *six party talk* dengan melibatkan enam negara yakni Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara. Namun, perundingan tersebut resmi dihentikan pada tahun 2009 setelah Korea Utara memutuskan untuk keluar, sehingga sampai saat ini masih belum ada interaksi diplomatik yang serius untuk mencari solusi damai.

Gagalnya perundingan *six party talk* memberikan implikasi terhadap semakin memanasnya hubungan kedua negara. Hubungan kedua negara kian meningkat ketika Amerika Serikat bersama dengan Korea Selatan bekerjasama untuk membangun Instalasi Sistem Perlindungan Rudal Baru atau *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) dan pengiriman kapal perang *Carl Vinson* di perairan semenanjung Korea untuk mengantisipasi program uji coba nuklir dan rudal balistik Korea Utara (Noerper, *Comparative Connection Pasific Forum CSIS*, Vol. 19, No. 1, May 2017 : 36). Disisi lain, dibangunnya THAAD juga mendapatkan respon yang kurang baik dari Tiongkok karena dianggap sebagai ancaman kepentingan strategisnya (*Institute for Security & Development Policy*, Oktober 2017). Selain itu, Jepang yang juga menjadi salah satu bagian dari *security umbrella* Amerika Serikat bersama dengan Korea Selatan juga cenderung tidak lagi mampu menahan diri dari perang.

Perkembangan konflik di semenanjung Korea beberapa tahun terakhir memang cenderung susah untuk diprediksi dan eskalasi yang terus meningkat perlu dilakukan langkah antisipasi atau *preventive*. Perselisihan Korea Utara dan Selatan perlu mendapatkan perhatian khusus karena merupakan ancaman bagi kawasan Asia dan global. Tercatat pada masa pemerintahan Kim Jong Un, Korea Utara beberapa kali telah melakukan uji coba nuklir yakni di tahun 2013, 2016, dan 2017. Korea Utara merupakan negara komunis yang meskipun lemah secara ekonomi, namun memiliki kemampuan rudal dan nuklir yang memiliki daya jelajah cukup jauh. Hal ini berbeda dengan Korea Selatan yang menganut paham demokrasi dan memiliki kekuatan ekonomi nomor 12 di dunia, sedangkan dari sisi militer Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat. Perbedaan politik dan adanya campur tangan kepentingan eksternal (Amerika Serikat) menjadi salah satu kendala untuk perwujudan perdamaian di semenanjung Korea melalui level *track I* atau melibatkan negara. Tercatat beberapa kali dilakukan upaya resolusi konflik di Semenanjung Korea melalui level *track I* yang antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Tahun 1994 dilakukan penandatanganan kesepakatan antara pemerintah Korea Utara dan Amerika Serikat mengenai penghentian program nuklir dan pemberian bantuan ekonomi untuk Korea Utara. Namun program tersebut gagal karena tidak adanya komitmen yang kuat dari kedua belah pihak
- b. Tahun 1998 Korea Selatan menginisiasi dilakukannya reunifikasi Korea melalui dialog bilateral, investasi ekonomi, dan lain sebagainya. Adapun inisiasi tersebut terwujud dalam kebijakan *sunshine policy*, namun kembali lagi gagal setelah terjadi perubahan arah kebijakan Korea Selatan karena adanya perubahan kepemimpinan dari Lee Myung Bak ke Park Geun Hye serta adanya aksi militer yang dilakukan oleh Korea Utara
- c. Tahun 2003-2012 membentuk *six party talk* sebagai kerangka diplomasi multilateral untuk mewedahi kekuatan besar yang berkepentingan untuk membicarakan langkah strategis menuju perdamaian di Semenanjung Korea. Namun upaya ini mengalami kegagalan karena komitmen yang lemah dari negara yang terlibat, sehingga forum tersebut tidak menghasilkan efektifitas. Mengingat dalam forum tersebut, negara yang terlibat memiliki kepentingan nasional masing-masing.

Pada tahun 2017, percobaan nuklir dan uji coba senjata balistik serta rudal semakin intensif namun sebagian diantaranya mengalami kegagalan baik karena tidak mencapai target sasaran atau meledak tidak sesuai dengan perhitungan. Namun, kegagalan tersebut justru semakin menjadi motivasi bagi Korea Utara untuk terus mengembangkan kemampuan persenjataan yang dimiliki. Korea Utara beberapa kali meluncurkan satu peluru kendali yaitu *Hwasong-4* yang di *claim* mampu mencapai alaska dan mencapai titik selatan pulau Jawa Indonesia.

Rasa ketidakpercayaan, curiga, ancaman, retorika, dan segala rasa ketakutan akan eskalasi militer yang sewaktu-waktu dapat terjadi di Semenanjung Korea merupakan sebuah *lock point* akibat interaksi politik era perang dingin pada masa lampau. Lingkungan geopolitik yang

semakin fluktuatif dimana sikap pemerintah Amerika Serikat yang kian agresif terhadap Korea Utara menjadikan Semenanjung Korea menjadi sebuah titik rawan akan terjadinya perang. Jika fenomena tersebut di lihat dalam sebuah sudut pandang perdamaian, bisa dikatakan bahwa ketidakstabilan di Semenanjung Korea terjadi akibat kurangnya komitmen serta keberlanjutan terkait visi bersama tentang masa depan yang damai dan aman.

Merujuk pada konsep *diplomacy preventif* Ramcharan (2008), situasi keamanan di Semenanjung Korea antara Korea Utara dan Selatan menjadi sebuah hal yang sifatnya *urgent* dan perlu untuk diselesaikan. Konfrontasi dan tindakan saling mengancam kedua belah pihak yang terjadi secara berkala merupakan sebuah *erly warning* bagi pihak terkait untuk bersama-sama mencari solusi alternatif resolusi konflik ditengah kenyataan bahwa proses perundingan dan dialog dalam level *track* sudah tidak lagi berjalan. Fakta tersebutlah yang kemudian memunculkan sebuah alternatif untuk melibatkan masyarakat sipil untuk ikut berperan dalam proses resolusi konflik di Semenanjung Korea melalui pendekatan *track II* dengan menysasar *grassroot*.

Sejak terhentinya *six party talk* di tahun 2009, masyarakat sipil mencoba untuk melakukan insiatif yang menjadi langkah awal untuk membangun kembali dialog dalam level *track II* yang sebelumnya terhenti di level *track I*. Pada dasarnya, proses inisiasi perdamaian oleh masyarakat sipil dilakukan secara *parsial* atau bukan dalam satu bentuk *grand design reconciliation*. Adapun bentuk-bentuk bagaimana masyarakat sipil dilibatkan dalam proses inisiasi perdamaian diantaranya ialah dengan menginiasi pertemuan keluarga oleh Palang Merah Internasional, pertukaran budaya, dan dialog-dialog lainnya. Meskipun dilakukan secara parsial, hal tersebut tetap mengindikasikan bahwa masih ada komitmen yang kuat dari masyarakat sipil untuk berusaha mencairkan ketegangan dan menyelesaikan konflik dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih sosial dan kemanusiaan. Hal ini sesuai

dengan teori Resolusi Konflik yang menyatakan bahwa untuk mencapai sebuah resolusi maka perlu adanya komitmen pihak yang ada untuk bersama-sama mencari jalan keluar untuk menghasilkan *win-win solution*. Adapun solusi yang sifatnya *win-win* tersebut tergantung pada konstelasi kepentingan pihak yang terlibat (Jeong, 2010:11).

Dari sini bisa dikatakan bahwa masyarakat sipil dengan pendekatan *grassroot* dirasa menjadi pilihan alternatif yang tepat untuk proses resolusi konflik di Semenanjung Korea. Posisi masyarakat sipil dirasa akan lebih sesuai karena tidak memiliki banyak kepentingan politis. Hal ini berbeda dengan *track 1* yang tentu dalam proses perundingannya banyak didasarkan kepada pertimbangan *cost and benefit* terkait *national interest* yang dimiliki oleh masing-masing negara. Hal ini lah yang menjadikan proses dalam level *track 1* tidak efektif dan pada akhirnya terhenti karena adanya satu pihak yang bisa saja merasa tidak puas dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam keterlibatannya, masyarakat sipil biasanya menggunakan cara-cara yang sifatnya *non-confrontation* atau lebih banyak melalui kegiatan kemasyarakatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar CSO yang ada mampu untuk mengikat masyarakat sipil atau CSO dinegara yang menjadi pihak berkonflik ke dalam sebuah *framework* yang sama, dengan harapan akan tercipta *trust* dan *mutual understanding*. Hal ini sesuai dengan teori resolusi konflik itu sendiri yang menyatakan bahwa hal mendasar dan yang paling penting dalam upaya resolusi konflik guna mencapai sebuah rekonsiliasi ialah membangun *mutual understanding* dan *trust* terlebih dahulu (Jeong, 2010: 193). Proses membangun kepercayaan bukanlah hal yang mudah, perlu adanya proses yang cukup panjang.

Salah satu CSO yang terlibat dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea antara lain ialah AFSC (*American Friends Service Committee*) yang merupakan organisasi masyarakat sipil yang berkerja untuk perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan untuk seluruh

masyarakat. Menurut Lucy (2017), AFC merupakan salah satu masyarakat sipil yang turut membangun *trust* dan *understanding* di Korea Utara. AFSC pertama kali terlibat dalam misi di Korea Utara pada tahun 1950. Pada saat itu yang menjadi fokus utama ialah menyediakan banyak kebutuhan utama untuk mendukung masyarakat di Korea Utara yang hidup dalam masa sulit akibat perang. Keterlibatan AFSC dengan Korea Utara dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata dimana secara umum memang menghentikan kekerasan namun secara resmi atau *official* mengakhiri Perang Korea (Lucy: 2017).

AFSC pada mulanya merespon himbauan dari PBB untuk memberikan bantuan kepada hampir lebih dari 33.000 pengungsi yang tidak memiliki tempat tinggal atau *displaced koreans*. Untuk itu, AFSC menginisiasi kampanye "*Houses for Korea*" atau rumah bagi Korea yang menyiapkan berbagai macam material untuk merekonstruksi tempat tinggal dan menyediakan peralatan pertanian untuk mendukung kehidupan masyarakat yang sebagian besar ialah pertanian. Namun demikian, semakin memburuknya hubungan antara Amerika Serikat dengan Korea Utara, AFSC pada akhirnya dipulangkan (Lucy: 2017).

Pada tahun 1994, Korea Utara mengalami kemerosotan ekonomi yang mengakibatkan kelaparan, AFSC menjadi satu-satunya organisasi Internasional yang datang untuk menolong. Tindakan tersebut dilakukan dengan didasarkan kepada keyakinan, saling mengerti dan *respect* terhadap rasa kemanusiaan. Kegiatan utama dari organisasi tersebut ialah mengembangkan program agrikultur dan pertanian. Saat ini, AFSC telah bekerjasama dengan beberapa pihak di Korea Utara antara lain Akademi Ilmu Pertanian dan Fakultas Pertanian/ *Agriculture* Universitas Kim Il Sung untuk meningkatkan produktifitas dan mengimpelementasikan praktek agrikultural yang berkelanjutan. Selain masalah terkait pertanian, AFSC juga mengurus masalah pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat Korea Utara baik yang sifatnya perorangan, institusi, dan juga pemerintah terkait berbagai macam topik (Lucy: 2017).

Hal tersebut menjadi contoh keberhasilan hubungan antara masyarakat sipil Korea Utara dan Amerika Serikat di tengah hubungan politik dan internasional yang sangat fluktuatif. Dalam menjalankan kegiatannya, AFSC bekerjasama dengan KNPC (*Korean National Peace Committee*) yakni organisasi masyarakat sipil Korea Utara yang bekerja menjalankan misi perdamaian di Semenanjung Korea dan Kawasan. Bagi KNPC, tujuan utama yang ingin dicapai ialah bagaimana mengajak pihak yang terlibat dalam Perang Korea untuk bertanggung jawab dan mencari solusi bersama-sama terkait perdamaian di Semenanjung Korea. AFSC sendiri merupakan salah satu bagian kecil masyarakat sipil yang peduli terhadap isu keamanan dan perdamaian di Semenanjung Korea. Untuk itu, agar akses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea terjalin dengan lebih luas maka organisasi masyarakat sipil yang ada turut bergabung dalam satu jaringan masyarakat sipil global yang terafiliasi yang dalam hal ini ialah GPPAC (*Global Partnership for Prevention of Armed Conflict*).

Masyarakat sipil merupakan bagian yang sangat dinamis dan mampu memberikan pandangan yang lebih luas. Untuk menjadi sebuah gerakan yang lebih besar dan diharapkan mampu untuk mengangkat kembali *track 1* untuk kembali hidup, maka CSO yang ada tergabung dalam sebuah jaringan masyarakat sipil. Kehadiran GPPAC merupakan sebuah bentuk keterlibatan sipil global yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea guna mencegah terjadinya konflik dengan eskalasi yang tinggi hingga memicu kekerasan dengan cara-cara yang damai. Kehadiran GPPAC sebagai sebuah jaringan masyarakat sipil global merupakan sebuah representasi dari konsep *civic engagement* yang mana menjelaskan keterlibatan masyarakat sipil itu sendiri sebagai sebuah proses kolaboratif antara individu-individu dan atau kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam sebuah jaringan yang lebih besar untuk mencapai sebuah tujuan bersama yakni perdamaian di Semenanjung Korea.

Keberadaan GPPAC sebagai jaringan CSO global merupakan sebuah langkah *preventive* agar konflik tersebut tidak terjadi dalam

eskalasi yang lebih besar hingga menciptakan kekerasan. Dialog yang dilakukan oleh GPPAC sebagai *track II* merupakan representasi dari konsep *preventive diplomacy*, dimana untuk menjalankan upaya pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni fasilitasi, mediasi, rekonsiliasi, adjudikasi, dan arbitrase (Muggah & White, 2013:5). Langkah dialog yang dilakukan oleh GPPAC merupakan sebuah bentuk fasilitasi bagi pihak yang berkonflik untuk bertemu dalam satu forum bersama guna membahas mengenai isu-isu keamanan. Meskipun dalam forum tersebut sifatnya lebih luas, namun hal tersebut memberikan sebuah peluang bagi kedua belah pihak untuk saling berinteraksi satu sama lain sehingga dapat memunculkan rasa kepercayaan dan menghilangkan *stereotype* negatif yang selama ini melekat akibat perang di masa lalu. Dialog tersebut merupakan langkah awal dalam membangun *confidence*, dimana rasa saling percaya dan kejujuran merupakan permulaan yang paling penting dalam proses rekonsiliasi atau perdamaian. Dialog yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil setidaknya memberikan penawaran akan pengalaman yang berbeda mengenai pemecahan masalah.

GPPAC (*Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict*) menjadi pihak yang menginisiasi dialog konstruktif terkait konflik di Semenanjung Korea dengan menjadikan GPPAC-NEA (*North East Asia*) sebagai penanggung jawab proses dialog tersebut. Adapun dialog tersebut dilakukan secara netral dengan mengambil tempat di Ulaanbatar, Mongolia. Lokasi tersebut ditentukan dengan pertimbangan bahwa Mongolia merupakan negara yang memiliki posisi netral di Kawasan. Hal ini sesuai dengan teori resolusi konflik yang menjelaskan bahwa untuk menjalankan proses *gradual reform* atau membangun kembali hubungan yang sebelumnya retak dengan *building confidence and mutual understanding*, maka perlu adanya pihak ketiga netral yang memfasilitasi pihak berkonflik untuk bertemu. Dalam hal ini, Ulaanbatar merupakan tempat yang dirasa netral untuk menggelar sebuah dialog yang menghadirkan Korea Utara dan Selatan dalam satu meja.

Proses dialog di Ulaanbaatar yang diselenggarakan oleh GPPAC diposisikan sebagai sebuah alternatif dialog dalam rana *track II* guna mendukung dialog dalam rana *track I* yang sudah tidak lagi efektif. Selain itu, Ulaanbaatar proses juga menciptakan ruang bagi masyarakat sipil untuk memberikan berbagai macam bentuk perspektif pemikiran lintas batas wilayah termasuk melibatkan kedua negara berkonflik yakni Korea Utara dan Korea Selatan dalam satu forum yang sama. Baik Korea Utara maupun Korea Selatan memiliki ruang untuk saling berinteraksi dan menyampaikan ide serta gagasan yang mungkin akan susah dan tidak bebas jika dilakukan dalam level *track I*.

Ulaanbaatar dialog pertama kali dilaksanakan pada tanggal 23-24 Juni 2015 dan dihadiri oleh peserta dengan latar belakang aktivis serta akademisi dari Tiongkok, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Mongolia. Dalam kurun waktu dua hari, dialog tersebut membahas terkait isu keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Timur khususnya Semenanjung Korea. Diantaranya yang dibahas ialah mengenai pembentukan *Northeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone*, mengubah perjanjian gencatan senjata antara Korea Selatan dan Korea Utara menjadi *permanent peace treaty* atau perjanjian damai yang sifatnya permanen. Untuk mencapai seluruh tujuant tersebut, dalam dialog tersebut juga dinyatakan bahwa perlu untuk meningkatkan peran masyarakat sipil yang berlatar belakang *gender oriented* seperti peran wanita dalam menyuarkan perdamaian di Semenanjung Korea atau yang lebih dikenal sebagai gerakan *Women Cross DMZ*.

Selanjutnya, pertemuan kedua Ulaanbaatar dialog dilakukan pada tanggal 14-16 November 2016. Diadakannya dialog tersebut bertujuan untuk memperluas kesempatan untuk membahas isu terkait masalah perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea dengan menitik beratkan pada agenda untuk membentuk zona anti senjata nuklir di kawasan Asia Timur serta mendiskusikan mengenai efektifitas keterlibatan

masyarakat sipil dalam meredam ketegangan, membangun kerjasama dan mencapai *peace building* dan stabilitas di Kawasan.

Tujuan utama yang ingin dicapai masyarakat sipil dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea tidak lain ialah *peace agreement* oleh kedua belah pihak berkonflik dan membangun *Regional peace rezim* atau membangun *Nuclear Free in East Asia (Mongolia Nuclear Free Zone)*. Bentuk insiasi perdamaian yang dilakukan oleh masyarakat sipil yang terlaksana dalam bentuk Ulaanbaatar Dialog tetap menjadi *opportunity* ditengah-tengah hubungan kedua negara yang cukup fluktuatif. Selain itu, keberadaan *Track I* justru tidak memberikan solusi dan sangat kecil pengaruhnya karena hubungan yang dibangun melalui *track I* sifatnya lebih *polarizing* atau terpolarisasi, sedangkan dalam proses resolusi konflik sendiri perlu untuk mendengarkan dan terlibat berbagai macam bentuk perspektif sebagai sebuah opsi atau pilihan.

Keterlibatan organisasi masyarakat sipil atau yang dalam hal ini ialah GPPAC dalam inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea melalui dialog merupakan salah pendekatan diplomasi yang jika dikaitkan dengan teori resolusi konflik ialah bertujuan untuk menciptakan *gradual reform*. Perubahan bertahap tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengubah tatanan sosial masyarakat yang sebelumnya penuh dengan rasa curiga dan permusuhan menjadi pola hubungan yang lebih harmonis (James A. Schellenger, 1996: 99). Dialog yang dilakukan melalui mekanisme *people to people* atau *community to community*. Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat membangun rasa kebersamaan atau *we-ness* masyarakat baik Korea Utara dan Selatan. Kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh GPPAC dalam sebuah mekanisme *Ulaanbaatar dialogue* merupakan bentuk bagaimana jaringan kelompok masyarakat sipil berupaya untuk menciptakan *opportunity* atau peluang pihak yang berkonflik membangun kembali hubungan baik dan bisa saja proses tersebut dimungkinkan untuk mengarah pada mediasi dan dialog formal.

Ulaanbatar dialogue yang dilakukan secara rutin setiap tahun menjadi langkah awal untuk mencairkan hubungan pihak yang berkonflik. Meskipun dialog tersebut membahas mengenai masalah keamanan yang sifatnya luas, namun setidaknya proses tersebut adalah permulaan dalam membangun “*mutual understanding*” pihak yang berkonflik. Melalui forum tersebut, kedua belah pihak akan terus bertemu dan berulang-ulang sehingga kemungkinan mereka untuk berinteraksi pun lebih besar. Dengan demikian diharapkan lama-kelamaan akan muncul rasa *we-ness* atau yang dalam bahasa Korea lebih dikenal dengan istilah *cheong* diantara mereka. *Cheong* atau *we-ness* sendiri dapat terbentuk melalui beberapa hal berikut yang antara lain ialah memori kolektif, harapan, rasa percaya, empati dan Identitas bersama (Malik, 2017: 290-291).

Sering kali dalam masyarakat yang pernah berkonflik, ingatan pahit terkait kekerasan dan juga konflik tersebut akan terus membekas, sehingga lama-kelamaan akan muncul perasaan *victimhood* atau berlomba-lomba untuk menjadi Korban (Bar-Tal, 2009: Malik, 2017:290). Jika sudah demikian, maka setiap pihak akan membenarkan pendapatnya dan cenderung menyalahkan pihak lainnya. Untuk itu, tujuan dari proses dialog yang dilakukan oleh masyarakat sipil ialah untuk membangun dan mengembangkan *framework* bersama terkait permasalahan yang dihadapi. Sehingga hal tersebut sedikit banyak akan mengurangi memori perang yang dimiliki, karena kedua pihak diberikan ruang untuk bertemu dan berbicara satu dengan yang lainnya (Jeong, 2010: 198).

Menurut Kellet dan Dalton (2001), melalui dialog diharapkan dapat menciptakan makan dan membangun sebuah komunitas. Dimana biasanya, seseorang atau kelompok memutuskan untuk bergabung ke dalam sebuah komunitas maka otomatis kelompok atau individu tersebut berada atau memiliki tujuan yang sama dengan komunitas yang diikutinya. Hal ini sama dengan KNPC, dimana turut bergabung menjadi bagian dari jaringan GPPAC berarti KNPC juga memiliki tujuan yang sama dengan GPPAC yakni menciptakan perdamaian dan mencegah terjadinya konflik bersenjata. Kehadiran CSO Korea Selatan dan Utara dalam dialog yang

diselenggarakan di Ulaanbatar menjadi salah satu indikator bahwa kedua pihak memiliki tujuan yang sama yakni perdamaian. Meskipun “definisi” perdamaian yang diinginkan oleh kedua pihak bisa jadi berbeda, namun keikutsertaan kedua pihak menjadi jaringan GPPAC menjadi sebuah kesempatan untuk membangun harapan akan perdamaian di Semenanjung Korea oleh gerakan masyarakat sipil.

Berdasarkan kepada teori resolusi konflik, kegiatan fasilitasi oleh GPPAC yang berupa *Ulaanbatar dialogue* merupakan kerangka yang cukup penting dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea pada saat ini dimana *track I* sudah tidak lagi efektif. Melalui dialog, diharapkan akan terbangun rasa percaya, mengingat “*trust*” merupakan elemen terpenting dalam sebuah upaya resolusi konflik. “*Trust*” tidak lain ialah bertujuan untuk mengurangi ketegangan, serta menciptakan rasa saling pengertian (*understanding*) dan mengidentifikasi kemungkinan dilakukannya kerjasama. Apabila sudah terbangun rasa percaya diantara pihak yang berkonflik, maka secara alami akan memunculkan identitas bersama antara Korea Utara dan Selatan. Identitas tersebutlah yang menjadi awal dari tumbuhnya *we-ness* atau *cheong* diantara mereka, yang bisa saja telah lama hilang akibat konflik yang berkepanjangan dan minimnya masyarakat dari kedua negara untuk saling bertemu.

Meskipun masyarakat kedua negara telah terpisah dan tidak saling berinteraksi antara satu dengan lainnya selama lebih dari 60 tahun, namun kepemilikan identitas bersama tidak dapat dipungkiri masih akan tetap melekat pada diri masyarakat Korea. Hal ini sesuai dengan survey yang oleh IPUS pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa 38.6 % dari 1.201 responden menyatakan bahwa penting untuk dilakukan unifikasi karena baik Korea Utara maupun Selatan merupakan etnis yang sama. Sedangkan, 29.8% menyatakan jika unifikasi penting untuk menghilangkan ancaman perang antara Korea Utara dan Korea Selatan di masa yang akan datang. Sedangkan 31.6 % sisanya menjawab dengan berbagai macam alasan yang berbeda (IPUS, 2016: 36-37).

Tabel 4.1. Alasan Pentingnya dilakukan Unifikasi

(Unit: %)

	Because we are the same ethnic group	Because separated families need to be reunited.	To eliminate the threat of war between North and South Korea	So North Korean people can live better lives	So South Korea can become a more advanced country	Other	Total (N)
2007	50.7	8.9	19.2	1.8	18.7	0.7	1,200
2008	58.7	6.6	14.5	2.9	17.2	0.1	1,213
2009	44.3	8.5	23.5	4.2	18.7	0.8	1,203
2010	43.3	7.0	24.2	4.0	20.8	0.6	1,200
2011	41.9	7.2	27.3	4.8	17.7	1.1	1,201
2012	46.0	9.1	25.3	4.4	14.5	0.8	1,200
2013	40.4	8.3	30.8	5.5	14.2	0.8	1,199
2014	42.1	9.1	27.0	3.9	17.6	0.3	1,200
2015	40.7	12.3	26.3	6.3	14.0	0.4	1,200
2016	38.6	11.8	29.8	5.0	14.2	0.7	1,201

Sumber: IPUS (2016: 37)

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa diantara seluruh alasan yang dikemukakan, persamaan etnis merupakan alasan yang paling banyak dipilih oleh responden meskipun data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan tiap tahun. Namun, hal tersebut tetap mendukung bahwa proses perdamaian dapat dimulai melalui *grassroot* dengan lebih meningkatkan intensitas dialog dan pertemuan antar CSO baik Korea Utara maupun Korea Selatan. Dengan demikian, dapat diharapkan rasa kebersamaan yang selama ini luntur akan kembali hidup diantara masyarakat kedua negara.

Menurut Jeong (2010: 198), dialog yang dilakukan oleh masyarakat sipil memungkinkan bagi anggota kelompok dari komunitas yang berseberangan untuk turut hadir guna membangun *mutual understanding* diantara mereka. Secara umum, proses dialog tersebut dilakukan secara informal dan tidak terlalu terstruktur, namun pembicaraan yang dilakukan dibangun untuk membangun dan mengembangkan *action plan* yang bisa diangkat di dalam forum-forum formal sesuai dengan agenda setting yang ada (Jeong, 2010: 192). Hal ini sesuai dengan proses dialog *ulaanbataar* yang dilaksanakan secara informal dan memungkinkan bagi pihak yang terlibat untuk lebih terbuka dalam menyuarakan pendapat terkait isu yang

ada, salah satunya ketegangan di Semenanjung Korea antara Korea Utara dan Selatan. Karena sifatnya yang informal dan *unstructure*, tidak jarang forum dialog seperti yang dilakukan oleh GPPAC di *ulaanbataar* terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang terorganisir dan membahas mengenai beragam isu yang terjadi di kawasan (Jeong, 2010: 201). Meskipun secara tidak spesifik membahas mengenai masalah yang dihadapi, namun setidaknya melalui forum tersebut kedua belah pihak dapat dipertemukan secara berkala, sehingga diharapkan muncul rasa saling mengerti dan percaya yang bisa saja selama kurun waktu lebih dari 60 tahun mulai memudar dan bahkan hilang sama sekali. Hal ini jika merujuk pada Malik (Wawancara, 5 Desember 2017) diistilahkan sebagai “Strategi bubur panas”.

Selain itu, interaksi yang di mulai dari *grassroot* dilihat sebagai langkah yang lebih efektif untuk memulai kembali normalisasi hubungan antara Selatan dan Utara. Hal ini dapat dilihat dengan meredahnya intensitas konflik antara kedua negara sebagai hasil dari rekonsiliasi dan dialog yang dilakukan dalam rangka persiapan Olimpiade Musim Dingin (*Winter Olympic*) yang dilaksanakan pada bulan february tahun 2018 di Pyeongchang, Korea Selatan. Pertemuan tingkat tinggi yang membahas mengenai Olimpiade antara kedua negara dimulai sejak tanggal 09 Januari 2018 di Panmunjom, Korea Selatan (Lewis, <http://edition.cnn.com/2018/01/08/sport/north-korea-south-korea-talks-winter-olympics-2018-pyeongchang/index.html> 12 Januari 2018, diakses pada 16 Januari 2018).

Sebagai hasil dari pembicaraan tersebut, kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan provokasi satu sama lain untuk mensukseskan pergelaran olimpiade tersebut. Korea Utara juga bersedia untuk mengirimkan delegasi atlet untuk berlaga dan 140 anggota orkestra di Korea Selatan untuk menampilkan pertunjukan seni selama berlangsungnya Olimpiade (Shin Hyohee, Kim Christine, <https://www.reuters.com/article/us-northkorea-southkorea-talks/north-korean-orchestra-to-perform-in-south-during-olympics-amid-easing->

[tensions-idUSKBN1F40FR](#) 15 Januari 2018, diakses pada 16 Januari 2018). Pertemuan tersebut setidaknya mampu menunjukkan bahwa kedua negara secara bilateral atau *track I* dapat memulai dialog dan menormalisasi hubungan melalui *grassroot* dimana pembahasan yang dilakukan tidak lain ialah mengenai masalah olah raga atau olimpiade dimana di dalamnya terdapat elemen sportifitas, profesionalitas, dan kompetisi. Selain itu, dengan setujunya Korea Utara untuk mengirimkan kelompok orksetranya merupakan salah satu bukti bagaimana pendekatan budaya dengan melibatkan masyarakat sipil mampu untuk memulai proses perdamaian di Semenanjung Korea antara kedua negara yang berkonflik. Hal tersebut merupakan permulaan yang baik dalam proses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea melalui pendekatan budaya.

4.3.2. Dinamika Keterlibatan GPPAC dalam Proses Perdamaian di Semenanjung Korea

Kompleksitas konflik yang terjadi di Semenanjung Korea, turut berimplikasi terhadap proses perdamaian yang diupayakan. Keterlibatan CSO atau GPPAC dalam inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea banyak dihadapkan oleh berbagai macam dinamika. Salah satu diantaranya ialah terkait bagaimana susahnya membangun "*trust*" yang merupakan modal awal dari proses rekonsiliasi. GPPAC membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pendekatan kepada KNPC agar turut serta ikut dalam dialog. Dalam proses tersebut, GPPAC melakukan pendekatan dengan berbagai macam yang salah satunya ialah terlibat dalam kegiatan-kegiatan *emergency assistance* seperti memberikan bantuan logistik dan obat-obatan kepada Korea Utara. Selain itu, GPPAC melalui jaringan AFSC juga mencoba untuk menarik kepercayaan kelompok masyarakat sipil Korea Utara melalui bidang pertanian dan agrikultur yang bekerjasama dengan Universitas-universitas di Korea Utara. Negosiasi dan pendekatan informal yang dilakukan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil ketika pada akhirnya Pemerintah Korea Utara

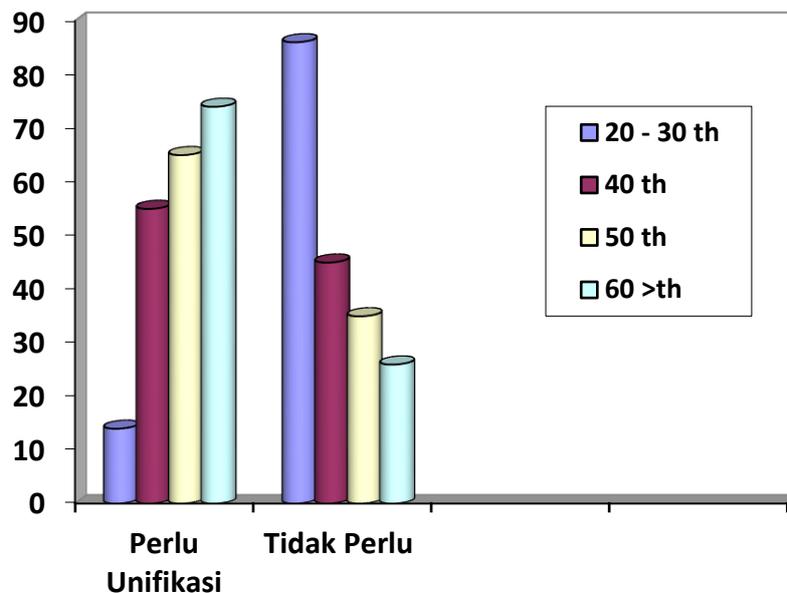
memperbolehkan adanya *official delegation* dalam hal ini diwakili oleh KNPC di tahun 2012.

Selain itu, dinamika lainnya yang dihadapi oleh GPPAC ialah semakin mengecilnya Kelompok masyarakat yang menginginkan reunifikasi di Korea Selatan. Hal ini tidak lain disebabkan oleh generasi muda di Korea Selatan yang saat ini kurang tertarik dengan isu-isu terkait reunifikasi Semenanjung Korea. Perkembangan ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat Korea Selatan menjadi salah satu alasan mengapa saat ini banyak diantara mereka yang tidak lagi menjadikan isu keamanan di Semenanjung Korea menjadi prioritas. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian disertasi dari Campbell (2011) yang menyatakan bahwa terjadi penurunan *interest* masyarakat Korea khususnya generasi muda terkait isu reunifikasi di Semenanjung Korea.

Secara umum, masyarakat sipil di Korea Selatan dibagi menjadi tiga kelompok yakni kelompok generasi pertama, kedua, dan ketiga. Kelompok generasi pertama ialah generasi yang masih memiliki kedekatan hubungan dengan masyarakat Korea Utara. Generasi ini menganggap bahwa ide unifikasi ialah hal yang alami untuk dilakukan dan harus dicapai. Sedangkan generasi kedua ialah generasi yang lahir ditahun 1960-an dan aktif pada masa pemerintahan Roh Moo-hyun, sehingga generasi ini sedikit banyak mendapatkan pengalaman dan pendidikan demokrasi di Korea Selatan. Sehingga, secara ideologi mereka mendukung adanya reunifikasi. Berbeda dengan dua generasi sebelumnya, generasi ketiga justru memiliki identitas sendiri dan nasionalisme yang berbeda. Generasi ketiga yaitu usia antara 20 hingga 30 tahun atau yang dalam bahasa Korea disebut dengan istilah *isipdae* lebih menganggap bahwa Korea Selatan merupakan negara yang berdiri sendiri dan mereka tidak mau mengidentifikasi diri sebagai satu kesatuan dengan masyarakat Korea Utara (Wawancara Yeul, 3 Mei 2010, Campbell, 2011: 57-58). Hal ini didukung dengan survei yang dilakukan oleh *Institute for Peace and Unification Studies Soul National University (IPUS)* tahun 2016 yang menunjukkan bahwa terjadi perbedaan yang cukup signifikan

antara masyarakat Korea Selatan generasi pertama, kedua, dan ketiga dalam dukungannya terkait unifikasi di Semenanjung Korea. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui bagan sebagai berikut:

Bagan 4.2. Sikap Masyarakat Korea Selatan Terkait Unifikasi Berdasarkan Usia



Sumber: IPUS (2016: 36)

Berdasarkan bagan tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, masyarakat Korea Selatan dengan usia antara 20 sampai 30 tahun terhitung hanya kurang lebih 14% yang mendukung dilakukannya unifikasi. Berbanding terbalik dengan masyarakat usia 60 tahun atau lebih yang 75% mendukung untuk dilakukannya unifikasi. Sedangkan, untuk angka usia 50 tahun dan 40 tahun relatif mendukung dengan angka 65 % dan 55 %. Dengan demikian, hal ini dapat menunjukkan bahwa generasi muda di Korea Selatan tidak lagi menempatkan masalah terkait konflik Semenanjung Korea menjadi prioritas mereka. Banyak diantara generasi muda Korea yang menganggap bahwa apabila unifikasi dilakukan maka masyarakat Korea Utara justru menjadi beban serta masalah baru bagi Korea Selatan (Kim Philo, 2015: 25). Meskipun demikian, masih banyak pula masyarakat Korea Selatan yang mendukung proses perdamaian

dengan Korea Utara, khususnya para akademisi dan para aktivis kemanusiaan lainnya.

Ketakutan yang dialami oleh masyarakat Korea Selatan bahwa apabila terjadi unifikasi, maka penduduk dari Korea Utara justru nantinya dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial yang baru bagi masyarakat Korea Selatan yang saat ini sudah makmur. Namun demikian, hal tersebut merupakan sebuah kesalahan bahwa perdamaian bukan berarti kedua negara harus bersatu atau terunifikasi. Perdamaian yang dimaksudkan dan yang ingin dicapai oleh kelompok masyarakat sipil atau GPPAC ialah bagaimana kedua negara menormalisasi kembali hubungan dan merubah perjanjian gencatan senjata yang sebelumnya telah disepakati menjadi perjanjian perdamaian. Pergantian tersebut tentu akan merubah status formal hubungan yang sebelumnya “perang” menjadi “damai”. Sehingga, memungkinkan bagi kedua pihak untuk meminimalisir tindakan provokasi dan permusuhan. Dengan demikian, menjadi kewajiban bagi GPPAC khususnya jaringan atau *working group* Korea Selatan untuk melakukan pendidikan perdamaian masyarakat umum khususnya kepada generasi milenial Korea Selatan.

Proses yang tidak mudah untuk memperoleh dukungan dan membangun kepercayaan serta *mutual understanding* baik di Korea Selatan maupun Korea Utara. Hal ini dikarenakan, kawasan Asia Timur merupakan salah satu kawasan yang masih sangat kental dipengaruhi oleh bayangan sejarah konflik dan perang dimasa lalu. Permusuhan yang saat ini terjadi antara Korea Selatan dan Utara merupakan produk dari masa kolonialisme Jepang dan diperburuk pada masa perang Dingin. Ingatan-ingatan akan perang tersebut pada akhirnya banyak mempengaruhi pola interaksi dan tata kenegaraan di Semenanjung Korea. Kedua negara tidak bisa lepas dari penguatan kekuatan militer dan penempatan pasukan hingga ke perbatasan.

Tidak mudah bagi jaringan masyarakat sipil untuk menghilangkan memori kolektif Korea Utara dan Selatan terkait sejarah perang di masa lalu. Merujuk pada teori konflik, selama kondisi negara atau kelompok

individu masih merasa terancam atas kehadiran dari negara atau individu lainnya, maka hal tersebut mengindikasikan adanya konflik diantara mereka (Galtung, 2007:131). Selain itu, kehadiran Amerika Serikat di Semenanjung Korea membuat hubungan antara Utara dan Selatan menjadi lebih kompleks. Bagi KNPC, yang diperlukan untuk membangun perdamaian di Semenanjung Korea ialah baik Korea Utara dan Selatan membutuhkan ruang dimana salah satu caranya dengan mengurangi intervensi dari negara lain, khususnya Amerika Serikat untuk mundur dan memberikan sedikit ruang untuk Korea Utara dan Selatan. Menurut KNPC, ruang tersebut mampu tercipta jika saja Korea Selatan meninjau kembali hubungan kedekatannya dengan Amerika Serikat. Mengingat, tantangan terbesar bagi proses rekonsiliasi dan reunifikasi antara Selatan dan Utara ialah keberadaan pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan (Lucy Robert: 2017).

Memori Kolektif akan sejarah perang di masa lalu serta kehadiran negara besar lainnya yang mengintervensi menjadi sebuah dinamika yang harus dihadapi oleh GPPAC dalam upaya inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea. Tantangan besar yang dihadapi ialah bahwa konflik di Semenanjung Korea terjadi secara terstruktur dan kompleks. Oleh karena itu, hal tersebut juga berimplikasi kepada proses pencarian jalan keluar yang pada akhirnya menjadi kompleks.

Hal ini merujuk pada teori konflik struktural bahwa konflik yang terjadi di Semenanjung Korea merupakan produk dari bagaimana sebuah konflik di masyarakat sengaja untuk dikelola dan dibentuk (James A. Schellenberg, 1996: 97). Ketegangan yang terjadi antara Korea Utara dan Selatan pada saat ini merupakan hasil dari kondisi struktural yang terjadi di masa lampau. Ketegangan tersebut merupakan lanjutan dari Perang Korea yang terjadi di tahun 1950 sebagai akibat dari perang Dingin. Memori kolektif masyarakat akan perang pada masa lalu tidak akan pernah hilang karena baik oleh pemerintah Korea Selatan maupun Utara, memori tersebut selalu dihidupkan melalui tindakan-tindakan provokasi

dan saling mengancam oleh Kedua Negara yang akhirnya menjadikan rasa benci akan terus tumbuh.

Selain itu, kondisi struktural tersebut sengaja dipertahankan oleh negara yakni dengan membiarkan intervensi Amerika Serikat terus berlanjut di Semenanjung Korea melalui Korea Selatan. Hal inilah yang senantiasa membentuk ketegangan di Semenanjung Korea hingga saat ini. Bagi Korea Utara, Amerika Serikat merupakan aktor utama penyebab terjadinya perang dan perpecahan antara Korea Utara dan Selatan. Kehadiran Amerika Serikat di Semenanjung Korea bisa dibaratkan sebagai “Korek Api” yang sewaktu-waktu bisa menyulut ketegangan dan memunculkan konflik yang bukan tidak mungkin dapat menghasilkan kekerasan.

Berdasarkan kepada teori konflik sosial struktural, pertentangan yang terjadi di Semenanjung Korea pada saat ini terbentuk akibat dipengaruhi oleh empat faktor pendorong, antara lain ialah (Kearney, 2017: 27-50):

a. Pengembangan dan uji coba persenjataan oleh Korea Utara

Korea Utara merupakan salah satu negara yang sangat aktif dalam mengembangkan teknologi persenjataannya. Tercatat Korea Utara beberapa kali melakukan uji coba rudal dan misil. Adapun pengembangan persenjataan tersebut merupakan sebuah reaksi atas ancaman dari aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat di kawasan. Sebagai negara yang secara diplomatik tidak banyak memiliki koneksi serta dukungan dan kondisi negaranya yang secara administratif masih berada dalam *war zone*, maka salah satu cara untuk *survive* ialah dengan menguatkan persenjataan yang dimiliki sebagai bentuk *self defense*. Hal tersebut ialah sesuatu yang alamiah dan wajar jika sebuah negara melakukan peningkatan kekuatan militer, namun di sisi lain hal tersebut dianggap sebagai sebuah ancaman bagi Korea Selatan dan Amerika Serikat. Apabila sudah demikian, maka situasi *arm race* atau perlombaan senjata pun tidak bisa dihindari. Hal

tersebutlah yang hingga saat ini menjadikan konflik di Semenanjung Korea menjadi sangat kompleks

b. Penarativan sepihak baik oleh Korea Utara maupun Selatan

Ketika konflik menjadi semakin *protracted*, maka pelabelan dan penarasian satu pihak kepada pihak lainnya menjadi semakin mudah atau *simple*. Selain dalam bentuk perlombaan senjata, tindakan provokasi oleh kedua belah pihak yang berkonflik juga seringkali dilakukan melalui narasi-narasi negatif. Tidak jarang media masa Korea Selatan dan Utara saling memberikan gambaran dan label yang buruk satu sama lainnya.

Media masa Amerika Serikat dan Korea Selatan seringkali menyebut Korea Utara sebagai negara yang “brutal”, “paranoid”, “*reclusive*”, dan dipimpin oleh seseorang yang diktator, kejam, dan bertindak kejam terhadap masyarakatnya. Sehingga, hal tersebut seolah-olah menguatkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan sebuah keharusan dalam rangka mengamankan agar pengaruh komunisme tidak menyebar ke Korea Selatan dan melindungi Korea Selatan dari serangan Korea Utara (Jack Kim, Reuters, 9 September 2016). Begitupun sebaliknya dengan Korea Utara yang melabeli Korea Selatan sebagai anak anjing yang selalu menuruti majikannya yakni Amerika Serikat. Bagi Korea Utara, Amerika Serikat dipandang sebagai sebuah ancaman imperialisme dunia dan penerus kolonialisme Jepang di Semenanjung Korea (Worden, Bruce, 2008: 277).

Pelabelan tersebut oleh pemerintah terus disuarakan melalui media massa, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap opini masyarakat bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing negara merupakan hal yang benar. Oleh karena itu, tindakan pelabelan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu tantangan dan dinamika yang harus dihadapi oleh GPPAC dalam inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea. Semakin pelabelan tersebut diutarakan, maka semakin bertahan pula konflik di

Semenanjung Korea, mengingat perspsi merupakan hal yang paling susah untuk dirubah. Jika label dan persepsi negatif sudah tertanam, maka proses menumbuhkan “*trust*” antara pihak yang berkonflik akan semakin lebih sulit untuk dilakukan.

- c. Sanksi militer dan ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan terhadap Korea Utara

Bisa dikatakan bahwa konflik di Semenanjung Korea menjadi lingkaran provokasi antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan kepada Korea Utara. Sebagai bentuk respon atas peningkatan kekuatan militer oleh Korea Utara, Amerika Serikat dan Korea Selatan dibandingkan menggunakan pendekatan yang lebih diplomatis dan dialog, justru lebih memilih untuk memberikan sanksi kepada Korea Utara. Bagi Korea Selatan dan Amerika Serikat, kegiatan proliferasi Nuklir oleh Korea Utara merupakan ancaman terbesar bagi stabilitas keamanan global. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat semakin menekan Korea Utara dan diharapkan dengan seperti itu maka akan terjadi keruntuhan rezim. Namun, kenyataanya sanksi tersebut tidak mampu untuk melemahkan Korea Utara justru malah semakin meyakinkan Korea Utara untuk terus mengembangkan kekuatan Nuklirnya. Bagi Korea Utara, Nuklir merupakan salah satu alat untuk melindungi negara dari ancaman dan sudah menjadi simbol. Semakin besar sanksi yang diberikan, semakin besar pula Korea Utara meningkatkan kekuatannya. Dengan diberikannya sanksi oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat, konflik di Semenanjung Korea pun akan semakin meningkat.

- d. Kompetisi militer dan ekonomi antara Amerika Serikat dan PRC turut mempengaruhi konflik di Semenanjung Korea.

Apabila Amerika Serikat sejak sekian lama berusaha untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Kuba, Iran, dan beberapa negara lainnya, namun mengapa hal tersebut sangat susah untuk dilakukan dengan Korea Utara. Ditambah dengan adanya permintaan dari Korea Utara kepada pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan

normalisasi hubungan dan mengganti perjanjian gencatan senjata dengan perjanjian damai beberapa waktu yang lalu tentu akan semakin mempermudah jika memang ingin melakukan normalisasi guna mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea. Namun, kenyataannya Amerika Serikat tetap menolak tawaran dari Korea Utara dan memilih untuk melanjutkan intervensinya di kawasan. Banyak pihak yang menyatakan bahwa konflik di Semenanjung Korea tidak lain dipengaruhi oleh adanya kepentingan Amerika Serikat terkait rivalitasnya dengan Tiongkok.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan ekonomi Tiongkok yang sangat pesat hingga pada tahun 2010, Tiongkok menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ke-dua di dunia turut mempengaruhi pola hubungannya dengan Amerika Serikat (Jennifer Harris, 2016). Peningkatan ekonomi Tiongkok, juga dibarengi dengan peningkatan kekuatan militernya. Hal ini menjadi ancaman bagi eksistensi Amerika Serikat sebagai negara besar yang berpengaruh di dunia. Dengan kata lain bahwa, Tiongkok kini menjelma sebagai kekuatan baru atau *the new rising state* yang mampu menyaingi Amerika Serikat.

Sebagai respon terhadap Tiongkok, pada tahun 2011 Amerika Serikat dibawah pemerintahan Obama membentuk kebijakan "*pivot to Asia*" yaitu kebijakan yang tujuan utamanya ialah "*rebalance*" atas Tiongkok dengan cara menguatkan pengaruh politik, ekonomi, dan militer di kawasan Asia salah satu yang terdampak ialah kawasan Asia Timur (Congressional Research Service, 2012). Sebagai respon atas peningkatan militer Tiongkok, Amerika turut menempatkan pasukan militer di beberapa negara di kawasan Asia Timur seperti di Jepang dan Korea Selatan. Selain itu, posisi Korea Selatan yang berkonflik dengan Korea Utara serta isu persenjataan Korea Utara menjadi tempat bagi Amerika Serikat untuk "menjual senjata" kepada Korea Utara. Hal ini dibuktikan dengan kesempatan Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk mengembangkan THHAD beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini

rencana tersebut telah dikaji ulang oleh presiden Korea Selatan yang baru, Moon Jae In.

Merujuk pada perspektif realis maka bisa dikatakan bahwa konflik di Semenanjung Korea bisa saja memang berusaha untuk dipertahankan oleh Amerika Serikat untuk mewujudkan kepentingannya di Kawasan, baik dalam hal rivalitas dengan Tiongkok atau juga sebagai pasar bagi perkembangan industri pertahanan di Amerika Serikat itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan pada teori konflik yang dijelaskan dengan pendekatan *social structural theory* dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi di Semenanjung Korea tidak lain terjadi karena dilatar belakangi oleh masalah struktural dari masa penjajahan jepang dan dipertajam pada masa perang dingin yang memicu terjadinya perang sipil di Korea pada tahun 1950. Perang sipil (*korean war*) inilah yang kemudian menjadi awal dari ketegangan di Semenanjung Korea hingga sampai sekarang. Selain itu, kondisi *cold peace* tersebut sengaja dipertahankan oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan di kawasan yang dalam hal ini ialah kepentingan Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur yang pada akhirnya turut berimplikasi kepada masalah keamanan di Semenanjung Korea.

Kompleksitas konflik dan hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat turut berimbas kepada kelompok masyarakat sipil atau CSO Korea Selatan yang justru tidak terlalu bebas untuk menyatakan pendapatnya dan perspektif mereka terkait perdamaian di Semenanjung Korea. Hal ini dikarenakan masih banyak dibayangi oleh kepentingan pemerintah Korea Selatan yang berkepentingan dengan Amerika Serikat. Dari sini bisa dilihat bahwa terjadi dilema yang cukup besar dari sisi Korea Selatan baik dari sisi *track I* maupun *track II* terkait keberadaan Amerika Serikat di Korea Selatan. Khususnya pada saat ini, dimana tantangan terbesar yang dihadapi ialah terjadinya *global deteriorate* akibat perubahan pemerintahan dari Obama ke pemerintahan Donald Trump yang berimbas pada tidak mudahnya masyarakat sipil untuk memiliki *constructive role* dalam menginisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea khususnya dari sisi Korea Selatan. Kompleksitas konflik dan

hubungan aliansi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat merupakan dinamika dan tantangan yang harus dihadapi oleh GPPAC dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea.

Dinamika lain yang dihadapi oleh GPPAC dalam inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea ialah berkaitan dengan pendanaan. Sebagai kelompok masyarakat sipil, kegiatan operasional organisasi berjalan dengan disokong oleh pendanaan dari pihak ketiga. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh GPPAC ialah meyakinkan kepada pihak ketiga sebagai donatur terkait kegiatan GPPAC dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea. Hal ini tidak lain berkaitan dengan persepsi negatif masyarakat terhadap Korea Utara yang mana bagi “*normal people*” masalah utama di Korea Utara ialah “Isolasi” dan “negara banyak sanksi”. Oleh karenanya, pihak donatur atau pihak ketiga akan berpikir ulang untuk memberikan dananya untuk proses perdamaian di Semenanjung Korea. Walaupun demikian, tidak seluruh pihak memandang skeptis Korea Utara. Masih banyak pihak yang mendukung dan mengharapkan agar perdamaian di Semenanjung Korea bisa segera terwujud.

Inisiasi perdamaian yang dilakukan oleh GPPAC melalui dialog dan juga pendekatan *P to P* akan terus dijalankan sebagai langkah alternatif ditengah kebuntuan *track I*. Hal ini merujuk berdasarkan pada konsep *civic engagement* yang dinyatakan bahwa (Wanis, Kew, 2008:13):

“Civil society groups can help bring greater public representation into negotiation. Civil society, however speaks with many voices and stand in the shadow of domination by political elites. Civil society is not uniform, it comes in many organizational forms it can have varying degrees of autonomy from the state and sometimes it can even serve as a substitute for the state when government fail to serve their population’s need”.

Dalam pernyataan tersebut dijelaskan bahwa masyarakat sipil dapat membawa berbagai macam kelompok masyarakat untuk ikut dalam negosiasi dan berbicara mengenai satu permasalahan dalam berbagai

macam perspektif. Masyarakat sipil, berdiri sebagai bayangan atas dominasi elit politik yang dalam hal ini ialah *track I*. Namun, khusus dalam inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea masyarakat sipil yang dalam hal ini ialah GPPAC bukan lagi sekedar menjadi *shadow* atau bayangan tetapi melalui jaringan yang besar GPPAC berusaha untuk mendorong dan mengajak *track I* untuk kembali hidup dan bersama-sama mengupayakan proses perdamaian di Semenanjung Korea.

Sejatinya upaya yang dilakukan oleh *track II* tidak akan pernah cukup untuk benar-benar mampu menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea tanpa adanya dukungan dari *track I*. Tujuan utama dari GPPAC melalui dialog-dialog yang dilakukan ialah turut mendorong agar pemerintah dalam hal ini *track I* kembali berfungsi dan memulai kembali dialog untuk rekonsiliasi dengan satu tujuan yang sama yakni perdamaian bukan hanya terkait *national security* saja. Oleh karenanya, upaya yang dilakukan oleh *track II* haruslah berjalan beriringan dengan *track I* karena pada dasarnya kedua pendekatan tersebut merupakan sebuah kombinasi yang kuat untuk menciptakan perdamaian. Jika *track II* bergerak pada level yang sifatnya non-formal dan melakukan pendekatan melalui *grassroot* atau *bottom-up*, maka *track I* bergerak pada level formal yang mengupayakan perdamaian dari sisi kebijakan strategis berdasarkan peraturan hukum dan perundang-undangan sehingga sifatnya akan lebih mengikat.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut, antara lain:

- a. Keterlibatan masyarakat sipil dalam inisiasi perdamaian diantaranya ialah dengan menginisiasi pertemuan keluarga, pertukaran budaya, dan dialog/ *meeting (Ulaanbataar dialogue)*. Cara-cara tersebut diharapkan mampu menciptakan *trust* dan *mutual understanding* diantara pihak yang berkonflik sehingga mampu untuk menemukan satu persamaan yang dapat mengikatkan kembali perasaan persaudaraan atau "*cheong/ simcheong*" dalam bahasa Korea. Meskipun demikian, sejauh ini keterlibatan masyarakat sipil dalam proses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea sebagai *track II* dirasa belum mampu berjalan dengan optimal. Dalam pelaksanaannya tetap perlu adanya dukungan dari *track I* sebagai pihak yang berperan dalam level pengambilan kebijakan
- b. Secara umum terdapat empat dinamika yang dihadapi oleh masyarakat sipil (GPPAC) dalam keterlibatannya terkait upaya perdamaian di Semenanjung Korea, yakni:
 1. Memori kolektif terkait perang dimasa lampu berakibat pada sulitnya membangun "*trust*" diantara pihak yang berkonflik
 2. Mengecilnya kelompok masyarakat yang menginginkan reunifikasi di Korea Selatan, khususnya kalangan muda yang berusia 20-an tahun atau di istilahkan sebagai "*isipdae*"
 3. Kuatnya aliansi antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat di Semenanjung Korea memicu ketegangan dengan Korea Utara
 4. Kesulitan GPPAC dalam memperoleh pendanaan untuk kegiatan perdamaian di Semenanjung Korea

5.2 Saran

5.2.1 Praktis

Telah disebutkan sebelumnya bahwa tantangan dari GPPAC sebagai *track II* ialah mendorong bagaimana agar proses dalam rana *track I* kembali dihidupkan. Karena sejatinya, proses resolusi konflik sendiri butuh kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, sebagai salah satu negara yang memiliki kedekatan hubungan sejarah dengan Korea Utara dan hubungan kerjasama ekonomi serta politik dengan Selatan, Indonesia dinilai memiliki posisi yang cukup strategis dalam menginisiasi perdamaian di Semenanjung Korea.

Sudah saatnya Indonesia menunjukkan kekhasan karakter kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif di hadapan negara-negara di dunia. Yang dimaksud dengan bebas aktif ialah bukan netral melainkan justru harusnya lebih aktif. Sebagai salah satu negara yang senantiasa menjunjung tinggi nilai toleransi, penghormatan terhadap HAM dan dengan jelas tercatat di dalam konstitusi negara bahwa perdamaian abadi merupakan bangsa Indonesia, maka menjadi inisiator perdamaian di Semenanjung Korea bukanlah hal yang mustahil. Indonesia bisa menjadi pelopor dan mengajak negara-negara di kawasan Asia Tenggara melalui forum ARF (*Asean Regional Forum*) untuk menjadi fasilitator dialog bagi Korea Utara dan Selatan dalam rana *track I*. ASEAN dapat dijadikan sebagai instrumen membangun perdamaian di Semenanjung Korea bukan tanpa alasan. Jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan lainnya, negara-negara di ASEAN justru memiliki pandangan positif yang lebih besar kepada Korea Utara. Tinggal bagaimana Indonesia menumbuhkan serta mengajak dan meyakinkan negara anggota ASEAN lainnya untuk ikut terlibat, mengingat kegiatan diplomatik tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh *political will* negara tersebut.

Selain dalam tatanan *track I*, Indonesia melalui Universitas Pertahanan juga memiliki kesempatan yang besar untuk ikut memberikan kontribusi terhadap proses resolusi konflik di Semenanjung Korea melalui pendekatan secara *U to U*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya

bahwa Korea Utara memang tertutup namun jika sifatnya Universitas maka mereka cenderung akan lebih terbuka. Unhan bisa menjadi *starting up* untuk memulai inisiasi perdamaian dalam level *track II* di Semenanjung Korea, mengingat Korea Utara dari sisi perguruan tinggi akan lebih terbuka dan mau membuka ruang untuk berkomunikasi.

Adapun pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui program KKLN (Kuliah Kerja Luar Negeri) ke Korea Utara, meskipun ketika berada di sana mungkin tidak akan leluasa namun secara praktis dan keilmuan hal tersebut bisa diterapkan khususnya membuka opsi dan peluang lain terkait resolusi konflik di Semenanjung Korea. Pendekatan *U to U* juga dapat dilakukan oleh Universitas Pertahanan dengan membuka kesempatan untuk pertukaran mahasiswa dan memungkinkan bagi mahasiswa dari Korea Utara dan Selatan belajar di Universitas Pertahanan. Meskipun dalam kenyataannya nanti baik mahasiswa Korea Utara dan Selatan mempelajari hal-hal yang sifatnya jauh dari konflik dan perdamaian di Semenanjung Korea, namun kehadiran mereka dalam satu tempat yang sama memungkinkan bagi mereka untuk saling bergaul dan berinteraksi satu sama lain. Peluang-peluang inilah yang harus terus dikembangkan.

5.2.2 Teoritis

Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea merupakan solusi alternatif dalam upaya resolusi konflik. Dialog yang dilakukan harus terus dilanjutkan dan dilakukan secara berkala, mengingat semakin sering dan intens dua pihak yang berkonflik maka, memungkinkan terciptanya rasa percaya dan saling mengerti atau *cheong*. Rasa percaya dan *cheong* merupakan modal yang paling penting dalam membangun proses perdamaian.

Berkaca pada faktor kepemimpinan, dari sisi Korea Selatan setelah terpilihnya Moon Jaen, sebetulnya memiliki peluang yang cukup besar bagi perdamaian di Semenanjung Korea. Pemerintahan Moon memungkinkan kembali kebijakan *Sun Shine Policy* dan dukungan Korea

Selatan kepada Korea Utara lebih baik dibandingkan pemimpin sebelumnya. Presiden Moon lebih memilih mengajak Korea Utara untuk berdialog meskipun masih ada sentimen negatif dari kedua negara namun, secara teoritis hal tersebut merupakan langkah awal terjalinnya hubungan yang lebih baik diantara kedua negara.

Dengan demikian, peluang bagi terciptanya terobosan *leadership* akan lebih terbuka di era presiden Moon. Perdamaian ialah *zone of possibility* dimana jika satu upaya gagal maka harus membuka peluang yang lainnya. Kemacetan *track I* yang saat ini dialami dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea bisa saja diterobos dengan *leadership* yang kuat. Didorong dengan inisiatif yang kuat dari pemimpin dan besarnya dorongan dari *track II*, perdamaian di Semenanjung Korea bukanlah hal yang mustahil.

Saran selanjutnya ialah, menjadikan semenanjung Korea sebagai persemakmuran Korea. Dimana untuk mencapai perdamaian, baik Korea Selatan maupun Utara tidak perlu melakukan unifikasi atau penggabungan negara dalam satu administrasi. Tetap menjadi dua identitas negara yakni Korea Selatan dan Utara, namun reformasi ekonomi, politik, dan sosial tetap berjalan. Dalam artian, kedua negara harus saling mendukung dalam satu kesatuan yakni Korea yang damai. Masyarakat bebas untuk bertemu dan berpergian baik dari Selatan ke Utara atau sebaliknya. Semua hal tersebut pasti akan terjadi, dan pertama-tama yang harus dilakukan ialah mengganti perjanjian gencatan senjata menjadi perjanjian damai.

DAFTAR SUMBER

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Boulding, Kenneth E. 1963. *Conflict and Defense*. New York: Harper
- Burchill, Scott. Andrew Linklater. 1996. *Theories of International Relations*. New York: ST Martin's Press
- Buszynski, Leszek. 2013. *Negotiating with North Korea: The Six Party Talks and the Nuclear Issue*. New York: Routledge
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publication
- D. Cha, Victor. 2011. *The End of History: "Neojuche Revivalism" and Korean Unification*, Elsevier Limited on behalf of Foreign Policy Research Institute
- Deutsch, Morton. Peter T. Coleman. Eric C. Marcus. 2016. *Handbook Resolusi Konflik*. Bandung: Nusa Media
- Emzir. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- French, Paul. 2005. *North Korea The Paranoid Peninsula: a Modern History*, Zed Books Ltd: New York
- Galtung, Johan. Charles Webel. 2007. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York: Routledge
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Jeong, Ho-Won. 2010. *Conflict Management and Resolution: An Introduction*. New York: Routledge

- Kim, Oak Myung, Jaffe, Sam. 2013. *"The New Korea"* Mengungkapkan Kebangkitan Ekonomi Korea. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Malik, Ichsan. 2016. *"Interactable Conflict"* di Maluku, Kearifan Lokal dalam Rekonsiliasi, dan Kekitaan. Bogor: IM Center
- Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik : Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Mansbach, Richard. W, Kirsten L. Rafferty. 2012. *Pengantar Politik Global*. Bandung: Nusa Media
- Moleong, Lexy. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morgenthau, Hans.J. 2010. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
- Navarro-Castro, Loreta. 2010. *Peace Education: A Pathway to a Culture of Peace*. Quezon City: Center for Peace Education, Miriam College
- Putnam, Robert D. 1992. *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Raco.RJ. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo
- Reiby, Audun. May 2012. *Public Opinion and US China Policy: A Quantitative Analysis of the Relationship between America Public Opinion and America Policy toward China, 1990-2004*. University of Oslo.
- Schellenberg, James A. 1996. *Conflict Resolution: Theory, Research, and Practice*. New York: State University of New York Press
- Schirch, Lisa. 2013. *Conflict Assessment & Peacebuilding Planning: toward A Participatory Approach to Human Security*. London: Kumarian Press

- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta
- Wahyuni, Sari. 2012. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat
- Wallerstein, Immanuel. 1974. *The Modern World System*. New York: Academic Press
- Winarno, Budi. 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS
- Worden, Robert L. 2008. *North Korea: A Country Study*, Edisi 5. Library Of Congress: Federal Research Division
- Yamaguchi, Ryo Hinata. Ph.D. 2012. *Military Capability Management In the Democratic People's Republic of Korea: The Impact of Domestic Situational and Structural Factors on Military Capability and Strategy*. The University of New South Wales.
- Campbell, Emma Louise Gordon. 2011. *"Uri Nara" our nations: Unification, Identity and Emergence of a New Nationalism Amongst South Korean Young People*. The Australian National University.
- Ward, Peter (Terj). 2017. *Unification Perception Survey 2016*. Seoul: Institute for Peace and Unification Studies Seoul National University
- Jiyoon, Kim. Karl, Friedhoff. Lee, Euicheol. Kang, Chungku. 2016. *South Korean Attitudes toward North Korea and Reunification*. Seoul: The Asan Institute for Policy Studies
- Kearney, Caroline. 2017. *Strengthening Understanding Through Dialogue: A Peacebuilding Approach to the Korean Peninsula Conflict*. Siem Reap: Centre for Peace and Conflict Studies

Jurnal

Baeg Im, Hyug, Ju Hee Lee. *Approach to Inter-Korean Peace and Democratization of North Korea: From Impossible to Possible*. Paper prepared for presentation at World Congress of the International Political Science Association (IPSA). Montreal, Canada, 19-24 Juli 2004

Chanlett-Avery ,Emma. Ian E.Rinehart. *North Korea: US. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation*. Congressional Research Service. 13 September 2013. Melalui <http://www.fas.org/sqp/crs/nuke/R41259.pdf> pada 19/12/13 pukul 21.50 wib

Cordesman, Anthony H. 2011. *The Korean Military Balance: Comparative Korean Forces and the Forces of Key Neighboring State*. CSIS Journal. http://csis.org/files/publication/110712_Cordesman_KoreaMilBalance_WEB.pdf 18/08/2013

E. Bechtol Jr, Bruce. 2012. *Maintaining a Rogue Military: North Korea's Military Capabilities and Strategy at the End of the Kim Jong-il Era*, International Journal of Korean Studies Vol. XVI No. 1, Angelo State University,

E. Bechtol Jr. Ph.D, Bruce. 2013. *The North Korean Military Under Kim Jong-un Evolved or Still Following a Kim Jong-il Script?*, Angelo State University : International Journal of Korean Studies Vol. XVII

E. Bechtol, Jr., Ph.D, Bruce. 2012. *Development in the North Korean Asymmetric Threat: Missiles and Electronic Warfare*, International Journal of Korean Studies Vol. XVI, No.2 Angelo State University

Kim, Philo, *Social Conflict and Identity Crisis in Unified Korea*, International Journal of Korean Unification Studies Vol. 24, No. 1, 2015, 1-33

- Muhamad, Victor Simela. Isu Keamanan di Semenanjung Korea. *Majalah Info Hubungan Internasional*, Vol. IX, No. 13/I/Puslit/Juli/2017
- Noerper, Stephen. *US-Korea Relations: Peninsula Tensions Spike*. *Comparative Connections*, Vol. 19, No. 1, pp. 33 – 40
- Paffenholz, Thania. *Civil Society and Peacebuilding*. The Centre on Conflict, Development and Peacebuilding (CCDP) working paper. didownload melalui https://www.sfcg.org/events/pdf/CCDP_Working_Paper_4-1%20a.pdf pada 01/08/2017 pukul 15.38 wib
- Reimann, Kim D. *Security Issues and New Transnational Peace-Related Movements in East Asia, the 1990s and 2000s*. *International Journal of Peace Studies*, Vol. 13, No. 2 Winter 2008
- Ryu, Gun-Chun. *Lessons From Unified Germany and Their Implications for Healthcare in the Unification of the Korean Peninsula*. *Journal of Preventive Medicine & Public Health*, Vol. 46 pp. 127-133, 2013
- Sang-Chin Choi, Gyuseong Han. *Shimcheong Psychology: A Case of An Emotional State for Cultural Psychology*. *International Journal for Dialogical Science* Fall, 2008. Vol. 3, No. 1, 205-224
- Stephen, Elizabeth Hervey. 2013. *Demography of a Reunified Korea*. Center for Strategic & International Studies (CSIS)
- Subedi, Hem Raj. Meena Bhatta. 2016. *Role of Civil Society in Conflict Resolution and Peacebuilding in Nepal*. *Journal of Conflict, Peace and Development Studies (JOC PDS)*, Vol. 2 No. 1 didownload melalui <http://dcpds-tu.edu.np/wp-content/uploads/2017/05/JoCPDS-2016.pdf> pada 13/07/2017 pukul 13.09 wib
- Suh,Bo-hyuk. *Resolving the Korean Conflict through a Combination of Human Right and Human Security*. *The Korean Journal of International Studies* Vol. 14, No. 1 (April 2016), 54-76 didownload

melalu

http://www.kjis.org/journal/download_pdf.php?doi=10.14731/kjis.2016.4.14.1.53 pada 01/10/2016 pukul 09.58 wib

Wanis-St. John, Anthony. Darren Kew. *Civil Society and Peace Negotiations: Confronting Exclusion. International negotiation* Vol. 13, 11-36, 2008 didownload melalui <http://www.american.edu/sis/faculty/upload/wanis-kew-civil-society-and-peace-negotiations.pdf> pada 11/07/2017 pukul 11.33 wib

Young Ho, Park. *South and North Korea's Views on the Unification of the Korean Peninsula and Inter-Korean Relations*. Paper presented to the 2nd KRIS-Brookings Joint Conference on January 21, 2014

Website/ Situs Internet

Aimee Lewis, *Winter Olympics 2018: A Tension Reducer for North and South Korea*. Diterbitkan pada 12 Januari 2018 melalui <http://edition.cnn.com/2018/01/08/sport/north-korea-south-korea-talks-winter-olympics-2018-pyeongchang/index.html> diakses pada 16 Januari 2018 pukul 13.30 Wib

Bourse, Ana. dkk. 2015. *Creating Spaces for Dialogue: a Role for Civil Society*. Den Hague: GPPAC didownload dari http://www.gppac.net/documents/130492842/131171520/060-009_creating+Spaces_DigitalPublication.pdf pada 14/03/2017 pukul 14.59 wib

Boutros-Ghali, Boutros. 1992. *An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking, and Peacekeeping*. Report of the Secretary-General pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 Januray 1992. Hal. 46-51 didownload melalui <http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/shared/Winter/pr>

[otected/Boutros%20Boutros%20Ghali%20Agenda%20for%20Peace.pdf](#) pada 12/11/2016 pukul 17.57 wib

Enkhsaikhan, Jargalsaikhan, 2016. *Ulaanbaatar Process: It's Philosophy, Practice, and Achievements*. RECNA policy paper, 3. pp1-46. Universitas Nagasaki Jepang didownload melalui [http://naosite.lb.nagasaki-](http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/36667/3/REC-PP-03-EN.pdf)

[u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/36667/3/REC-PP-03-EN.pdf](http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/36667/3/REC-PP-03-EN.pdf) pada 21/06/2017 pukul 10.22 wib

G. Ramcharan, Bertrand, 2008, *Preventive Diplomacy at the UN*. Indiana University Press:Bloomington. Hal. 28-32 [Ebook] didownload melalui

[http://dl.lux.bookfi.net/genesis/537000/89a3b9c50dcba19900da3f316dbdfcad/as/%5BBertrand G. Ramcharan%5D Preventive Diplomacy at th\(BookFi\).pdf](http://dl.lux.bookfi.net/genesis/537000/89a3b9c50dcba19900da3f316dbdfcad/as/%5BBertrand%20G.%20Ramcharan%5D%20Preventive%20Diplomacy%20at%20the%20UN(BookFi).pdf) pada 11/11/2016 pukul 17.28 wib

GPPAC (Global Partership for the Prevention of Armed Conflict), 2013. *GPPAC Statement Calling for Immediate Dialogue on the Korean Peninsula Crisis*. didownload melalui

http://www.wanep.org/wanep/files/2013/april/GPPAC_Statement_on_Korean_Crisis_April_2013.pdf pada 14/03/2017 pukul 15.18 wib

GPPAC (Global Partership for the Prevention of Armed Conflict). 2010. *GPPAC Northeast Asia Statement for Peace on the Korean Peninsula*. didownload melalui

http://peaceboat.org/english/content/documents/GPPACNEA_FinalDec24.pdf pada 14/03/2017 pukul 15.16 wib

GPPAC (*Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict*). *GPPAC NEA Regional Action Agenda "Tokyo Agenda"*. The United Nations University Tokyo, 2 Februari 2005. Didownload melalui http://peaceboat.org/english/nwps/cn/arc/050204/naraan_gppac.pdf pada 19 Desember 2017

Hyonhee Shin, Christine Kim. *North Korean Orchestra to Perform in South During Olympics Amid Easing Tensions*. Diterbitkan pada 15 Januari 2018 melalui <https://www.reuters.com/article/us-northkorea-southkorea-talks/north-korean-orchestra-to-perform-in-south-during-olympics-amid-easing-tensions-idUSKBN1F40FR> diakses pada 16 Januari 2018 pukul 13.45 Wib

Lucy Roberts, *AFSC's Shared Security Vision for Northeast Asia: "Issues Pertaining to Peace and Human Security on the Korean Peninsula"*. GPPAC NEA, October 24 2017 diakses melalui <https://medium.com/reflections-on-peace-and-security-in-northeast/afscs-shared-security-vision-for-northeast-asia-issues-pertaining-to-peace-and-human-security-on-7595c26649f7> pada 29 Oktober 2017 pukul 14.45 Wib

Women Cross DMZ melalui <https://www.womencrossdmz.org/> diakses pada 19 Desember 2017

LAMPIRAN 1

SURAT IJIN PENELITIAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/2428/IX/2017
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 25 September 2017

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran

di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan TA. 2016/2017.
 - c. Surat Perintah Rektor Unhan Nomor: SPRIN/756/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Cohort-5 Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2016/2017.
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, mohon dapatnya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Unhan Cohort-5 TA. 2016/2017 atas nama Devy Indah Paramitha NIM 120160103007 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, pengisian kuisioner dan studi dokumen/laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Inisiasi Proses Perdamaian di Semenanjung Korea".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person*: E-Mail, devy.paramitha@idu.ac.id dan HP. 0822 2040 8898.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M. Eng.
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Pangdam Jaya
3. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota DKI Jakarta.

Kawasan IPSC Sentul Bogor, Telp (021) 87951555

Lampiran Surat Rektor Unhan
Nomor : B/ 21-28 /IX/2017
Tanggal : 25 September 2017

Daftar Pejabat

1. Peter Van Tuijl, Executive Director of GPPAC
2. Edi Yusup, Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri RI
3. Dr. Ihsan Malik, M.Sc
4. Peace Boat, Perwakilan GPPAC Northeast Asia (GPPAC NEA)
5. Prof. Dr. Makarim Wibisono
6. Cho Taiyoung, *South Korean Embassy* Jakarta, Indonesia
7. Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, M.A

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid, Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M. Eng.
Pembina Utama IV/e

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

Executive Director of GPPAC, Peter Van Tuijl

1. Tujuan Wawancara

- 1.1. Memperoleh penjelasan mengenai keterlibatan GPPAC dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea
- 1.2. Mengetahui dinamika yang dihadapi oleh GPPAC terkait keterlibatannya dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea
- 1.3. Mengetahui proses keterlibatan GPPAC dalam inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea
- 1.4. Mengetahui cara kerja GPPAC sebagai organisasi masyarakat non-pemerintah global dalam mencegah konflik bersenjata dan program perdamaian

2. Daftar Pertanyaan

- 2.1 Apa sebetulnya GPPAC dan bagaimana cara kerja organisasi tersebut?
- 2.2 Sebagai organisasi masyarakat non-pemerintah global, bagaimana proses GPPAC terlibat dalam perdamaian di Semenanjung Korea ?
- 2.3 Mengapa GPPAC terlibat dan seberapa besar *urgency* konflik di Semenanjung Korea terkait keamanan global sehingga GPPAC harus terlibat dalam proses perdamaian di sana?
- 2.4 Bagaimana bentuk keterlibatan GPPAC dalam proses perdamaian tersebut?

- 2.5 Bagaimana akselerasi aktifitas yang ingin dicapai oleh GPPAC di dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea, sejauh ini apakah sudah sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan?
- 2.6 Apakah kehadiran GPPAC memberikan perubahan yang signifikan terkait proses perdamaian di Semenanjung Korea?
- 2.7 Bagaimana dengan dinamika yang selama ini pernah dihadapi oleh GPPAC terkait proses perdamaian tersebut? dinamika dalam hal ini ialah kebijakan pemerintah dan ketegangan yang selama ini sering terjadi
- 2.8 Perdamaian seperti apa yang ingin diwujudkan oleh GPPAC di Semenanjung Korea, dan pendekatan apa yang digunakan oleh GPPAC untuk mewujudkan hal tersebut?

Dr. Ichsan Malik
Peace Actor in Korean Peninsula and GPPAC South East
Asia Coordinator

1. Tujuan Wawancara

- 1.1. Mengetahui tentang keterlibatan masyarakat sipil dalam proses perdamaian
- 1.2. Memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana dinamika konflik dan juga proses perdamaian di Semenanjung Korea
- 1.3. Mengetahui peran masyarakat sipil dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea

2. Daftar Pertanyaan

- 2.1. Bagaimana proses perdamaian yang pernah di inisiasi masyarakat sipil di Semenanjung Korea?
- 2.2. Sejauh ini bagaimana pergerakan *civilian* dikaitkan dengan keterlibatannya dalam konflik di Semenanjung Korea?
- 2.3. Kelompok masyarakat atau NGO mana saja yang pernah terlibat dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea?
- 2.4. Menurut bapak, bagaimana respon dari masyarakat kedua negara memandang perdamaian?
- 2.5. Apakah perdamaian yang diinginkan oleh masyarakat di kedua negara sama atau berbeda, jika berbeda apa yang membedakan keduanya?
- 2.6. Selama ini bagaimana masyarakat sipil memandang dinamika konflik yang ada di Semenanjung Korea antara Korea Selatan dan Korea Utara?

- 2.7. Ditengah ketegangan situasi hubungan antara kedua negara yang semakin intensif tiap hari, bagaimana prospek terkait proses perdamaian di Semenanjung Korea? apakah masih ada harapan atau tidak?
- 2.8. Jika demikian, apakah kehadiran dari masyarakat sipil memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea?

GPPAC Northeast Asia, *Peace Boat*

Mery Joice (Peace Boat Japan, GPPAC NEA Coordinator

Charllote Divin (GPPAC NEA Secretariat)

1. Tujuan Wawancara

- 1.1. Mengetahui mengenai keterlibatan *GPPAC Northeast Asia* dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea
- 1.2. Mengetahui sejauh mana keterlibatan *GPPAC Northeast Asia*
- 1.3. Mengetahui bagaimana bentuk keterlibatan dari *GPPAC Northeast Asia* sebagai garda terdepan proses perdamaian di Semenanjung Korea

2. Daftar Pertanyaan/ *English Version*

- 2.1. *What is GPPAC and how does the organization work?*
- 2.2. *As a global non-governmental organization, how does the GPPAC engage in peace process on the Korean Peninsula?*
- 2.3. *Why does GPPAC involve and how urgent the conflict in the Korean Peninsula related to global security so that GPPAC should be involved in the peace process there?*
- 2.4. *What is the form of GPPAC and GPPAC Northeast Asia involvement in the peace process on the Korean Peninsula?*
- 2.5. *How is the acceleration of activities by GPPAC North East Asia in the peace process on the Korean Peninsula, so far whether it is in line with expectations that have been expected?*
- 2.6. *Does the presence of the GPPAC provide significant change regarding the peace process on the Korean Peninsula?*

- 2.7. *What is the action of the GPPAC Northeast Asia for facing conflict dynamics on the Korean Peninsula between north and south korea?*
- 2.8. *How does the GPPAC Northeast Asia strive to unite the two conflicting parties to joint a forum in the peace process at Korea Peninsula?*
- 2.9. *What is the position of civil society in the peace process on the Korean Peninsula, after peace efforts at track 1 level (such a six party talk forum) no longer work?*
- 2.10. *What is the biggest challenge for GPPAC North east Asia in the peace process on the Korean peninsula?*

Prof. Dr. Makarim Wibisono

Pakar Hubungan Internasional dan mantan duta besar Indonesia serta anggota tetap UN di New York dan Genewa

1. Tujuan Wawancara

- 1.1. Mengetahui mengenai dinamika konflik dan Perdamaian di Semenanjung Korea?
- 1.2. Mengetahui tentang implikasi dari konflik tersebut terhadap keamanan global dan kawasan?
- 1.3. Mengetahui proses perdamaian oleh *track 1* dan kegagalan *track 1* tersebut dalam upaya perdamaian di Semenanjung Korea
- 1.4. Mengetahui saran dan juga pendapat dari narasumber terkait masa depan konflik dan perdamaian di Semenanjung Korea

2. Daftar Pertanyaan

- 2.1. Bagaimana dinamika konflik yang terjadi di Semenanjung Korea pada saat ini?
- 2.2. Intensitas yang semakin tinggi antara kedua negara, apakah akan berdampak pada keamanan global dan kawasan, jika ya seberapa besar dampak tersebut?
- 2.3. Konflik sudah berlangsung hampir lebih dari 60 tahun, namun hingga saat ini masih belum menemukan titik terang perdamaian. Menurut bapak, mengapa sampai saat ini proses perdamaian masih belum tercapai?

- 2.4. Kegagalan *track 1* yakni *six party talk* saat ini telah gagal dilakukan, menurut bapak mengapa proses perdamaian melalui *track 1* tidak berhasil?
- 2.5. Saat ini masih ada harapan dari *track 2* yang melibatkan masyarakat sipil dalam proses perdamaian, menurut bapak apakah keterlibatan sipil memiliki pengaruh yang signifikan? dengan demikian bagaimana dengan upaya perdamaian di Semenanjung Korea dimasa yang akan datang?

LAMPIRAN 3**DOKUMENTASI**

(Wawancara Prof. Makarim Wibisono, pada 14 September 2017)

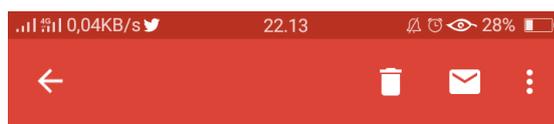
Foto: Pengambilan gambar dilakukan setelah dilakukan wawancara



Foto: FGD Lemhanas, tanggal 25 Juli 2017



Foto: FGD Lemhanas, tanggal 25 Juli 2017



Need an Informant > Kotak Masuk ☆



Devy I.Paramitha

ke info

16/11/2017 [Tampilkan detailnya](#)



Foto: Screenshot Email
Permintaan menjadi
Informan

Dear GPPAC

My name is Devy Indah from peace and conflict resolution master program under Indonesia Defense University.

Now, i am currently writing a thesis that talking about the involvement of civil society on peace process in the korean peninsula. Especially, about GPPAC involvement and the dynamics that faced by GPPAC on that peace process. I really hope, you are pleased to help me and assist with some datas. Besides, i also want to ask some questions about the topic. Great hope for your response.

Best Regard,

Devy Indah Paramitha, S.IP

Master Student of Peace and Conflict Resolution
Indonesia Defense University (UNHAN)
+6282158634827



 **Charlotte Divin**  
ke saya
22/11/2017 [Tampilkan detailnya](#)

Dear Devi,

Thanks for your message. I am the GPPAC Coordinator for Northeast Asia. Have you seen our website about the Ulaanbaatar process [here](#) and publication [here](#)? Also, our partner in Cambodia published this [book](#).

Let me know if you still have any questions,

Best wishes,
Charlotte

----- Forwarded message -----
From: **Info** <info@gppac.net>
Date: Thu, Nov 16, 2017 at 7:59 AM
Subject: Fwd: Need an Informant
To: Darynell Rodriguez Torres <d.rodriguez@gppac.net>, Pascal Richard <p.richard@gppac.net>

Hi both,

Below request is for your assessment and a response to the sender.



--
Charlotte Divin
Coordinator Project Development
Regional Coordinator for Northeast Asia
Secretariat of the Global Partnership for the
Prevention of Armed Conflict
(GPPAC)
[Laan van Meerdervoort 70 | 2517 AN The Hague | The Netherlands](#)
T: +31 (0)70 311 09 77 | F: +31 (0)70 3600194
E: c.divin@gppac.net
W: www.gppac.net | www.peaceportal.org





D Devy I.Paramitha ↩ ⋮
 ke meri
 12/9/2017 [Tampilkan detailnya](#)

to. Meri Joyce
 GPPAC Northeast Asia Regional Liaison Officer,

Dear Ms. Meri Joyce

My name is Devy Indah from peace and conflict resolution master program under Indonesia Defense University.

Now, i am currenty writing a thesis that talks about the involvement of civil society on peace process in the korean peninsula. Expecially, about GPPAC involvement and the dynamics that faced by GPPAC on peace process. I really hope, you are pleased to help me and assist with some datas. Besides, i also want to ask some questions about the topic. Great hope for your response.

Best Regard,

Devy Indah Paramitha, S.IP
 Master Student of Peace and Conflict Resolution
 Indonesia Defense University (UNHAN)
 +6282158634827



D Devy I.Paramitha 20/11/2017
 It's fine Ms. meri.. Thank you for your help..
 And is it possible for me to g...

M Meri Joyce ↩ ⋮
 ke saya
 24/11/2017 [Tampilkan detailnya](#)

Yes, we will send you that together with the questions.
 Please read our web site for the main documents!

<https://www.peaceportal.org/web/ulaanbaatar-process/>
<https://medium.com/reflections-on-peace-and-security-in-northeast>

[Tampilkan kutipan teks](#)

[Tampilkan kutipan teks](#)

D Devy I.Paramitha 24/11/2017
 Thank you very much. I already open those
 website and gather all information....



M Meri Joyce ↩ ⋮
 ke saya
 12/9/2017 [Tampilkan detailnya](#)

Dear Devy,

Greetings from Tokyo, and thank you very much for your email.
 It is great to hear of your interest in civil society activities relating to the Korean Peninsula.

I would be more than happy to help you with any data or questions.
 Please feel free to email with further details any time.

Warm regards,

Meri Joyce
 GPPAC Northeast Asia

[Tampilkan kutipan teks](#)

[Tampilkan kutipan teks](#)



Response to Survey on Korean Peninsula Peace Process and Northeast Asian Security



Kotak Masuk



Anjeli Narandran

ke saya, Meri

19/12/2017 [Tampilkan detailnya](#)



Dear Devy,

I hope this message finds you well.

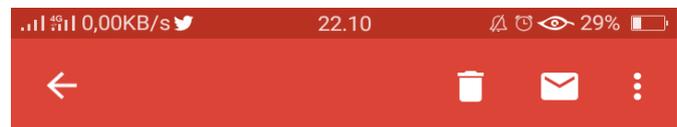
My name is Anjeli Narandran and I work with Meri Joyce at Peace Boat.

Meri and I have completed your questionnaire. please find it attached. We hope these answers are useful to you.

We apologise for the delay in getting back to you. The end of the year is a very busy time for us at Peace Boat. We hope you understand.

We wish you all the best in your research.

Sincerely



ke saya, Meri

19/12/2017 [Tampilkan detailnya](#)

Dear Devy,

I hope this message finds you well.

My name is Anjeli Narandran and I work with Meri Joyce at Peace Boat.

Meri and I have completed your questionnaire. please find it attached. We hope these answers are useful to you.

We apologise for the delay in getting back to you. The end of the year is a very busy time for us at Peace Boat. We hope you understand.

We wish you all the best in your research.

Sincerely

Anjeli

Anjeli Narandran
International Coordinator
PEACE BOAT
3-13-1-B1 Takadanobaba
Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075
anjeli@peaceboat.gr.jp